

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**STRATEGI DAN DESAIN PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA
MANGROVE DI KELURAHAN BEBANGA KECAMATAN KALUKKU
KABUPATEN MAMUJU**

Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun

Abdul Malik, S.T., M.Si. / NIDN: 0011107705

Dr. Abdul Rahim, S.P., M.Si. / NIDN: 0012127302

Uca, S.Si., M.Si., Ph.D. / NIDN: 0031127113

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor: 127/UN36.0/PL/2018**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Strategi dan Desain Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D.
 b. NIP/NIDN : 19771011200604100 / 0011107705
 c. Jabatan Fungsional : Lektor
 d. Program Studi : Geografi
 e. Nomor HP : 085398592785
 f. Alamat surel (e-mail) : abdulmalik@unm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Abd. Rahim, S.P., M.Si.
 b. NIP/NIDN : 197312122005011001 / 0012127302
 c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Uca, S.Si., M.Si., Ph.D.
 b. NIP/NIDN : 197112311998021001 / 0031127113
 c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 75.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp 293.990.000,-

Makassar, 12 September 2018

Mengetahui,
 Ketua Lembaga Penelitian
 Universitas Negeri Makassar



(Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd.)
 NIP. 196308181988031004

Ketua Tim Peneliti,

(Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D.)
 NIP. 197710112006041001



- Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan
- Puslit Pemberdayaan Perempuan
- Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan
- Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi
- Puslit Pemuda dan Olah Raga

SURAT KETERANGAN

Nomor 1666/UN36.9/PL/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd
NIP : 196308181988031004
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Abdul Malik, S.T., M.Si, Ph.D
NIP : 197710112006041001
Fakultas : FMIPA Universitas Negeri Makassar

Telah melaksanakan penelitian dengan judul:

***"Strategi Dan Desain Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove Di Kelurahan
Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju"***

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan (Februari s.d. Nopember 2018)

Skema Penelitian: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018

Anggota Peneliti : Dr. Abd. Rahim S.P, M.Si & Uca S.Si, M.P, Ph.D

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 20 Desember 2018



Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd
NIP. 196308181988031004

RINGKASAN

Pengembangan kawasan ekowisata dengan memanfaatkan potensi hutan mangrove merupakan salah satu upaya dalam memenuhi minat, selera, tuntutan dan perilaku wisatawan yang telah mulai bergeser yang tidak datang untuk bersenang-senang saja, namun unsur pendidikan, konservasi dan sekaligus memberikan dampak sosial dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat telah mulai menjadi trend saat ini. Ekowisata yang berbasis lingkungan dan sumberdaya alam dinilai sukses dalam mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi, memberi manfaat pada peningkatan pengetahuan terhadap lingkungan baik masyarakat maupun wisatawan dan sekaligus perekonomian masyarakat.

Penelitian yang berlangsung selama 2 tahun (2018 dan 2019), pada tahun ke-1 bertujuan untuk menghasilkan sebuah rumusan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove guna mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove di kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Data yang dikumpulkan dari 5 stasiun yang telah ditentukan meliputi data kondisi biofisik kawasan (keanekaragaman jenis mangrove dan satwa, pasang surut dan luasan, sebaran dan ketebalan mangrove), sosial ekonomi, persepsi dan partisipasi masyarakat, dan persepsi wisatawan.

Pengumpulan data keanekaragaman mangrove dilakukan dengan metode transek. Data satwa dikumpulkan melalui pengamatan langsung atau dengan menggunakan teropong pada waktu yang telah ditentukan. Data pasang surut air laut dikumpulkan melalui pengukuran pasang surut selama 39 jam dan data luasan dan sebaran dengan teknik interpretasi citra satelit dan ketebalan vegetasi mangrove melalui pengukuran langsung. Data sosial ekonomi masyarakat, persepsi dan partisipasi masyarakat dan persepsi wisatawan dikumpulkan dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung secara mendalam. Selanjutnya, data-data tersebut ditabulasi hingga diperoleh nilai kerapatan, Indeks Nilai Penting/INP dan keanekaragaman jenis dari setiap jenis mangrove, jenis satwa (burung, reptil, ikan dan crustasea), dan ketinggian muka air laut. Untuk menentukan tingkat kesesuaian kawasan mangrove sebagai kawasan ekowisata dilakukan pembobotan dan skoring, sedangkan data sosial ekonomi, persepsi dan partisipasi masyarakat dan persepsi wisatawan di tabulasi dan di analisis secara deskriptif. Untuk menghasilkan rumusan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove data di analisis dengan menggunakan metode analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi biofisik kawasan (keanekaragaman mangrove dan satwa, pasang surut dan luasan, sebaran dan ketebalan vegetasi mangrove), sosial ekonomi, persepsi dan partisipasi masyarakat, dan persepsi wisatawan mendukung pengembangan kawasan mangrove ini sebagai kawasan ekowisata. Selanjutnya dalam melakukan pengembangan, strategi yang dapat diterapkan yakni yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*growth oriented strategy*) dengan menggunakan kekuatan (*Strengths*) internal yang dimiliki untuk mengambil keuntungan dari peluang (*Opportunities*) yang ada (eksternal) dan memiliki kesempatan besar untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) internal dan menghindari dari ancaman (*Threats*) eksternal yang akan menghadang dengan alternatif strategi yang dapat diterapkan: (1) *Strengths – Opportunities* (SO): Mempertahankan dan senantiasa melestarikan kondisi vegetasi mangrove dan keanekaragaman satwa pada kawasan ekowisata; Meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata; Mempertahankan dan senantiasa menjaga kebersihan kawasan ekowisata mangrove; Mempertahankan dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat setempat melalui

penyelenggaraan kegiatan pelatihan terkait ekowisata dan pelayanannya dan kegiatan pemberdayaan yang dapat menunjang pengembangan kawasan ekowisata dan peningkatan ekonomi rumah tangga; dan Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui pemasangan papan/spanduk pada ruang-ruang publik dan di bandar udara. (2) *Weaknesess – Opportunities* (WO): Peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata; peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata; Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai ekowisata dan pelayanan terhadap para pengelola melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan; Pembuatan rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata mangrove; dan Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui berbagai media elektronik, cetak, dan ruang-ruang publik. (3) *Strenghts – Threats* (ST): Pelarangan dan penegakan hukum terhadap kegiatan alih fungsi lahan/perluasan yang utamanya menjadi tambak; Melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak yang tidak produktif untuk mencapai target produksi dan menghentikan kegiatan perluasan tambak; Penerapan budidaya tambak dengan pola *Silviculture*; memberikan intensif/kompensasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi dan restorasi hutan mangrove; Menerapkan pola penebangan kayu mangrove dengan sistem tebang pilih; Pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan dan untuk menciptakan alternatif pekerjaan lain yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga; dan Berperan serta dalam kegiatan-kegiatan layanan ekowisata mangrove guna meningkatkan ekonomi rumah tangga. (4) *Weaknesess – Threats* (WT): Peningkatan peran pemerintah dan ketegasan dalam menegakkan aturan pelarangan terhadap kegiatan perusakan dan alih fungsi lahan/perluasan utamanya menjadi tambak; dan melatih keterampilan dan membuka peluang untuk pekerjaan alternatif (seperti pemandu wisata) bagi masyarakat lokal.

Terkait dengan target luaran sebagaimana yang diajukan dalam proposal tahun ke-1 dari rencana 2 tahun, maka hingga laporan akhir tahun 2018 ini, semua luaran baik wajib yakni Produk Strategi, dan luaran tambahan berupa draft artikel ilmiah, pemakalah pada seminar internasional pada The 2nd Bali International Tourism Conference (BITC), Udayana University, Bali tanggal 8-10 November 2018 dan draft buku ajar telah tercapai/dilakukan.

PRAKATA

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akhir Tahun penelitian tahun ke-1 dari rencana 2 tahun yang berjudul “Strategi dan Desain Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju” dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun ke-1 (2018), penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rumusan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove berdasarkan kesesuaian kondisi biofisik kawasan, sosial ekonomi masyarakat, persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat, dan persepsi wisatawan yang guna mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir khususnya di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang merupakan lokasi dari penelitian ini. Selain itu, rumusan strategi pengembangan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi serta dapat diadopsi untuk dapat diterapkan di daerah lain.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian hingga ke tahap laporan akhir tahun ini, mungkin masih banyak hal-hal yang masih kurang atau terlewatkan secara tidak disengaja, untuk itu masukan dan kritikan yang bersifat membangun terhadap laporan ini akan sangat bermanfaat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini melalui skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT). Selain itu, ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Jurusan Geografi UNM atas izin penelitian, bantuan dan kerjasamanya hingga penelitian tahap ke-1 ini dapat terselesaikan.

Makassar, 12 November 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT KETERANGAN	iii
RINGKASAN	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
3.1. Tujuan Penelitian Tahun ke-1 dari Rencana 2 Tahun	7
3.2. Manfaat Penelitian Tahun ke-1 dari Rencana 2 Tahun	7
BAB 4. METODE PENELITIAN	8
4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	8
4.2. Sumber dan Jenis Data	9
4.3. Teknik Pengumpulan Data	10
4.4. Analisis Data	13
4.5. Bagan Alir Penelitian	16
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	18
5.1. Hasil Penelitian	18
5.2. Luaran yang dicapai	41
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	42
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	43
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Matriks kesesuaian kawasan ekowisata mangrove	15
2.	Spesies mangrove yang teridentifikasi stasiun 8	setiap 1
3.	Kerapatan mangrove berdasarkan jenis pertumbuhan per stasiun	18
4.	Indeks Nilai Penting (INP) berdasarkan jenis pertumbuhan per stasiun	19
5.	Tingkat keanekaragaman jenis	20
6.	Jenis satwa	21
7.	Ketebalan vegetasi mangrove	22
8.	Hasil analisis kesesuaian kawasan ekowisata mangrove	24
9.	Umur	24
10.	Jenis kelamin	24
11.	Tingkat pendidikan masyarakat	25
12.	Mata pencaharian masyarakat	25
13.	Pendapatan masyarakat	25
14.	Pengeluaran masyarakat	26
15.	Jumlah tanggungan	26
16.	Fungsi hutan mangrove	26
17.	Manfaat hutan mangrove	27
18.	Kondisi hutan mangrove	27
19.	Kondisi flora dan fauna kawasan ekowisata mangrove	27
20.	Keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove	27
21.	Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove	21
22.	Kondisi jalan	30
23.	Ketersediaan jaringan listrik & suplai air bersih	30
24.	Biaya masuk	31
25.	Kondisi kebersihan kawasan ekowisata mangrove	31
26.	Kondisi jumlah pengunjung kawasan ekowisata mangrove	31

27.	Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove	32
28.	Keterlibatan pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove	32
29.	Umur wisatawan	33
30.	Jenis kelamin wisatawan	33
31.	Mata pencaharian	33
32.	Pendapatan	33
33.	Sumber informasi tentang kawasan ekowisata	34
34.	Jenis tujuan ke kawasan ekowisata	34
35.	Jarak tempat tinggal ke kawasan ekowisata	34
36.	Jenis transportasi yang digunakan	35
37.	Kondisi jalan	35
38.	Frekuensi kunjungan per bulan	35
39.	Biaya kegiatan wisata per kunjungan	35
40.	Keindahan alam kawasan ekowisata	36
41.	Penambahan fasilitas	36
42.	Indikator variabel kekuatan dan kelemahan internal	36
43.	Indikator variabel peluang dan ancaman eksternal	37
44.	Hasil SWOT	37
45.	Matriks SWOT strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove	39

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	(A) Obyek kawasan ekowisata mangrove Kalukku, Kabupaten Mamuju (B) Kondisi jembatan penghubung di kawasan ekowisata mangrove	2
2.	Road map penelitian	5
3.	Lokasi penelitian Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju	8
4.	Survei vegetasi mangrove	10
5.	Pengukuran pasang surut air laut	11
6.	Survei sosial ekonomi, persepsi dan partisipasi masyarakat	12
7.	Survei persepsi wisatawan	13
8.	Diagram Air Penelitian	17
9.	<i>Rhizophora mucronata</i> , spesies mangrove yang mendominasi kawasan ekowisata mangrove	19
10.	<i>Varanus</i> sp. (biawak), salah satu reptil yang terdapat di kawasan ekowisata mangrove	21
11.	Pasang surut air laut kawasan ekowisata mangrove	22
12.	Luasan, ketebalan dan sebaran mangrove	23
13.	Keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju	28
14.	Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove: (A) Pintu gerbang, (B) Area parkir, (C) Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove, (D) Media semai bibit mangrove, (E) Gazebo (ruang bersantai) bagi wisatawan, (F) Aula pertemuan, dan (G) warung makan/minum	29
15.	(A) Kondisi jalan masuk dari pintu gerbang ke kawasan ekowisata mangrove, (B) Jalan setapak dari papan dan bambu yang membelah hutan mangrove di kawasan ekowisata mangrove	30
16.	Jaringan kabel dan pipa untuk suplai listrik dan air ke kawasan ekowisata mangrove	30
17.	Kuadran SWOT strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove	38

BAB 1. PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan hutan yang hanya dapat dijumpai di kawasan tropis dan sub-tropis dan menempati areal di sepanjang pantai dan sungai (kawasan estuaria) yang dipengaruhi oleh pasang surut (Dahuri, 2003). Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat baik secara fisik, biologi dan ekonomi bagi masyarakat. Secara fisik, fungsi, manfaat dan layanan ekosistem hutan mangrove meliputi perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut, perangkap sedimen dan *recycling* nutrien. Secara biologi, hutan mangrove memberikan layanan terhadap kestabilan ekosistem, sumber nutrien, dan sebagai area memijah, mencari makan dan berkembang biak bagi biota laut (seperti ikan, kepiting dan udang). Secara ekonomi, hutan mangrove memberikan layanan sebagai area pengembangan budidaya, perikanan, wisata, penghasil kayu dan daun nipah yang dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Mangrove dapat menghasilkan bahan-bahan material untuk rumah tangga dan industri seperti kayu bakar, arang, dan kertas yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Giessen dkk. 2007; Ghufuran, 2012; Malik dkk. 2015a)

Dengan berbagai fungsi, manfaat dan layanan ekosistem yang dimiliki oleh hutan mangrove, upaya pemanfaatan guna memenuhi kebutuhan hidup telah banyak dilakukan dan telah berlangsung lama oleh masyarakat (Malik dkk. 2017) termasuk dalam pemanfaatannya sebagai kawasan wisata (Malik, 2005; Tuwo dkk. 2009), namun pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian kawasan mangrove masih saja terus berlangsung dan semakin tinggi (Malik dkk. 2015b).

Pemanfaatan kawasan wisata mangrove dengan konsep ekowisata merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut (Malik, 2005; Tuwo dkk. 2009). Konsep ini berbasis pada pendekatan pendidikan, pemeliharaan dan konservasi alam serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat (Malik, 2005; Laapo dkk. 2010). Selain itu, konsep ini sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari *old tourism* yang mana wisatawan yang hanya datang melakukan wisata saja tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi menjadi *new tourism* yang mana wisatawan yang datang untuk melakukan wisata yang di dalamnya ada unsur pendidikan dan konservasi (Rutana, 2011).

Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi Sulawesi Barat banyak menyimpan potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang produktif, menghasilkan pendapatan daerah dan memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat, salah satunya objek wisata hutan mangrove yang terletak di Kelurahan Bebanga

Kecamatan Kalukku. Objek wisata di daerah ini masuk dalam kategori ekowisata yang menyajikan dominasi hutan mangrove yang dapat menjadi lokasi kunjungan wisata setiap akhir pekan bagi wisatawan guna menikmati alam dan kesegaran suasananya (Zain, 2014). Pemanfaatan kawasan mangrove sebagai kawasan ekowisata telah berlangsung sejak 2013 (Zain, 2014), sayangnya potensi kawasan ekowisata ini belum menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana layaknya sebuah kawasan ekowisata (Ardiansyah, 2014). Selayaknya berdasarkan hasil lokakarya nasional ekowisata tanggal 25-26 Agustus 2006 di Bali, sebuah kawasan ekowisata hendaknya memenuhi prinsip-prinsip konservasi alam, edukasi, menyediakan peluang menikmati dan mencintai alam, dan memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan konsisten memberi kepuasan bagi konsumen (wisatawan) (Widowati, 2012).

Kawasan ekowisata ini baru menawarkan obyek/atraksi wisata pada sensasi wisata kuliner sambil menikmati alam di atas pesisir pantai, di antara rimbunnya pohon mangrove. Partisipasi masyarakat terlihat masih rendah dan sarana dan prasarana penunjang ekowisata masih sangat minim (Chandra, 2014; Zain, 2014). Pada kawasan ini baru terdapat beberapa bangunan semi permanen yang dibuat dengan konsep sederhana. Atapnya terbuat dari daun nipa (rumbia) dengan dinding seadanya (Gambar 1A).



Gambar 1. (A) Obyek kawasan ekowisata mangrove Kalukku, Kabupaten Mamuju (B) Kondisi jembatan penghubung di kawasan ekowisata mangrove (Sumber: Zain, 2014)

Bangunan-bangunan ini dihubungkan dengan jembatan yang di sanggah oleh kayu yang sebagian di ambil dari pohon mangrove, dengan alas terbuat dari kumpulan papan dan bambu yang diikat dan dijadikan satu sehingga tidak datar dan bergelombang. Untuk mengaksesnya, dari pintu masuk wisatawan harus berjalan kaki sejauh 150 meter dengan meniti jembatan bambu tersebut dengan kewaspadaan lebih dan konsentrasi jika tak ingin terjatuh ke kubangan lumpur (Zain, 2014; Chandra, 2014) (Gambar 1B). Selain itu, kurangnya data dan informasi yang mencakup kondisi biofisik kawasan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan serta sebuah desain perencanaan lanskap yang diduga kuat menjadi salah satu kendala dasar dalam pengembangan kawasan ini (Hasil Studi Pendahuluan Pengusul, 2017).

Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dimiliki, maka dalam mengembangkan kawasan ekowisata mangrove ini, maka dalam penelitian tahun pertama dari dua tahun yang direncanakan dirumuskan strategi guna mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove di daerah ini. Lebih jauh, terkait pengembangan penelitian terapan perguruan tinggi, penelitian ini sangat mendukung Renstra (Rencana Strategi) penelitian Universitas Negeri Makassar (UNM) yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sains khususnya dalam pengembangan ilmu-ilmu dasar/formal untuk memecahkan masalah akademik dan kemasyarakatan yang merupakan salah satu topik dalam Riset Unggulan perguruan tinggi UNM.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ‘Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju’ dilakukan atas dasar laporan terkini kondisi kawasan ekowisata tersebut yang dikemukakan oleh Chandra (2014), Zain (2014), Ardiansyah (2014) dan hasil studi pendahuluan Pengusul (2017).

Sejak empat tahun lalu (tahun 2013), kawasan mangrove yang terletak di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku telah dioperasikan sebagai kawasan ekowisata (Zain 2014) yang bertujuan menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang tidak hanya menikmati keindahan alam, namun sekaligus memperoleh pengetahuan (edukasi) mengenai fungsi dan manfaat hutan mangrove, pelestarian dan konservasi alam dan budaya serta memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan (Laopo dkk. 2010; Sawitri dkk. 2013; Putra, 2014). Lebih jauh Widowati (2012) mengungkapkan terdapat 9 prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah kawasan ekowisata berdasarkan hasil Lokakarya Ekowisata Nasional di Bali tanggal 25-26 Agustus 2006, yaitu: (1) peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat; (2) memiliki kepedulian komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya; (3) menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam; (4) edukasi: ada proses pembelajaran antara masyarakat dengan wisatawan; (5) pengembangannya harus didasarkan atas persetujuan masyarakat setempat melalui musyawarah; (6) memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat; (7) mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen; dan (9) dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan pemasaran yang bertanggungjawab.

Namun hingga saat ini (tahun 2017), akibat ketidakseriusan dan kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat, maka kondisi kawasan ekowisata (sarana dan prasarana penunjang) masih terlihat sangat minim dan sederhana. Obyek/atraksi wisata yang disajikan masih sebatas pada penyajian wisata kuliner sambil menikmati keindahan alam dan kesegaran kawasan mangrove (Chandra, 2014; Zain, 2014). Selain itu, minimnya data dan informasi mengenai kondisi kawasan yang mencakup biofisik kawasan termasuk keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar yang terdapat di dalam kawasan, sosial ekonomi

dan partisipasi masyarakat dan fasilitas penunjang, diduga kuat turut mendukung lambannya pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata tersebut.

Untuk itu, melalui kegiatan penelitian yang akan di laksanakan selama 2 tahun ini (2018-2019), pada tahun pertama akan dirumuskan sebuah strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove dengan mengacu pada kondisi kesesuaian kawasan mangrove untuk kawasan ekowisata yang mencakup kondisi biofisik kawasan (Yulianda, 2007; Sawitri dkk. 2013) sehingga memberi peluang dalam pengembangan obyek/atraksi wisata lain seperti widya wisata dan jelajah, pengamatan burung dan satwa liar, penanaman mangrove, *Canoeing* dan *Boating* (Wahyuni dkk. 2007). Rumusan strategi ini juga mengacu pada kondisi sosial ekonomi, persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dan persepsi wisatawan terhadap kawasan ekowisata (Sawitri dkk. 2013). Selain itu pada tahun kedua akan dihasilkan sebuah produk berupa Desain Perencanaan Lanskap kawasan ekowisata mangrove yang siap untuk diterapkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove ini. Selengkapnya *road map* penelitian Strategi dan Desain Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Road map penelitian

Kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan ini tergambar pada sebuah rumusan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove dan produk berupa rancangan lanskap kawasan ekowisata mangrove yang sesuai dengan karakteristik biofisik kawasan

mangrove dan kekhasan masyarakat (sosial ekonomi) di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian Tahun ke-1 dari Rencana 2 Tahun

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sedangkan secara khusus bertujuan untuk menghasilkan sebuah rumusan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove berdasarkan kesesuaian kondisi biofisik kawasan, sosial ekonomi masyarakat, persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat, dan persepsi wisatawan guna mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove.

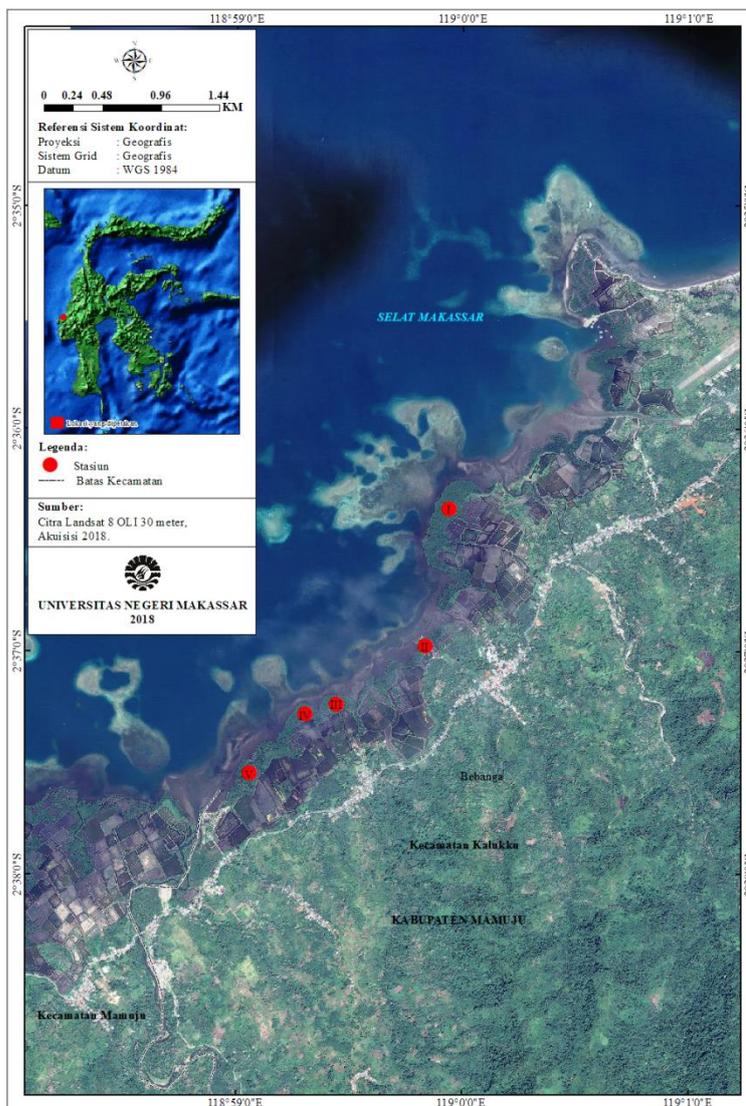
3.2. Manfaat Penelitian Tahun ke-1 dari Rencana 2 Tahun

Penelitian ini akan memberikan manfaat dalam pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir khususnya di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang merupakan lokasi dari penelitian ini. Selain itu, rumusan strategi pengembangan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi serta dapat diadopsi untuk dapat diterapkan di daerah lain.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. Secara geografis kawasan ini terletak antara $2^{\circ}35'7.88''\text{LS}$ - $2^{\circ}44'8.62''\text{LS}$ dan antara $118^{\circ}58'32.04''\text{BT}$ - $119^{\circ}3'15.74''\text{BT}$ dan dibagi dalam 5 stasiun pengamatan (Gambar 3). Lokasi ini sekitar 20 km dari Kota Mamuju dan kurang lebih 6 km dari bandara udara Tampa Padang, kabupaten Mamuju. Penelitian tahun ke-1 (2018) dari 2 tahun rencana dilakukan selama 10 bulan.



Gambar 3. Lokasi Penelitian Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Stasiun	LS	BT	Stasiun	LS	BT
I	$2^{\circ}36'21.57''$	$118^{\circ}59'56.44''$	IV	$2^{\circ}37'16.93''$	$118^{\circ}59'18.11''$
II	$2^{\circ}36'57.71''\text{S}$	$118^{\circ}59'49.95''\text{E}$	V	$2^{\circ}37'32.88''$	$118^{\circ}59'3.30''$
III	$2^{\circ}37'13.63''\text{S}$	$118^{\circ}59'23.92''\text{E}$	-	-	-

4.2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan melalui kegiatan observasi, pengukuran dan wawancara kepada masyarakat. Jenis data primer ini terdiri atas: data biofisik, dan sosial ekonomi masyarakat, persepsi dan partisipasi masyarakat dan persepsi wisatawan, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan hasil penelitian sebelumnya atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Data Biofisik

- a. Data keanekaragaman tumbuhan mangrove dan satwa. Data keanekaragaman tumbuhan mangrove terdiri atas: data jumlah dan jenis spesies mangrove, tingkat kerapatan, Indeks Nilai Penting (INP) dan tingkat keanekaragaman, sedangkan untuk satwa yang mencakup jenis burung dan reptil, ikan, dan krustasea seperti kepiting dan udang.
- b. Pasang surut meliputi data ketinggian pasut (tertinggi dan terendah) dan nilai rata-rata ketinggian permukaan air (*Mean Sea Level*).
- c. Luasan, sebaran dan ketebalan vegetasi mangrove.

Data Sosial Ekonomi Masyarakat, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dan Persepsi Wisatawan

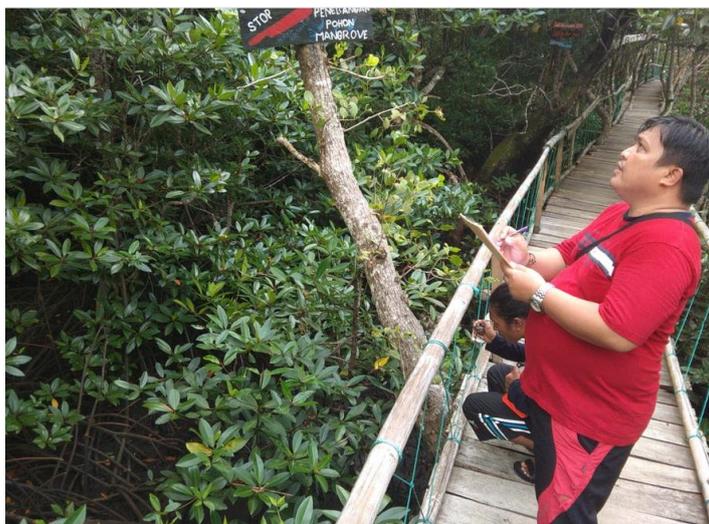
Data sosial ekonomi meliputi data umur responden, jumlah tanggungan, pendidikan, mata pencaharian, sumber dan jumlah pendapatan dan pengeluaran. Untuk persepsi dan partisipasi masyarakat, data ini meliputi data tentang pemahaman masyarakat tentang fungsi hutan mangrove dan jenis pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan, persepsi mengenai kawasan ekowisata mangrove dan kesediaan dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan kawasan ekowisata. Untuk persepsi wisatawan meliputi identitas wisatawan termasuk mata pencaharian dan pendapatan, fasilitas penunjang ekowisata, keindahan alam, frekuensi kunjungan, aksesibilitas (jarak, jenis transportasi dan kondisi jalan), biaya perjalanan ke dan dari kawasan ekowisata termasuk biaya masuk dan sumber informasi kawasan ekowisata.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Biofisik kawasan, meliputi:

- **Keanekaragaman Jenis Mangrove dan Satwa**

Pengambilan data keanekaragaman tumbuhan mangrove menggunakan metode transek (English dkk. 1997; Frontier Madagascar, 2005; Malik et al. 2015b), dengan menggunakan alat dan bahan kompas, klinometer, alat hitung (*tally counter*), roll meter, tali plastik, dan buku identifikasi spesies mangrove. Setiap site yang telah ditentukan akan diterapkan 3 garis transek dengan panjang transek tergantung pada ketebalan kawasan mangrove. Ketebalan mangrove ini terlebih dahulu diukur dengan menarik garis lurus dengan garis pantai dengan menggunakan roll meter dari bagian darat di mana tumbuhan mangrove masih ditemukan ke batas laut (Sawitri dll. 2013). Setiap transek dibuat plot dengan ukuran 10m x 10 m untuk level pohon, 5m x 5 m untuk level anakan mangrove (*sapling*) dan 2m x 2 m untuk level bibit mangrove (*seedling*). Setiap plot juga akan ditandai posisinya dengan menggunakan GPS (*Global positioning System*). Selanjutnya, dilakukan identifikasi nama spesies (mengacu pada buku identifikasi tumbuhan mangrove) dan jumlah individu mangrove baik untuk level pohon, anakan dan bibit pada setiap plot dan mengukur diameter batang pohon mangrove pada ketinggian dada (*diameter at breast height* (DBH)) dan tinggi pohon mangrove (Malik et al. 2015b).



Gambar 4. Survei vegetasi mangrove (Sumber: Hasil survei lapangan, 2018)

Untuk pengamatan satwa, di amati secara langsung jenis burung dan reptil atau menggunakan teropong (memiliki pembesaran yang sangat baik) selama 1 minggu yang tiap harinya dilakukan selama 4 jam (pagi hari pada pukul 07.00-09.00 dan sore hari pukul

15.30-17.30) dan mengacu pada buku identifikasi jenis burung dan reptil (Sawitri et al. 2013). Untuk jenis biota perairan (ikan, kepiting, dan udang) di amati dengan metode transek sabuk (*belt transect*). Ukuran (lebar) transek sesuai disesuaikan dengan kondisi lapangan (Raffaelli dan Hawkins, 1996).

- **Pasang Surut**

Pengukuran pasang surut (pasut) dilakukan selama 39 jam secara berturut-turut dengan menggunakan tiang pasut (*tide gauge*) guna memperoleh data ketinggian pasut (tertinggi dan terendah) dan nilai rata-rata ketinggian permukaan air (*Mean Sea Level*) (Malik, 2008).



Gambar 5. Pengukuran pasang surut air laut (Sumber: hasil survei lapangan, 2018)

- **Luasan, Distribusi dan Ketebalan Vegetasi Mangrove**

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi citra dengan menggunakan citra Landsat 8 terbaru. Proses pengolahan citra meliputi koreksi geometrik, *False Color Composite* (FCC), pengklasifikasian citra dengan metode *supervised maximum likelihood* (Emch dan Peterson, 2006; Lillesand dkk. 2008) guna membedakan obyek tutupan mangrove yang tidak terganggu/rusak dan terganggu dan obyek lainnya. Untuk menguji keakuratan dalam pengklasifikasian akan dilakukan kegiatan pembenaran lapangan (*ground truth*) dengan metode *confusion matrix* (Lillesand dkk. 2008; Wang dll. 2003) dengan tingkat keakuratan yang memenuhi persyaratan yakni 85 persen dan jika kurang dari itu, maka dilakukan proses pengklasifikasian ulang

(Anderson dkk. 1976). Proses interpretasi citra ini menggunakan software ER Mapper 7.0. Proses selanjutnya, citra yang telah terklasifikasi kemudian di vegetasi mangrove, dan dilakukan layout peta (Manassrisuksi dkk. 2001) kawasan ekowisata mangrove sebagai luaran dari proses ini dengan software ArcGIS 10.5.

Data Sosial Ekonomi Masyarakat, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat, dan Persepsi Wisatawan

Pengumpulan data sosial ekonomi dan persepsi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode survei rumah tangga (*household survey*) dengan menggunakan kuesioner. Selain itu wawancara mendalam dilakukan jika dibutuhkan pendalaman terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau dibutuhkan informasi yang lebih mendalam. Ukuran sampel responden ditentukan berdasarkan persamaan Slovin: (Sevilla dkk. 2007)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Di mana: n = jumlah sampel; N = jumlah populasi; e = batas toleransi kesalahan 10%.

Pemilihan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, berdasarkan adanya keterkaitan langsung mata pencaharian dan ketergantungan pada hutan mangrove, seperti nelayan, pengumpul kayu bakar, pengumpul buah mangrove, dan pemilik usaha warung makan di sekitar kawasan ekowisata.



Gambar 6. Survei sosial ekonomi, persepsi dan partisipasi masyarakat (Sumber: hasil survei lapangan, 2018)

Untuk persepsi wisatawan, dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam guna melengkapi informasi yang dibutuhkan. Ukuran sampel dan pemilihan sampel responden wisatawan dilakukan

secara *Accidental Sampling*, yang mana sampel diperoleh terhadap wisatawan yang ditemukan selama survei lapangan dilakukan.



Gambar 7. Survei persepsi wisatawan (Sumber: hasil survei lapangan, 2018)

4.4. Analisis Data

Biofisik, meliputi:

- **Keanekaragaman Spesies Mangrove**

Kerapatan jenis mangrove (K), kerapatan relatif (Kr), frekuensi spesies (F), frekuensi relatif (FR), dan tutupan spesies (C) dan tutupan relatif (CR) dihitung dengan menggunakan persamaan 2 sampai 7: (Malik dkk. 2015b)

$$K_i = \frac{n_i}{A} \quad (2), \text{ dan } KR_i = \frac{n_i}{\sum n} \times 100 \% \quad (3)$$

di mana: K_i = kerapatan spesies i (individu/ha) ; KR_i = kerapatan relatif spesies i (%)

n_i = jumlah tegakan spesies i ; $\sum n$ = total jumlah tegakan seluruh spesies

A = total luasan area yang diobservasi (ha)

$$F_i = \frac{P_i}{\sum p} \quad (4), \text{ dan } FR_i = \frac{F_i}{\sum F} \times 100 \% \quad (5)$$

di mana: F_i = frekuensi spesies i ; FR_i = frekuensi relatif spesies i (%)

p_i = jumlah plot dimana spesies i ditemukan

$\sum F$ = jumlah frekuensi seluruh spesies yang ditemukan

$\sum p$ = jumlah total plot yang di observasi

$$C_i = \frac{BA}{A} \quad (6), \text{ dan } CR_i = \frac{C_i}{\sum C} \times 100 \% \quad (7)$$

di mana: C_i = tutupan areal spesies i

$BA = \pi DBH^2 / 4$, dimana $BA = \text{Basal Area}$ (cm) dan ketinggian DBH

(*Diameter at Breast Height*) (cm); $A = \text{total area plot}$ (m^2)

$\Sigma C = \text{Luas total area tutupan untuk semua spesies}$

$CR_i = \text{Luas area tutupan relatif spesies } i \text{ (\%)}$

Indeks Nilai Penting (INP) yang menyatakan tingkat dominan spesies dilakukan dengan menjumlahkan nilai KR , FR , and CR : (Malik dkk. 2015b)

$$INP = KR + FR + CR \quad (8); \text{ range nilai INP} = 0 - 300$$

Tingkat keanekaragaman jenis (H') dari spesies mangrove dihitung dengan menggunakan Indeks Diversitas Shannon-Wiener (H) sebagai berikut: (Malik dkk. 2015b)

$$H' = - \sum P_i \ln (P_i) ; P_i = (n_i/N) \quad (9)$$

di mana: $n_i = \text{jumlah individu jenis ke-}i$; $N = \text{jumlah individu seluruh jenis}$;

$p_i = \text{perbandingan jumlah individu suatu jenis dengan keseluruhan jenis.}$

Kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon–Wiener (H') sebagai berikut:

$H' < 1 = \text{keanekaragaman rendah}$; $1 < H' \leq 3 = \text{keanekaragaman sedang}$, dan

$H' > 3 = \text{keanekaragaman tinggi.}$

- **Pasang surut**

Perhitungan tinggi muka air rata-rata (MSL) dihitung dengan persamaan:

$$MSL = \frac{\sum_{i=1}^{39} H_i C_i}{\sum_{i=1}^{39} C_i} \quad (10)$$

di mana:

$MSL = \text{Tinggi muka air rata-rata (m)}$

$H = \text{Tinggi muka air (m)}$

$C = \text{Konstanta Doodson (Malik, 2008)}$

- **Kesesuaian Kawasan Ekowisata Mangrove**

Analisis kesesuaian kawasan ekowisata mangrove menggunakan persamaan dan matriks kesesuaian (Tabel 1), sebagai berikut: (Yulianda, 2007)

$$IKE = \sum \left(\frac{N_i}{N_{maks}} \right) \times 100\% \quad (11)$$

di mana: $IKE = \text{Indeks Kesesuaian Ekowisata}$; $N_i = \text{nilai parameter ke-}i \text{ (bobot } \times \text{ skor)}$;

$N_{maks} = \text{nilai maksimum dari suatu kategori ekowisata}$

Tabel 1. Matriks Kesesuaian Kawasan Ekowisata Mangrove

No.	Parameter	Bobot	Kategori (S1)	Skor	Kategori (S2)	Skor	Kategori (S3)	Skor	Kategori (N)	Skor
1	Ketebalan mangrove (m)	5	>500	4	>200-500	3	50-200	2	<50	1
2	Kerapatan mangrove (100 m ²)	4	>15-25	4	>10-15	3	5-10	2	<5	1
3	Jenis mangrove	4	>5	4	3-5	3	1-2	2	0	1
4	Pasang surut (m)	3	0-1	4	>1-2	3	>2-5	2	>5	1
5	Obyek satwa liar dan biota perairan	3	Burung, reptil, ikan, udang, kepiting, moluska	4	Ikan, udang, kepiting, moluska	3	Ikan, moluska	2	Salah satu satwa liar atau biota perairan	1

S1 = sangat sesuai (80-100%); S2 = Sesuai (60-<80%); S3 = Sesuai bersyarat (35-<60%) dan N = Tidak Sesuai (<35%).

Sosial Ekonomi Masyarakat, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dan Persepsi Wisatawan

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner akan di tabulasi dengan menggunakan software Microsoft Excel 2010 dan di analisis secara deskriptif. Selain dengan menggunakan kuesioner, guna mendukung informasi yang dibutuhkan baik yang terkait dengan kuesioner maupun yang tidak termuat dalam kuesioner diperoleh dengan dari hasil wawancara langsung secara mendalam.

Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove

Dalam merumuskan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove di gunakan metode analisis SWOT dengan melakukan klasifikasi data dalam 4 kelompok, kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor lingkungan internal dan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang merupakan faktor lingkungan eksternal. Selanjutnya di lakukan analisis hubungan antara ke empat kelompok data tersebut dengan menggunakan matriks SWOT dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strengths* = S), kelemahan (*weaknesses* = W), peluang (*opportunities* =O) dan ancaman (*threats* =T).
- Melakukan pembobotan dan skoring terhadap tiap-tiap komponen yakni kekuatan (S), Kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) ke dalam tabel indikator variabel.

c. Pembuatan kuadran SWOT

Setelah nilai total pembobotan dari masing-masing faktor-faktor tersebut diperoleh, selanjutnya diplot dalam grafik kuadran SWOT untuk mengetahui posisinya apakah berada di kuadran I (situasi sangat menguntungkan), kuadran II (banyak ancaman, namun kekuatan dari segi internal masih dimiliki), kuadran III (memiliki peluang yang tinggi, namun menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal), dan kuadran IV (situasi yang tidak menguntungkan karena menghadapi beberapa ancaman dan kelemahan internal).

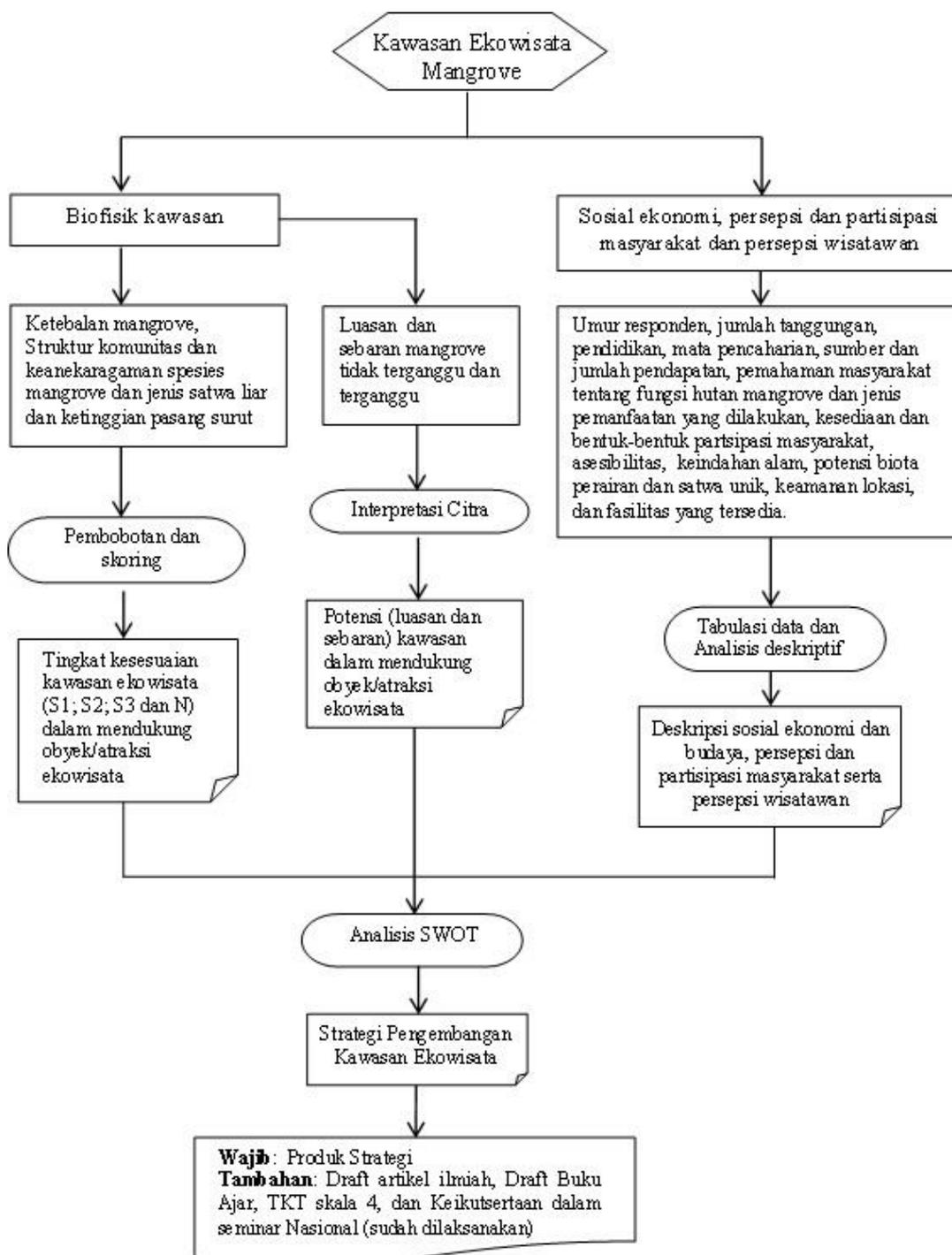
d. Pembuatan matriks SWOT yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis, yakni strategi SO (Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi ST (Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman), strategi WO (Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang) dan Strategi WT (Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman) (Rangkuti, 2001)

4.5. Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kawasan ekowisata mangrove Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan direncanakan berlangsung selama 2 tahun (2018-2019).

Pada tahun ke-1 (2018) dari 2 tahun rencana, pelaksanaan penelitian berfokus pada pengumpulan data biofisik kawasan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat, persepsi wisatawan dan strategi pengembangan kawasan ekowisata. Untuk data biofisik, analisis data dilakukan dengan menggunakan berbagai persamaan, pembobotan dan skoring dan analisis interpretasi citra. Untuk data sosial ekonomi masyarakat, persepsi dan partisipasi masyarakat dan persepsi wisatawan di analisis secara deskriptif. Sedangkan untuk strategi pengembangan kawasan ditentukan dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian yang ditargetkan pada tahun ke-1, yakni tingkat kesesuaian kawasan mangrove untuk kawasan ekowisata sehingga dapat mendukung pengembangan obyek/atraksi wisata. Selain itu penelitian ini juga menargetkan hasil berupa gambaran/deskripsi kondisi sosial ekonomi, persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat, persepsi wisatawan terhadap kawasan ekowisata dan rumusan strategi pengembangan ekowisata mangrove. Pada tahun ke-1 ini, luaran wajib penelitian

yang ditargetkan berupa produk Strategi, sedangkan luaran tambahan yakni: draft artikel ilmiah, draf buku ajar, Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) pada skala 4 dan Keikutsertaan dalam seminar nasional (sudah dilaksanakan). Selengkapnya bagan alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:



Gambar 8. Diagram Air Penelitian

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Biofisik Kawasan

Vegetasi Mangrove

Mangrove yang ditemukan di 5 stasiun yang telah ditetapkan pada kawasan ekowisata di Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju terdiri dari 4 famili (*Avicenniaceae*, *Rhizophoraceae*, *Sonneratiaceae*, dan *Meliaceae*) dan 7 spesies yang meliputi *Avicennia marina* (Am), *Bruguiera gymnorrhiza* (Bg), *Rhizophora mucronata* (Rm), *Rhizophora stylosa* (Rs), *Sonneratia alba* (Sa), *Sonneratia caseolaris* (Sc), dan *Xylocarpus granatum* (Xg). Sebaran spesies tersebut pada setiap stasiun antara 4 - 5 spesies, namun ada 3 spesies yakni *Bruguiera gymnorrhiza*, *Rhizophora mucronata*, dan *Rhizophora stylosa* ditemukan di semua stasiun (Tabel 2).

Table 2. Spesies mangrove yang teridentifikasi setiap stasiun

No.	Nama Family	Nama Spesies	Nama Lokal	Stasiun				
				I	II	III	IV	V
1	<i>Avicenniaceae</i>	<i>Avicennia marina</i>	<i>Pajapi</i>	+	-	-	+	+
2	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>	<i>Tanjang</i>	+	+	+	+	-
3	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Rhizophora mucronata</i>	<i>Pangkang</i>	+	+	+	+	+
4	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Rhizophora stylosa</i>	<i>Pangkang</i>	+	+	+	+	+
5	<i>Sonneratiaceae</i>	<i>Sonneratia alba</i>	<i>Padada</i>	+	+	-	+	+
6	<i>Sonneratiaceae</i>	<i>Sonneratia caseolaris</i>	<i>Padada</i>	-	-	+	-	-
7	<i>Meliaceae</i>	<i>Xylocarpus granatum</i>	<i>Buli cella</i>	-	-	+	-	-
Jumlah Spesies				5	4	5	5	4

(+) Ditemukan; (-) tidak ditemukan

Tabel 3. Kerapatan mangrove berdasarkan jenis pertumbuhan per stasiun

Tingkat Pertumbuhan	Kerapatan mangrove tiap Stasiun (ind./m ²)					Nilai Kerapatan Max - Min
	I	II	III	IV	V	
Pohon	1.02	0.34	0.70	0.61	0.51	1.02
	0.92	0.22	0.63	0.50	0.36	0.22
Anakan	0.53	0.18	1.31	0.66	0.44	1.31
	0.37	0.06	0.64	0.51	0.36	0.06
Semaian	0.95	0.41	1.98	0.92	0.66	1.98
	0.7	0.31	0.78	0.68	0.63	0.31

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa tingkat kerapatan mangrove pada kawasan ini untuk tingkat pertumbuhan pohon antara 0.22 ind./m² – 1.02 ind./m², anakan antara 0.06 ind./m² – 1.31 ind./m², dan semai antara 0.31 ind./m² – 1.98 ind./m². Kerapatan tertinggi untuk tingkat pertumbuhan pohon ditemukan pada stasiun I (1.02 ind./m²),

sedangkan untuk anakan dan semaian masing-masing ditemukan di stasiun III (1.03 ind./m² dan 1.98 ind./m²) (Tabel 3).

Untuk Indeks Nilai Penting (INP) yang menunjukkan dominansi suatu spesies tumbuhan pada suatu kawasan, diperoleh bahwa pada semua tingkat pertumbuhan (pohon, anakan dan semai) dan semua stasiun utamanya pada stasiun II, *Rhizophora mucronata* merupakan spesies yang dominan (Gambar 9), diikuti oleh *Bruguiera gymnorrhiza* untuk pohon pada stasiun II, *Sonneratia alba* untuk anakan pada stasiun V, dan *Rhizophora stylosa* untuk semaian pada stasiun II (Tabel 4).



Gambar 9. *Rhizophora mucronata*, spesies mangrove yang mendominasi kawasan ekowisata mangrove (sumber: hasil survei lapangan, 2018)

Tabel 4. Indeks Nilai Penting (INP) berdasarkan jenis pertumbuhan per stasiun

Jenis Pertumbuhan	Spesies	Stasiun					INP	
		I	II	III	IV	V	Max	Min
Pohon	Am	45.88	-	-	45.15	-	45.88	45.15
	Bg	59.89	97.11	61.80	60.25	-	97.11	59.89
	Rm	110.24	230.41	101.31	101.91	138.11	230.41	101.31
	Rs	44.67	69.59	49.17	56.97	60.11	69.59	44.67
	Sa	61.72	94.45	-	65.05	61.94	94.45	61.72
	Sc	-	-	68.66	-	-	68.66	68.66
	Xg	-	-	45.15	-	58.48	58.48	45.15
Anakan	Am	36.28	-	-	35.20	47.73	47.73	35.20
	Bg	39.71	36.11	28.36	29.42	-	39.71	28.36
	Rm	64.25	200.00	66.83	64.25	74.49	200.00	64.25
	Rs	34.99	-	43.10	40.87	47.45	47.45	34.99
	Sa	44.70	-	-	41.26	49.49	49.49	41.26
	Sc	-	-	37.14	-	-	37.14	37.14

	Xg	-	-	33.92	-	-	33.92	33.92
Semaian	Am	36.71	-	-	36.31	45.45	45.45	36.31
	Bg	38.24	-	32.05	30.60	-	38.24	30.60
	Rm	60.58	146.77	70.05	66.15	71.72	146.77	60.58
	Rs	32.23	75.81	46.45	38.46	46.97	75.81	32.23
	Sa	44.67	26.48	-	38.46	51.08	51.08	26.48
	Sc	-	-	38.46	-	-	38.46	38.46
	Xg	-	-	35.90	-	-	35.90	35.90

Am = *Avicennia marina*, Bg = *Bruguiera gymnorrhiza*, Rm = *Rhizophora mucronata*, Rs = *Rhizophora stylosa*, Sa = *Sonneratia alba*, Sc = *Sonneratia caseolaris*, dan Xg = *Xylocarpus granatum* (Xg). Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Untuk tingkat keanekaragaman jenis (H'), berdasarkan formula Shannon-Wiener, diperoleh bahwa nilai keanekaragaman jenis untuk pohon dan anakan tertinggi pada stasiun IV, dengan nilai masing-masing yakni 1.40 dan 1.48, sedangkan untuk semai tertinggi pada stasiun I yakni 1.55 (Tabel 5). Berdasarkan kriteria indeks keanekaragaman Shannon–Wiener, keanekaragaman jenis pada kawasan ekowisata mangrove umumnya berada pada kategori sedang ($1 < H' \leq 3$), kecuali pada stasiun II baik pada tingkat pertumbuhan pohon, anakan maupun semai dan stasiun V pada tingkat pertumbuhan pohon berada pada kategori rendah ($H' < 1$) (Tabel 5).

Tabel 5. Tingkat keanekaragaman jenis

Tingkat Pertumbuhan	Tingkat Keanekaragaman Jenis (H') per Stasiun				
	I	II	III	IV	V
Pohon	1.25	0.54	1.21	1.40	0.90
Anakan	1.49	0.12	1.45	1.48	1.27
Semai	1.55	0.55	1.39	1.46	1.32

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Keanekaragaman Jenis Satwa

Hutan mangrove merupakan habitat dari beberapa jenis satwa seperti burung, reptil, ikan, dan crustacea. Pada kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga ini, jenis satwa yang ditemukan sebagai berikut (Tabel 6):

Tabel 6. Jenis satwa

No.	Jenis Satwa	Nama satwa	Nama Ilmiah
1	Burung	Walet	<i>Collocalia</i> sp.
		Bangau	<i>Ciconia</i> sp.
		Cekakak	<i>Halycon</i> sp.
		Kuntul	<i>Egretta</i> sp.
2	Reptil	Biawak	<i>Varanus</i> sp.
		Kadal	<i>Dasia</i> sp.
		Ular air	<i>Cerberus</i> sp
		Ular pohon	<i>Chrysopelea</i> sp.
3	Ikan	Bandeng	<i>Chanos chanos</i>
		Balanak	<i>Mugilidae</i>
		Gelodok	<i>Periophthalmus</i> sp
4	Crustacea	Udang	<i>Penaeus</i> sp.
		Kepitng Bakau	<i>Episesarma</i> sp.
		Kepitng Bakau	<i>Thalamita</i> sp.
		Kepitng Bakau	<i>Scylla</i> sp.

Sumber: Hasil survei lapangan, 2018.

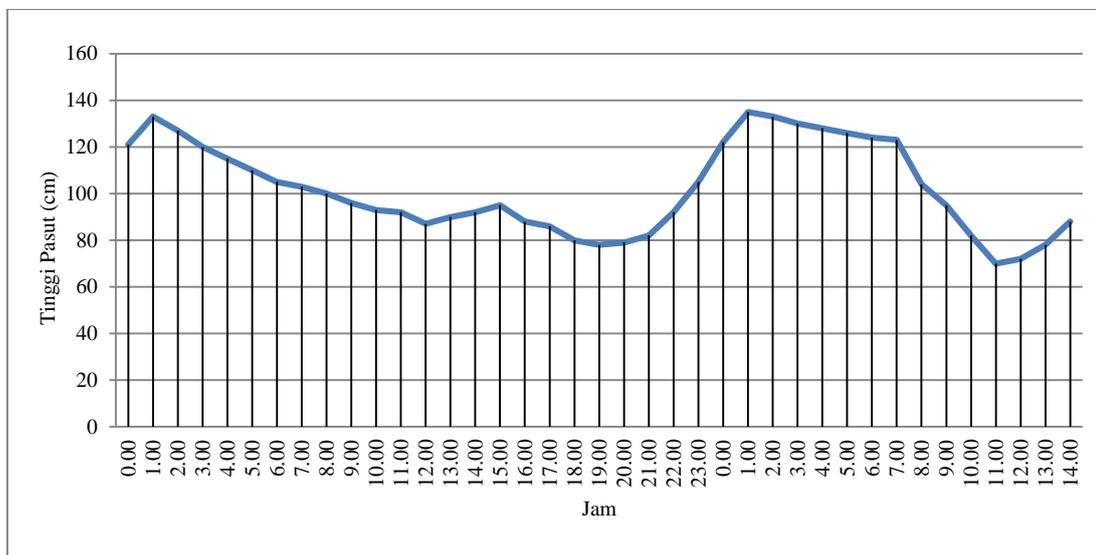


Gambar 10. *Varanus* sp (biawak), salah satu reptil yang terdapat di kawasan ekowisata mangrove (sumber: hasil survei lapangan, 2018)

Pasang Surut

Ketinggian air pasang di kawasan ini mencapai 135 cm dan air surut mencapai 70 cm, sedangkan nilai rata-rata ketinggian permukaan air (*Mean Sea Level*) mencapai 102 cm. Tipe pasang surut yang terjadi di kawasan ini termasuk tipe campuran condong

ke harian ganda (*mixed tide prevailing semidiurnal*) yang mana dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda (Gambar 11).



Gambar 11. Pasang surut air laut kawasan ekowisata mangrove

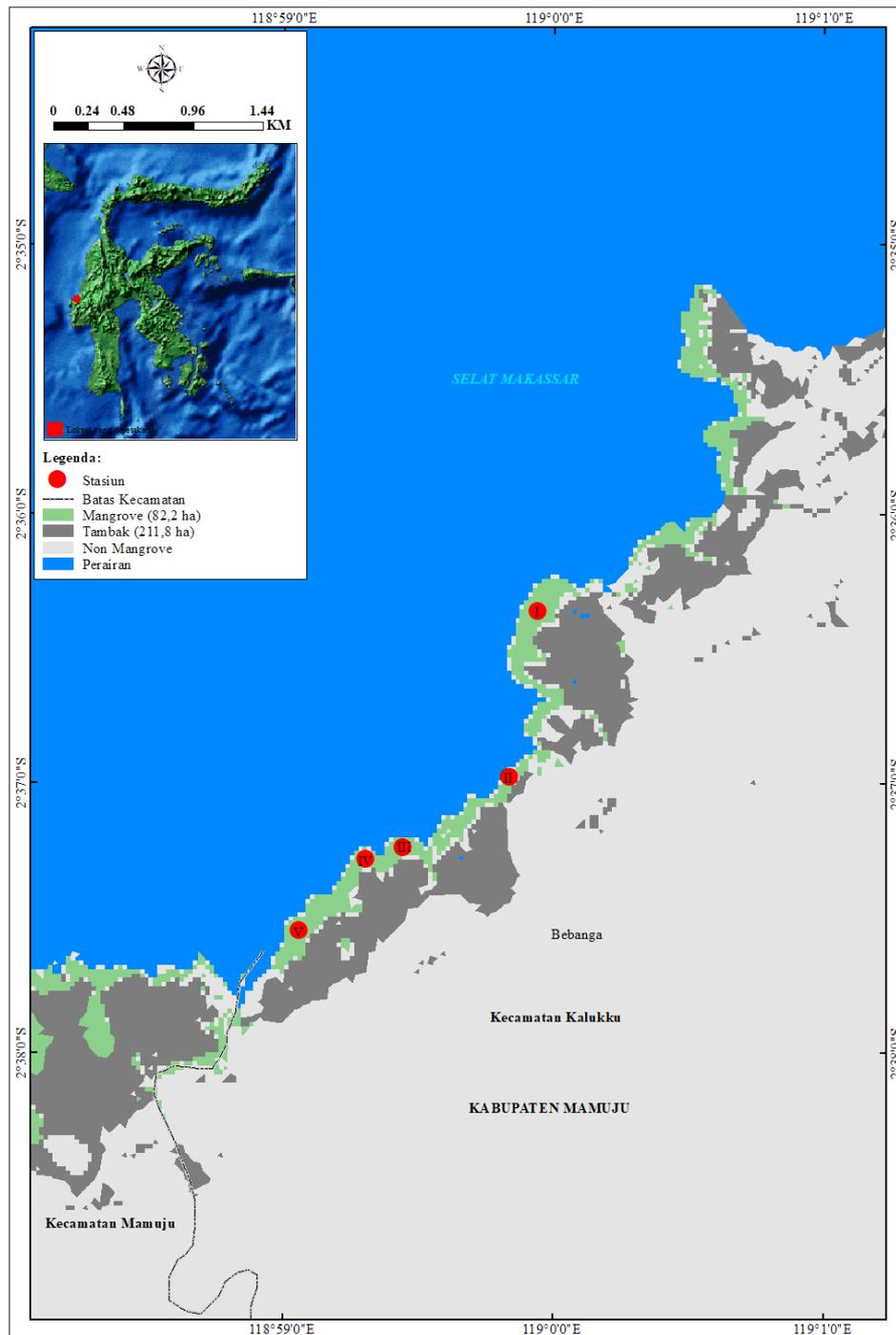
Luasan, Sebaran dan Ketebalan Vegetasi Mangrove

Hasil analisis citra satelit Landsat 8 akuisisi 27 februari 2018, luasan hutan mangrove yang termasuk dalam kawasan ekowisata di Kelurahan Bebanga sebesar 82.2 ha dan tersebar sepanjang pantai kelurahan tersebut, dengan luasan terbesar berada di bagian Timur Laut kelurahan tersebut (Gambar 12).

Ketebalan tertinggi hutan mangrove dari arah laut menuju daratan yang masih ditemukan mangrove mencapai 213 m (stasiun I) dan terendah 111 m (stasiun II), dengan nilai ketebalan rata-rata 161 m (Tabel 7, Gambar 12).

Tabel 7. Ketebalan vegetasi mangrove

Stasiun	Letak Geografis		Ketebalan (m)
	LS	BT	
I	-2°36'21.57"	118°59'56.44"	213
II	-2°36'58.66"	118°59'50.06"	111
III	-2°37'14.34"	118°59'26.53"	120
IV	-2°37'16.93"	118°59'18.11"	150
V	-2°37'32.88"	118°59'3.30"	210
Rata-rata			161



Gambar 12. Luasan, sebaran dan ketebalan mangrove

5.1.2. Kesesuaian Kawasan Ekowisata Mangrove

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan kawasan ekowisata mangrove dengan menggunakan persamaan dan matriks kesesuaian pada Tabel 1, diperoleh bahwa tingkat kesesuaian stasiun I dan V sebagai kawasan ekowisata mangrove berada pada kriteria “Sangat Sesuai” (84%), sedangkan 3 stasiun lainnya (II, III dan IV) berada pada tingkat

“Sesuai” (78%) (Tabel 8). Terdapatnya dua tingkatan kesesuaian ini, utamanya disebabkan oleh parameter ketebalan mangrove yang berbeda, di mana pada stasiun I dan V ketebalan mangrove diatas 200 m, sedangkan pada stasiun II, III dan IV di bawah 200 m (Tabel 7)

Tabel 8. Hasil analisis kesesuaian kawasan ekowisata mangrove

No.	Parameter	Bobot	Stasiun I		Stasiun II		Stasiun III		Stasiun IV		Stasiun V	
			Skor	Ni	Skor	Ni	Skor	Ni	Skor	Ni	Skor	Ni
1	Ketebalan mangrove (m)	5	3	15	2	10	2	10	2	10	3	15
2	Kerapatan mangrove (100 m ²)	4	4	16	4	16	4	16	4	16	4	16
3	Jenis mangrove	4	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12
4	Pasang surut (m)	3	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
5	Obyek satwa liar dan biota perairan	3	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Jumlah		-	-	64	-	59	-	59	-	59	-	64
Persentase (%)		-	-	84	-	78	-	78	-	78	-	84
Kategori Kesesuaian		-	-	S1	-	S2	-	S2	-	S2	-	S1

S1 = sangat sesuai (80-100%); S2 = Sesuai (60-<80%); S3 = Sesuai bersyarat (35-<60%), dan N = Tidak Sesuai (<35%).

5.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi data umur responden, pendidikan, mata pencaharian, sumber, jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran dan jumlah tanggungan yang disajikan pada Tabel 9 – 15.

Tabel 9. Umur

Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
<30	29	29
30-40	43	43
41-50	21	21
>50	7	7
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 10. Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	55	55
Perempuan	45	45
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Umur masyarakat Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang menjadi responden didominasi umur antara 30-40 tahun (43%) yang di ikuti oleh

umur di bawah 30 tahun (29%) dan terendah di atas 50 tahun (7%) (Tabel 9) yang mana perbandingan antara yang memiliki jenis kelamin laki-laki maupun perempuan tidaklah jauh berbeda (hampir seimbang, laki-laki 55% dan perempuan 45%) (Tabel 10).

Tingkat pendidikan mereka (responden) umumnya mencapai SMA (40%) dan diikuti oleh SD dan tidak sekolah yang masing-masing 20% dan 19% (Tabel 11). Hampir sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan (45%), sedangkan sisanya ada yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan lainnya (Tabel 12). Tingkat pendapatan per bulan yang dimiliki oleh mereka hampir seimbang baik yang memiliki pendapatan di bawah 5 ratus ribu rupiah, antara 5 ratus ribu dan 1 juta rupiah dan di atas 1 juta rupiah, namun yang tertinggi di bawah 5 ratus ribu rupiah (36%) (Tabel 13).

Tabel 11. Tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tidak Sekolah	19	19
SD	20	20
SMP	16	16
SMA	40	40
PT	5	5
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 12. Mata pencaharian masyarakat

Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Nelayan	45	45
Petani	16	16
Pemungut Hasil Hutan	0	0
Lainya	39	39
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 13. Pendapatan masyarakat

Pendapatan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 500.000	36	36
Rp 500.000 - Rp 1.000.000	32	32
> Rp 1.000.000	32	32
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Sementara itu, untuk tingkat pengeluaran, juga demikian (hampir seimbang) dimana tingkat pengeluaran di bawah 5 ratus ribu rupiah (39%) dan diikuti oleh tingkat pengeluaran antara 5 ratus ribu dan 1 juta rupiah dan di atas 1 juta rupiah masing-masing

32% (Tabel 14). Umumnya mereka memiliki jumlah tanggungan di bawah 3 orang (57%) dan diikuti oleh jumlah tanggungan antara 3 – 5 orang (33%) (Tabel 15).

Tabel 14. Pengeluaran masyarakat

Pengeluaran	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 500.000	39	39
Rp 500.000 - Rp 1.000.000	31	31
> Rp 1.000.000	30	30
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 15. Jumlah tanggungan

Pengeluaran	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
<3	57	57
3-5	33	33
>5	10	10
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

5.1.4. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Persepsi dan partisipasi masyarakat meliputi data tentang pemahaman masyarakat tentang fungsi hutan mangrove dan jenis pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan, kesediaan dan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemerintah terkait pengembangan kawasan ekowisata. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum masyarakat telah mengetahui fungsi dan manfaat hutan mangrove (Tabel 16 dan 17).

Tabel 16. Fungsi hutan mangrove

Fungsi hutan mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Mencegah abrasi pantai	19	19
Tempat memijah dan membesar berbagai organisme perairan	11	11
Tempat bersarang berbagai satwa liar	15	15
Menyediakan kawasan ekowisata	25	25
Penghasil kayu dan non kayu	15	15
Tidak Tahu	15	15
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Namun, fungsi hutan mangrove yang paling dikenal oleh masyarakat yakni sebagai kawasan ekowisata (25%) yang diikuti oleh fungsi hutan mangrove dalam mencegah abrasi pantai (19%) (Tabel 16), sedangkan dari sisi kemanfaatan, manfaat sebagai tempat berwisata alam juga merupakan yang paling dikenal oleh masyarakat (34%) dan diikuti

oleh manfaat sebagai tempat mengambil berbagai jenis ikan, kepiting, udang dan burung (30%) (Tabel 17).

Tabel 17. Manfaat hutan mangrove

Manfaat hutan mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tempat mengambil kayu untuk kayu bakar, bahan baku arang dan kertas	25	25
Tempat mengambil berbagai jenis ikan, kepiting, dan udang	30	30
Sebagai tempat berwisata alam	34	34
Tidak Tahu	11	11
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 18. Kondisi hutan mangrove

Kondisi hutan mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Semakin Baik	45	45
Masih Baik	39	39
Mulai Rusak	9	9
Sudah Rusak	7	7
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 19. Kondisi flora dan fauna kawasan ekowisata mangrove

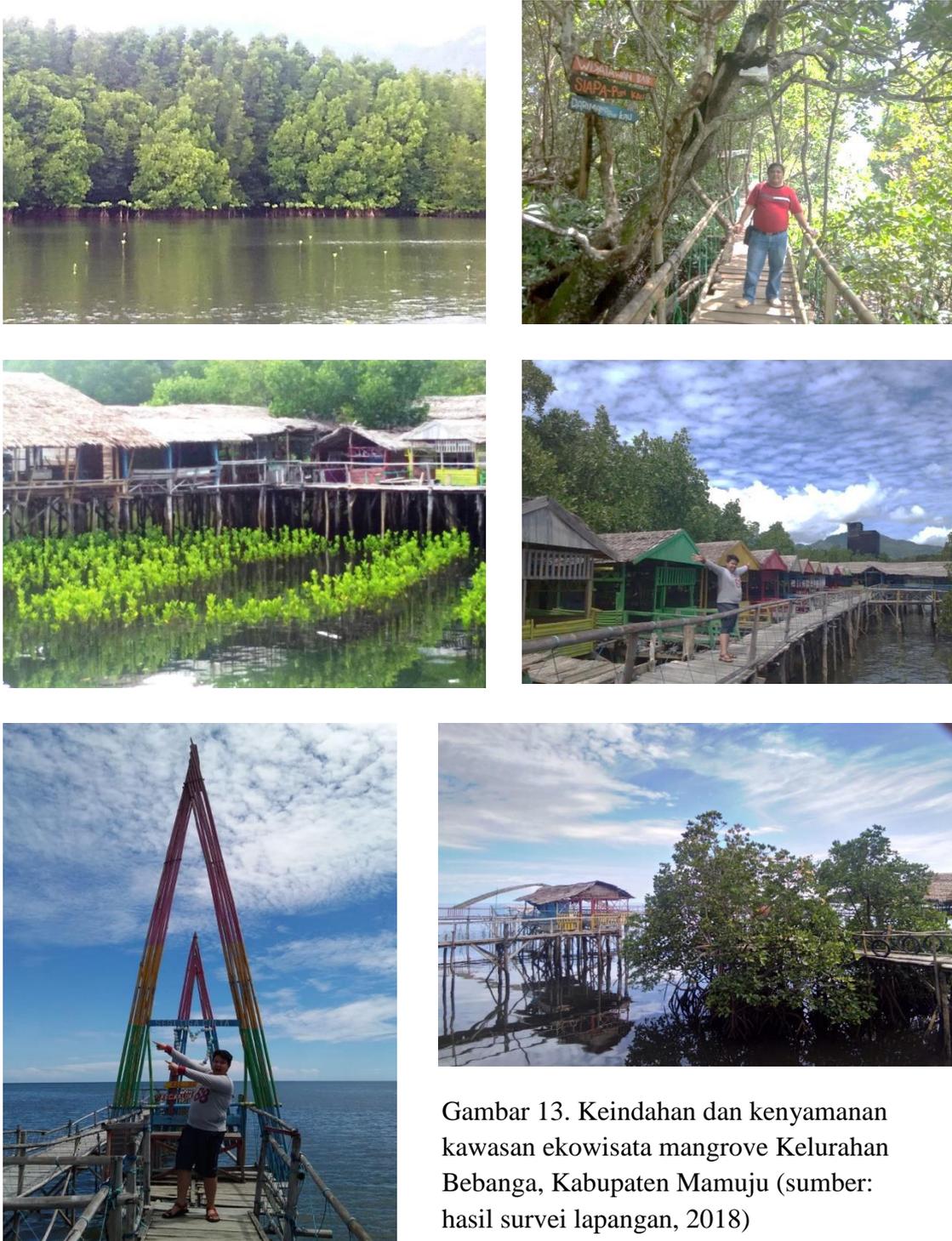
Kondisi flora dan fauna kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	45	45
Cukup Baik	38	38
Tidak Baik	17	17
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 20. Keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove

Keindahan dan Kenyamanan Kawasan Ekowisata Mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	30	30
Baik	36	36
Cukup Baik	34	34
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018



Gambar 13. Keindahan dan kenyamanan kawasan ekowisata mangrove Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju (sumber: hasil survei lapangan, 2018)

Selanjutnya, hampir sebagian besar (45%) masyarakat menyatakan bahwa kondisi hutan mangrove yang menjadi kawasan ekowisata dalam kondisi semakin baik (Tabel 18). Hal ini didasari oleh penilaian masyarakat yang hampir sebagian besar (45%) menyatakan kondisi flora dan fauna-nya dalam kondisi baik (Tabel 19) dan keindahan dan kenyamanan

kawasan ekowisata mangrove yang juga rata-rata baik (cukup baik 34%, baik 36% dan sangat baik 30%) (Tabel 20; Gambar 13).

Terkait dengan fasilitas umum dalam menunjang sebuah kawasan ekowisata mangrove, hampir sebagian besar menilai fasilitas umum yang ada masih dalam taraf cukup baik (41%) dan baik (32%), namun terdapat 27% yang menilai tidak baik (Tabel 21; Gambar 14).

Tabel 21. Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove

Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	32	32
Cukup Baik	41	41
Tidak Baik	27	27
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018



Gambar 14. Fasilitas umum penunjang kawasan ekowisata mangrove: (A) Pintu gerbang, (B) Area parkir, (C) Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove, (D) Media semai bibit mangrove, (E) Gazebo (ruang bersantai) bagi wisatawan, (F) Aula pertemuan, dan (G) warung makan/minum (sumber: hasil survei lapangan, 2018)

Tabel 22. Kondisi jalan

Kondisi jalan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	32	32
Cukup Baik	41	41
Tidak Baik	27	27
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018



Gambar 15. (A) Kondisi jalan masuk dari pintu gerbang ke kawasan ekowisata mangrove, (B) Jalan setapak dari papan dan bambu yang membelah hutan mangrove di kawasan ekowisata mangrove (sumber: hasil survei lapangan, 2018)

Tabel 23. Ketersediaan jaringan listrik dan suplai air bersih

Ketersediaan jaringan listrik dan suplai air bersih	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	21	21
Baik	32	32
Cukup Baik	47	47
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018



Gambar 16. Jaringan kabel dan pipa untuk suplai listrik dan air ke kawasan ekowisata mangrove (sumber: hasil survei lapangan, 2018)

Kondisi jalan dalam mengakses kawasan ekowisata dinilai oleh hampir sebagian besar masyarakat juga masih cukup baik (41%) dan baik (32%), namun juga terdapat 27% yang menilai tidak baik (Tabel 22). Sementara masalah ketersediaan jaringan listrik dan suplai air bersih, hampir sebagian besar masyarakat (47%) menilai cukup baik (Tabel 23), sedangkan biaya masuk kawasan ekowisata sebesar 5,000 rupiah bagi setiap pengunjung yang dikenakan oleh pengelola dianggap oleh masyarakat rata-rata sudah baik (Tabel 24).

Tabel 24. Biaya masuk

Biaya masuk	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	32	32
Baik	34	34
Cukup Baik	35	35
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Kondisi kebersihan dari kawasan ekowisata oleh sebagian besar masyarakat juga menyatakan sudah baik (Tabel 25). Sedangkan untuk peningkatan jumlah pengunjung, umumnya masyarakat menyatakan terjadi peningkatan, walau terdapat 19% yang menyatakan tidak terjadi peningkatan (Tabel 26).

Tabel 25. Kondisi kebersihan kawasan ekowisata mangrove

Kondisi kebersihan kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	31	31
Baik	42	42
Cukup Baik	27	27
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 26. Kondisi jumlah pengunjung kawasan ekowisata mangrove

Kondisi jumlah pengunjung	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Meningkatkan	20	20
Meningkat	38	38
Cukup Meningkatkan	23	23
Tidak Meningkatkan	19	19
Sangat Tidak Meningkatkan	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Selanjutnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove, umumnya masyarakat menilai bahwa keterlibatan masyarakat sudah baik (Tabel 27), sedangkan untuk keterlibatan pemerintah sendiri, lebih dari sebagian besar masyarakat menganggap pemerintah daerah kurang memiliki keterlibatan dalam pengembangan kawasan ekowisata ini (Tabel 28).

Tabel 27. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	30	30
Baik	41	41
Cukup Baik	29	29
Tidak Baik	0	0
Sangat Tidak Baik	0	0
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 28. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove

Keterlibatan pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	19	19
Cukup Baik	19	19
Tidak Baik	33	33
Sangat Tidak Baik	29	29
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

5.1.5. Persepsi Wisatawan

Kawasan mangrove di Kelurahan Bebanga Kabupaten Mamuju telah menjadi salah satu destinasi ekowisata di daerah ini. Dari hasil wawancara terhadap 112 wisatawan yang dilakukan selama survei lapangan, diperoleh bahwa wisatawan yang melakukan kunjungan ke kawasan ini didominasi oleh kaum muda dengan umur di bawah 30 tahun (Tabel 29) dengan porsi laki-laki maupun perempuan yang hampir seimbang (laki-laki 46% dan perempuan 54%) (Tabel 30).

Tabel 29. Umur wisatawan

Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< 30	98	88
30-40	14	13
41-50	0	0
> 50	0	0
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 30. Jenis kelamin wisatawan

Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	52	46
Perempuan	60	54
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Wisatawan ini umumnya memiliki mata pencaharian/status sebagai pelajar/mahasiswa (78%) yang diikuti oleh pegawai swasta (13%) (Tabel 31). Mereka umumnya memiliki pendapatan dibawah 500 ribu (59%) dan antara 500 ribu dan 1 juta (25%) (Tabel 32). Informasi mengenai kawasan ekowisata mangrove ini, umumnya mereka peroleh dari teman/keluarga (54%) dan dari internet (36%) (Tabel 33).

Tabel 31. Mata pencaharian

Mata pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	87	78
TNI/POLRI	0	0
PNS	1	1
Pegawai Swasta	14	13
Lain-lain	10	9
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 32. Pendapatan

Pendapatan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 500.000	66	59
Rp 500.000 - Rp 1.000.000	28	25
Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000	6	5
Rp 1.500.000 - Rp 2.000.000	9	8
> Rp 2.500.000	3	3
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 33. Sumber Informasi tentang kawasan ekowisata

Sumber informasi	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Media Internet	40	36
Media Cetak	0	0
Media Elektronik	12	11
Teman/Keluarga	60	54
Lainnya	0	0
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Hampir semua wisatawan (93%) yang melakukan kunjungan ke kawasan ekowisata ini, menjadi tujuan utama kunjungan tersebut dan sisanya 7% sebagai persinggahan/transit yang kebetulan melewati kawasan ini (Tabel 34). Sebagian besar dari wisatawan yang mengunjungi kawasan ekowisata ini, memiliki tempat tinggal yang jaraknya di bawah 25 km (didominasi pada jarak 11 – 20 km (52%). Hanya terdapat 9% yang jarak tinggalnya di atas 25 km (Tabel 35).

Tabel 34. Jenis tujuan ke kawasan ekowisata

Jenis tujuan ke kawasan ekowisata	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tujuan Utama	104	93
Persinggahan/Transit	8	7
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 35. Jarak tempat tinggal ke kawasan ekowisata

Jarak Tempat Tinggal ke kawasan ekowisata	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< 5 KM	23	21
5 - 10 KM	7	6
11 - 20 KM	58	52
21 - 25 KM	14	13
> 25 KM	10	9
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Untuk mengakses kawasan ekowisata ini, mereka semua menggunakan kendaraan pribadi (umumnya menggunakan motor) (Tabel 36). Terkait dengan kondisi jalan untuk mengakses kawasan ekowisata ini, mereka menganggap cukup baik (38%) dan baik (33%), namun terdapat 29% wisatawan menganggap kurang baik (Tabel 37).

Tabe 36. Jenis transportasi yang digunakan

Jenis transportasi	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Kendaraan Pribadi	112	100
Kendaraan Umum	0	0
Kendaraan Milik Instansi	0	0
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabe 37. Kondisi jalan

Kondisi jalan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	0	0
Baik	37	33
Cukup Baik	43	38
Kurang Baik	32	29
Sangat Kurang Baik	0	0
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Setiap bulannya mereka bisa melakukan kunjungan ke kawasan ekowisata lebih dari 4 kali (27%), namun yang tertinggi sebanyak 2 kali (33%) (Tabel 38). Setiap melakukan kunjungan sebagian besar dari mereka bisa menghabiskan biaya antara 50 ribu sampai 100 ribu (52%) (Tabel 39).

Tabel 38. Frekuensi kunjungan per bulan

Frekuensi kunjungan per bulan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1 Kali	19	17
2 Kali	37	33
3 Kali	10	9
4 Kali	16	14
> 4 Kali	30	27
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 39. Biaya kegiatan wisata per kunjungan

Biaya kegiatan wisata per kunjungan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
< Rp 50.000	30	27
Rp 50.000 - Rp 100.000	58	52
> Rp 100.000	24	21
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Terkait dengan keindahan alam kawasan ekowisata ini, mereka semuanya memuji keindahan alam kawasan ini (Tabel 40). Namun mereka semua menilai penambahan fasilitas guna menunjang kawasan ekowisata ini diperlukan (Tabel 41).

Tabel 40. Keindahan alam kawasan ekowisata

Keindahan alam kawasan ekowisata	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Indah	36	32
Indah	69	62
Biasa Saja	7	6
Jelek	0	0
Sangat Jelek	0	0
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

Tabel 41. Penambahan fasilitas

Penambahan fasilitas	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Sangat Perlu	88	79
Perlu	24	21
Tidak Perlu	0	0
Total	112	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2018

5.1.6. Analisis SWOT

Dalam menentukan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove di gunakan metode analisis SWOT dengan melakukan klasifikasi data dalam 4 kelompok, kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor lingkungan internal dan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang merupakan faktor lingkungan eksternal.

Tabel 42. Indikator variabel kekuatan dan kelemahan internal

No.	Kekuatan (<i>Strengths</i> = S)	Bobot	Rating	Skor
S1	Kondisi hutan mangrove (kerapatan tinggi, didominasi oleh jenis <i>Rhizophora mucronata</i> , dan keanekaragaman yang cukup baik serta ketebalan mangrove yang cukup tinggi)	0.10	4	0.40
S2	Keanekaragaman satwa (burung dan reptil, ikan, kepiting dan udang) yang cukup tinggi.	0.10	3	0.30
S3	Tingkat kesesuaian lahan sebagai kawasan ekowisata mangrove pada tingkat "Sesuai"	0.10	4	0.40
S4	Memiliki keindahan dan menawarkan kenyamanan dalam melakukan kegiatan ekowisata	0.08	3	0.24
S5	Kondisi jalan sudah cukup baik	0.07	3	0.21
S6	Kebersihan kawasan ekowisata sudah baik	0.08	3	0.24
S7	Tersedia jaringan listrik yang cukup baik	0.08	3	0.24
S8	Umumnya masyarakat telah paham terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove, utamanya sebagai kawasan ekowisata	0.07	3	0.21

S9	Kondisi hutan mangrove yang semakin baik	0.08	3	0.24
S10	Biaya kegiatan melakukan wisata cukup murah	0.07	2	0.14
S11	Dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengembangkan kawasan ekowisata	0.10	4	0.40
S12	Letak lokasi kawasan ekowisata mangrove yang strategis (tidak jauh dari bandara, sekitar 6 km dan 20 km dari kota Mamuju)	0.07	3	0.21
Jumlah		1.00	-	3.23

No.	Kelemahan (<i>Weaknesses</i> = W)	Bobot	Rating	Skor
W1	Peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove masih minim	0.30	1	0.30
W2	Pengelolaan masih dilakukan oleh masyarakat secara mandiri (belum melibatkan pemerintah)	0.20	1	0.20
W3	Fasilitas penunjang yang masih kurang	0.20	2	0.40
W4	Kemampuan sumberdaya manusia yang mengelola kawasan ekowisata masih rendah dan belum ada pemandu khusus ekowisata mangrove	0.10	2	0.20
W5	Belum memiliki konsep detail kawasan ekowisata (rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata mangrove)	0.10	2	0.20
W6	Informasi dan promosi yang masih kurang	0.10	2	0.20
Jumlah		1,00	-	1.50

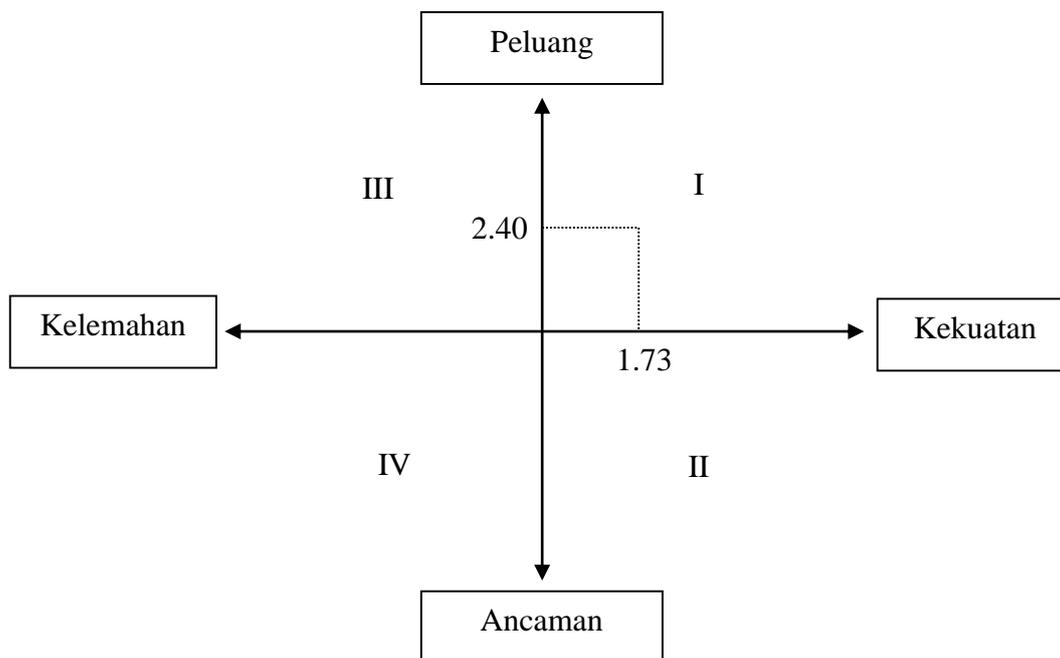
Tabel 43. Indikator variabel peluang dan ancaman eksternal

No.	Peluang (<i>Opportunities</i> = O)	Bobot	Rating	Skor
O1	Pergeseran minat wisatawan ke jenis wisata yang berbasis pendidikan, konservasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat (ekowisata)	0.20	3	0.60
O2	Jumlah wisatawan cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Mamuju	0.40	4	1.60
O3	Peningkatan jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi kawasan ekowisata mangrove	0.40	4	1.60
Jumlah		1,00	-	3.80

No.	Ancaman (<i>Threats</i> = T)	Bobot	Rating	Skor
T1	Konversi hutan mangrove menjadi tambak	0.60	1	0.60
T2	Penebangan kayu mangrove	0.40	2	0.80
Jumlah		1,00	-	1.40

Tabel 44. Hasil SWOT

Jumlah Skor	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	X	Y
	3.23	1.50	3.80	1.40	1.73	2.40



Gambar 17. Kuadran SWOT strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove

Gambar 11 menunjukkan bahwa posisi kawasan mangrove kelurahan Bebanga Kabupaten Mamuju dalam pengembangan ekowisata bersifat positif (kuadran I), baik untuk faktor internal maupun eksternal. Hal ini berarti strategi yang dapat diterapkan adalah yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*growth oriented strategy*) dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada (eksternal) dan memiliki kesempatan besar untuk mengatasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang akan menghadang. Kelemahan internal yang dimiliki seperti kurangnya peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove, peningkatan fasilitas penunjang kawasan ekowisata, peningkatan sumberdaya manusia dalam mengelola kawasan ekowisata, belum adanya rancangan lanskap kawasan ekowisata, dan perlunya lebih menyebarluaskan informasi dan promosi kawasan ekowisata ini dapat mengubah dari posisi strategi yang dimiliki dari kuadran I ke kuadran II yang berfokus pada produk/pasar, sehingga pemasaran wisata sudah bisa dilakukan secara ekspansif.

Selanjutnya, dengan menggunakan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal di atas, maka dilakukan pendekatan dengan menggunakan matriks SWOT, yang bertujuan untuk memformulasi alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam

pengembangan kawasan ekowisata mangrove di kelurahan Bebanga kabupaten Mamuju, yang disajikan pada Tabel 45 berikut:

Tabel 45. Matriks SWOT strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<p>EFAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi hutan mangrove (kerapatan tinggi, didominasi oleh jenis <i>Rhizophora mucronata</i>, dan keanekaragaman jenis yang cukup baik serta ketebalan mangrove yang cukup tinggi). 2. Keanekaragaman satwa liar (burung dan reptil, ikan, kepiting dan udang) yang cukup tinggi. 3. Tingkat kesesuaian lahan sebagai kawasan ekowisata mangrove yang pada tingkat “Sesuai” 4. Memiliki keindahan dan menawarkan kenyamanan dalam melakukan kegiatan ekowisata. 5. Kondisi jalan sudah cukup baik. 6. Kebersihan kawasan ekowisata sudah baik. 7. Tersedia jaringan listrik yang cukup baik. 8. Umumnya masyarakat telah paham terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove, utamanya sebagai kawasan ekowisata. 9. Kondisi hutan mangrove yang semakin baik. 10. Biaya kegiatan melakukan wisata cukup murah. 11. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengembangkan kawasan ekowisata. 12. Letak lokasi kawasan ekowisata mangrove yang strategis (tidak jauh dari bandara, sekitar 6 km dan 20 km dari kota Mamuju). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove masih minim. 2. Pengelolaan masih dilakukan oleh masyarakat secara mandiri (belum ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan). 3. Fasilitas penunjang yang masih kurang. 4. Kemampuan sumberdaya manusia yang mengelola kawasan ekowisata masih rendah dan belum ada pemandu khusus ekowisata mangrove. 5. Belum memiliki konsep detail kawasan ekowisata (rancangan lanskap kawasan ekowisata mangrove). 6. Informasi dan promosi yang masih kurang dan perlu ditingkatkan.

<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran minat wisatawan ke jenis wisata yang berbasis pendidikan, konservasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat (ekowisata). 2. Jumlah wisatawan cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Mamuju. 3. Peningkatan jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi kawasan ekowisata mangrove. 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan dan senantiasa melestarikan kondisi vegetasi mangrove dan keanekaragaman satwa pada kawasan ekowisata (S1, S2, S3, S4, S8, S9, O1, O2, O3). b. Meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata (S5, S7, O2, O3). c. Mempertahankan dan senantiasa menjaga kebersihan kawasan ekowisata mangrove (S6, S4, S9, O2, O3). d. Mempertahankan dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat setempat melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan terkait ekowisata dan pelayanannya dan kegiatan pemberdayaan yang dapat menunjang pengembangan kawasan ekowisata dan peningkatan ekonomi rumah tangga (S11, O1, O2). e. Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui pemasangan papan/banner pada ruang-ruang publik dan di bandar udara (S12, S10, O1, O2, O3). 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata (W1, W2, O1, O2, O3). 2. Peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata (W3, O2, O3). 3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai ekowisata dan pelayanan terhadap para pengelola melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan (W4, O1, O2, O3). 4. Pembuatan rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata mangrove (W5, O1, O2, O3). 5. Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui berbagai media elektronik, cetak, dan ruang-ruang publik (W6, O1, O2, O3).
<p style="text-align: center;">Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi hutan mangrove menjadi tambak. 2. Penebangan kayu mangrove 	<p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelarangan dan penegakan hukum terhadap kegiatan alih fungsi lahan/perluasan yang utamanya menjadi tambak (S1, S4, S9, T1). 2. Melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak yang tidak produktif untuk mencapai target produksi dan menghentikan kegiatan perluasan tambak (S1, S4, S9, T1). 3. Penerapan budidaya tambak dengan pola Silviculture (S1, S4, S9, T1). 4. Memberikan intensif/kompensasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan 	<p style="text-align: center;">Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi pemerintah dan meningkatkan ketegasan dalam menegakkan aturan pelarangan terhadap kegiatan perusakan dan alih fungsi lahan/perluasan utamanya menjadi tambak (W1, W2, T1, T2). 2. Melatih keterampilan dan Membuka peluang untuk pekerjaan alternatif (seperti pemandu wisata) bagi masyarakat lokal (W4, T1, T2).

	<p>konservasi dan restorasi hutan mangrove (S1, S4, S9, S11, T1, T2).</p> <p>5. Menerapkan pola penebangan kayu mangrove dengan system tebang pilih (S1, S4, S9, T1, T2).</p> <p>6. Pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan dan untuk menciptakan alternatif pekerjaan lain yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga (S1, S4, S9, S11, T1, T2).</p> <p>7. Berperan serta dalam kegiatan-kegiatan layanan ekowisata mangrove guna meningkatkan ekonomi rumah tangga (S11, T1, T2)</p>	
--	---	--

5.2. Luaran yang dicapai

Hingga laporan akhir tahun ini selesai, semua target capaian yang diajukan dalam proposal tahun ke-1 dari rencana 2 tahun, baik luaran wajib berupa produk strategi dan luaran tambahan berupa artikel ilmiah (draf), keikutsertaan sebagai pemakalah/presenter pada The 2nd Bali International Tourism Conference (BITC), Udayana University, Bali, 8-10 November 2018 dan buku ajar (draf) dapat tercapai dan dilakukan. Selengkapannya mengenai luaran penelitian tersebut dapat di lihat pada lampiran 1 - 4.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil yang telah dicapai hingga saat ini, maka rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya (tahun berikutnya):

- a. Penyempurnaan draf artikel ilmiah, pengiriman hingga *accepted* di jurnal internasional bereputasi.
- b. Penyempurnaan draft buku ajar dan pengiriman ke penerbit untuk proses editing dan penerbitan.
- c. Melakukan riset untuk tahapan selanjutnya pada tahun ke-2 (2019) yang terkait dengan desain lanskap kawasan ekowisata mangrove, jika proposal disetujui dan didanai.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kondisi biofisik kawasan (vegetasi mangrove, satwa liar dan biota perairan, pasang surut dan luasan, sebaran dan ketebalan vegetasi mangrove), sosial ekonomi, persepsi dan partisipasi masyarakat, dan persepsi wisatawan, kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju memiliki potensi dan kelayakan yang mendukung untuk dikembangkan lebih baik. Bentuk strategi yang dapat diterapkan yakni yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*growth oriented strategy*) dengan menggunakan kekuatan (*Strenghts*) yang dimiliki oleh kawasan ekowisata mangrove untuk mengambil keuntungan dari peluang (*Opportunities*) eksternal ada dan memiliki kesempatan besar untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) internal yang dimiliki dan menghindari dari ancaman (*Threats*) eksternal yang akan menghadang.

Rumusan strategis yang dapat diterapkan sekaligus menjadi produk strategi yang menjadi rekomendasi dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai berikut:

1. *Strenghts – Opportunities* (SO): Mempertahankan dan senantiasa melestarikan kondisi vegetasi mangrove dan keanekaragaman satwa pada kawasan ekowisata; Meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata; Mempertahankan dan senantiasa menjaga kebersihan kawasan ekowisata mangrove; Mempertahankan dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat setempat melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan terkait ekowisata dan pelayanannya dan kegiatan pemberdayaan yang dapat menunjang pengembangan kawasan ekowisata dan peningkatan ekonomi rumah tangga; dan Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui pemasangan papan/spanduk pada ruang-ruang publik dan di bandar udara.
2. *Weaknesess – Opportunities* (WO): Peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata; Peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang kawasan ekowisata; Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai ekowisata dan pelayanan terhadap para pengelola melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan; Pembuatan rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata mangrove; dan Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui berbagai media elektronik, cetak, dan ruang-ruang publik.
3. *Strenghts – Threats* (ST): Pelarangan dan penegakan hukum terhadap kegiatan alih fungsi lahan/perluasan utamanya menjadi tambak; Melakukan revitalisasi terhadap

tambak-tambak yang tidak produktif untuk mencapai target produksi dan menghentikan kegiatan perluasan tambak; Penerapan budidaya tambak dengan pola *Silviculture*; Memberikan intensif/kompensasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi dan restorasi hutan mangrove; Menerapkan pola penebangan kayu mangrove dengan sistem tebang pilih; Pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan dan untuk menciptakan alternatif pekerjaan lain yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga; dan Berperan serta dalam kegiatan-kegiatan layanan ekowisata mangrove guna meningkatkan ekonomi rumah tangga.

4. *Weaknesses – Threats* (WT): Peningkatan peran pemerintah dan ketegasan dalam menegakkan aturan pelarangan terhadap kegiatan perusakan dan alih fungsi lahan/perluasan utamanya menjadi tambak; dan melatih keterampilan dan membuka peluang untuk pekerjaan alternatif (seperti pemandu wisata) bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson JR, Hardy EE, Roach JT, and Witmer RE (1976) A land use and land cover classification system for use with remote sensor data. U.S. *Geological Survey Professional Paper 964*, 28 p.
- Ardiansyah (2014) Membangun Mimpi Pengembangan Pariwisata Di Sulawesi Barat. <http://www.kompadansamandar.or.id/opini/604-membangun-mimpi-pengembangan-pariwisata-di-sulawesi-barat.html>. Di akses 19 April 2016.
- Chandra W (2014) Yuk, Berwisata ke Rumah Pohon Saluleang. <http://www.mongabay.co.id/2014/10/22/yuk-berwisata-ke-rumah-pohon-saluleang/>. Di Akses tanggal 19 April 2016
- Dahuri R (2003) *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Emch M and Peterson M (2006) Mangrove forest cover change in the Bangladesh Sundarbans from 1990-2000: A remote sensing approach. *Geocarto International 21*, 5-12
- English S, Wilkinson C, and Baker V (1997) *Survey Manual for Tropical Marine Resources*, 2nd Edition. Australian Institute of Marine Science, Townsville, pp 119-195.
- Frontier Madagascar (2005) Biddick K, Brown L F., Markham K, Mayhew EM, Robertson A, & Smith V (eds.) *A Field Manual for Survey Methods in Tropical Marine Ecosystems*. Frontier Madagascar Environmental Research Report 17. Society for Environmental Exploration, UK.
- Ghufran MHKK (2012) *Ekosistem mangrove: potensi, fungsi, dan pengelolaan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Giesen W, Wulffraat S, Zieren M, and Scholten L (2007) *Mangrove guidebook for Southeast Asia*. Food and Agriculture Organization, Bangkok.
- Laapo A, Fahrudin A, Bengen DG, dan Damar A (2010) Kajian Karakteristik dan Kesesuaian Kawasan Mangrove di Gugus Pulau Togean Taman Nasional Kepulauan Togean. *Forum Pascasarjana Vol. 33 No. 4: 251-261*.
- Lillesand TM, Kiefer RW, and Chipman J (2008) *Remote sensing and image interpretation, 6th edition*. Wiley, New York
- Malik A (2005) Strategi Pengembangan Wisata Bahari Kawasan Kepulauan Sembilan. *Tesis Magister*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Malik A (2008) *Penuntun Praktek Oseanografi*. Jurusan Geografi Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Malik A, Fensholt R, Mertz O (2015a) Economic valuation of mangroves for comparison with commercial aquaculture in South Sulawesi, Indonesia. *Forests 6*, 3028–3304.
- Malik A, Fensholt R, Mertz O (2015b) Mangrove exploitation effects on biodiversity and ecosystem services. *Biodiversity and Conservation 24: 3543-3557*.

- Malik A, Mertz O, Fensholt R (2017) Mangrove forest decline: Consequences for livelihoods and environment in South Sulawesi. *Regional Environmental Change* 17, 157-169.
- Manassrisuksi K, Weir M and Hussin YA (2001) Assessment of mangrove rehabilitation programmer using remote sensing and GIS: A case study of Amphur Khlung, Chantaburi Province, Eastern Thailand. *Conference paper at the 22nd Asian Conference on Remote Sensing 5 – 9 November 2001*, Singapore.
- Putra W (2014) Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Kuala Karang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, Vol. 2 No. 2*.
- Raffaelli D dan Hawkins S (1996) *Intertidal Ecology*. Chapman & Hall. London. 356 halaman.
- Rangkuti (2001) *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rutana FF (2011) Studi Kesesuaian Ekosistem Mangrove sebagai Obyek Ekowisata di Pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sawitri R, Bismark M, dan Karlina E (2013) Ekosistem Mangrove sebagai Obyek Wisata Alam di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* Vol. 10 No. 3: 297-314.
- Sevilla, Consuelo G. *et. al* (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.
- Tuwo A, Tresnati J, dan Parawansa BS (2009). Analisis Kelayakan Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kepulauan Tanakeke. *Jurnal Sains & Teknologi. Vol. 9 No. 3: 218-225*.
- Wahyuni PI, Ardhana IPG, dan Sunarta IN (2007) Evaluasi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Tahura Ngurah Rai. *Ecotrophic* 4 (1): 49-56.
- Wang Y, Bonyng G, Nugranad J, Traber M, Ngusaru A, Tobey J, Hale L, Bowen R, and Makota V (2003) Remote sensing of mangrove change along the Tanzania coast. *Marine Geodesy* 26: 35-48.
- Widowati S (2012) Kajian Potensi dan Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip dan Kriteria Ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi. *Tesis Magister*. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali.
- Yulianda F (2007) Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi. *Makalah Seminar Sains 21 Februari 2007*. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Zain Z (2014) Objek Wisata Hutan Bakau (Mangrove) Kota Mamuju, Sulawesi Barat. <http://kompadansamandar.blogspot.co.id/2014/05/objek-wisata-hutan-bakau-mangrove-kota.html>. Di Akses tanggal 19 April 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Penelitian (Strategi)

Produk penelitian yang berupa strategi yang dapat diterapkan guna mendukung pengembangan kawasan ekowisata mangrove Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

1. Terkait Konservasi Kawasan Ekowisata Mangrove:

- a. Mempertahankan dan senantiasa melestarikan kondisi vegetasi mangrove dan keanekaragaman satwa pada kawasan ekowisata;
- b. Menerapkan pola penebangan kayu mangrove dengan sistem tebang pilih;
- c. Penegakan aturan oleh aparat pemerintah terkait dan pelarangan terhadap kegiatan perusakan dan alih fungsi lahan/perluasan utamanya menjadi tambak;
- d. Melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak yang tidak produktif untuk mencapai target produksi dan menghentikan kegiatan perluasan tambak;
- e. Menerapkan sistem budidaya tambak dengan pola *Silviculture*; dan
- f. Memberikan intensif/kompensasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi dan restorasi hutan mangrove;

2. Terkait Wisata Mangrove:

- a. Meningkatkan fasilitas atraksi wisata mangrove guna menarik pengunjung baik terkait wisata pendidikan (seperti laboratorium mangrove, ruang teater pendidikan, perpustakaan mangrove, museum mangrove, pusat data dan informasi mangrove dan kebun botani mangrove) maupun wisata mangrove (seperti pengembangan rute mangrove track yang sudah ada, area hotspot tempat singgah, jogging mangrove, penangkaran burung, menara pengamatan burung, pemancingan, dan outbound mangrove,
- b. Pembangunan fasilitas penunjang wisata seperti musholla, klinik kesehatan, pos keamanan dan perbaikan akses menuju area wisata (jalan dan penerangan), parkir dan toilet yang representatif, dan fasilitas air dan listrik yang lebih baik.
- c. Peningkatan promosi kawasan ekowisata mangrove melalui pemasangan papan/spanduk pada ruang-ruang publik dan di bandar udara serta melalui melalui berbagai media elektronik/cetak.
- d. Peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan kawasan ekowisata; dan
- e. Pembuatan rancangan/desain lanskap kawasan ekowisata mangrove.

3. Terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- a. Mempertahankan dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam menunjang pengembangan kawasan ekowisata.
- b. Pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan dan untuk menciptakan alternatif pekerjaan lain yang dapat menunjang kehidupan dan kesejahteraan rumah tangga masyarakat, seperti pemandu wisata, pembuatan souvenir, pembuatan produk hasil olahan buah mangrove, layanan warung makan/restauran yang lebih baik dan homestay bagi wisatawan.

Lampiran 2. Draft Artikel Ilmiah

Assessing of Mangrove Biodiversity for Ecotourism Area Development in West Sulawesi

Abdul Malik^{1*} Abdul Rahim² Uca Sideng¹ Jamaluddin Jumaddin¹

¹ Department of Geography, Universitas Negeri Makassar (UNM), Jl. Malengkeri Raya, Kampus UNM Parangtambung, Makassar, Indonesia 90224.

² Study Program of Economic Development, Universitas Negeri Makassar (UNM). Jl. Pendidikan Raya, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar, Indonesia.

* Corresponding author: E-mail: abdulmalik@unm.ac.id; Tel.: +62-411-880496, Fax: +62-411-880568.

Abstract

The biodiversity plays important role in performance and tourist attraction of mangrove ecotourism area. However, the threat to mangrove biodiversity such as mangrove wood cutting for fuelwood and conversion into aquaculture ponds has still occurred. Here, we investigated the mangrove composition, structure, and diversity in West Sulawesi. The mangroves of Bebanga village, Kalukku sub-District, West Sulawesi represent an ecotourism area that has not been subject to severe studies about the mangrove biodiversity for ecotourism area development. This mangrove area provides ecotourism activities such as mangrove tracking, mangrove learning and rehabilitation, fishing, and culinary for tourists. We implemented a line transect method covering five study sites for mangrove vegetation survey and used vegetation analysis equations to calculate mangrove density, frequency, coverage and Important Value Index (IVI). In addition, we used the Shannon-Wiener index for assessing the mangrove diversity. Seven species were found (*Avicennia marina*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*, *Sonneratia alba*, *Sonneratia caseolaris*, and *Xylocarpus granatum*). However, mangrove area was dominated by *Rhizophora mucronata* and most mangroves in seedling growth level. In addition, relative density, frequency and coverage of mangroves at all regeneration were below 56% and found at moderate diversity. This evidence demonstrates the biodiversity of mangrove in degradation status. Therefore, improving mangroves conserve and restore should be considered. In addition, selection of woodcutting in mangrove use and aquaculture revitalization to halt the expansion of new ponds becomes a great policy for maintaining and improving the mangrove biodiversity for supporting the ecotourism area development.

Keywords: mangrove, biodiversity, ecotourism, West Sulawesi.

1. Introduction

Ecotourism is a responsible travel to natural areas that have potentials in the conservation of the environment, supporting and enhancing education, and improving the

welfare of the local people and alleviating poverty (Wood, 2002). Ecotourism is truly interesting by the tourists in the recent decades due to they can learn about the environment, culture, and contribute to conservation and preserving biodiversity, and economic development goals in destination regions, rather than just having a good time (Mondino and Beery, 2018). Furthermore, it can support for the realization of the United Nations Millenium Development Goals (UN-MDGs) (Saarinen and Rogersion, 2013).

The biodiversity is important to human welfare due to it have provides the goods and services (around 40% of the global economy is based on the biological products and process). However, the loss of biodiversity become increasingly rate than that of natural extinction due to anthropogenic activities such as unsustainable harvesting of natural resources, land conversion development and the introduction of invasive species (Christ et al. 2003).

Mangroves are one of the important coastal ecosystems that provide variety ecotourism services (MA, 2005; Malik et al. 2015a, Malik et al. 2015b). Mangrove ecotourism areas have grown and contributed to the tourism industry in Indonesia and other Southeast Asian countries (Ly and Bauer, 2014). However, the high pressure on mangrove forests in ecotourism area for many purposes such as woodcutting and aquaculture development has been caused degraded and deforested and has serious consequences to biodiversity loss (Malik et al. 2015b; Carugati et al. 2018)

In West Sulawesi, mangroves use as an ecotourism area has been going since 2013 in Bebanga village Kalukku sub-district Mamuju district. It was pioneered by Mr. Munajib assisted by other local people (Ditpolair Polda Sulbar, 2017). This ecotourism area has been visited by tourists who want to enjoy the beauty of the mangrove and the beach (Zain, 2014). However, the mangrove woodcutting for consumption, house materials and expansion of aquaculture pond activities are still happening and caused mangrove degradation and deforestation and subsequently threat to biodiversity (Malik et al .2018). Malik et al. (2015b) demonstrated mangrove degradation and deforestation often change the composition, structure, and diversity of mangrove forest species in Sulawesi.

The relationships between biodiversity and ecosystem services such as ecotourism are often positive (Harrison et al. 2014; Cardinale et al. 2006). The biodiversity plays an important role as a tourist attraction, resources for consumption goods, natural component to support environmental survival and aesthetics (Hakim, 2017). In addition, Hakim (2017) revealed the conservation and managing the biodiversity to increase destination

performance of ecotourism area is important, especially in terms of destination sustainability and competitiveness. In the meanwhile, there is a need for assessment of mangrove biodiversity in tourism studies that rarely used in decision-making by policymakers related to the sustainability and competitiveness of tourism destinations in Indonesia and Southeast Asian countries (Hakim, 2017). It is therefore important to accurately assess the loss of mangrove biodiversity. Here we investigate species of mangrove composition, structure, and diversity for continued development of mangrove ecotourism area in West Sulawesi.

2. Study Area

This study was conducted in mangrove ecotourism area of Bebanga Village, Kalukku Sub-District, Mamuju District, West Sulawesi Province. The study area is located at latitude $2^{\circ}35'7.88''$ - $2^{\circ}44'8.62''$ and longitude $118^{\circ}58'32.04''$ - $119^{\circ}3'15.74''$ (Figure 1). The location is about 23 km from the capital of West Sulawesi, Mamuju.

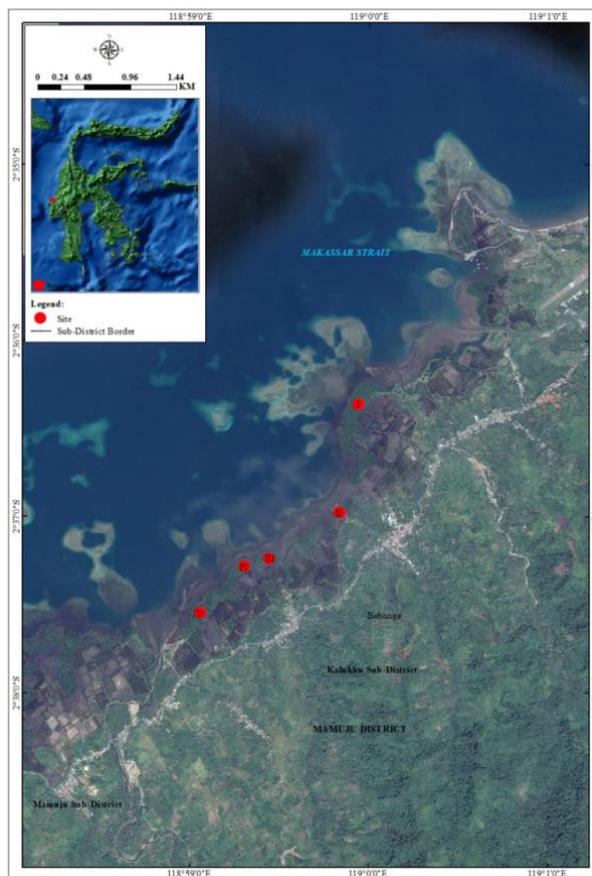


Figure 1. Study Area: Bebanga village, Kalukku sub-district, Mamuju District and transect locations at five sites

The village covers 88.42 km² and consists of 17 sub-villages. The area borders Makassar Strait to the north, Mamuju sub-district to the south and west, and Sinyonyoi village to the south and east. The population was 8,174 people in 2016 with a population density of 92 people per km² (BPS Kabupaten Mamuju, 2017). Most of the population are living in this coastal area and working as fishermen and farmers (BPS Kabupaten Mamuju, 2017).

In this study, five sampling sites were selected (Figure 1). The sampling sites were chosen due to as appropriate case study as it contains a potential area for mangrove ecotourism, that remains unwell manage and develop, and also under considerable threat to degradation and deforestation.

3. Materials and Methods

Data collection

Data on mangrove structure and diversity were collected in July 2018 using a line-transect method from the seaward edge to the landward margin with transect length depending on the thickness of the mangrove patch (English et al. 1997; Malik et al. 2015b). Transect measurements were conducted at five sites (Figure 1). For each transect, we established 3 terraced plots of 10 m x 10 m for tree level, 5 m x 5 m for sapling level, and 2 m x 2 m for seedling level using measuring tape and plastic ropes and marked the position using Global Positioning System (GPS) (English et al. 1997; Malik et al. 2015b). The distance between plots was around 30 m depending on the specific vegetation characteristics and the landscape (Malik et al, 2015b). In addition, we recorded the species name with reference to book for identifying mangrove species and individual number of mangrove trees, saplings and seedlings inside each plot using a tally counter and measured all trees with stem diameter >5 cm and recorded diameter at breast height (DBH) 1.3 m above soil surface or 30 cm above the highest prop root for *Rhizophora* spp. (Malik et al. 2015b).

Data analysis

Density of species (D), Relative density of species (RD), Frequency of species (F), Relative frequency of species (FR), and coverage of species (C) and Relative coverage of (RC) was calculated by the formula 1 - 7: (Malik et al. 2015b)

$$D_i = \frac{n_i}{A} \quad (1), \text{ and } RD_i = \frac{n_i}{\sum n} \times 100 \% \quad (2)$$

where: D_i : density of species i (individual/m²)
 RD_i : relative density of species i (%)
 n_i : number of counts per species i
 Σn : total number of counts for all species
 A : total area of the sample observed (m²)

$$F_i = \frac{P_i}{\Sigma p} \quad (3), \text{ and } FR_i = \frac{F_i}{\Sigma F} \times 100 \% \quad (4)$$

where: F_i : frequency of species i
 RF_i : relative frequency of species i (%)
 p_i : number of plots where species i occurs
 ΣF : total number of occurrences for all species
 Σp : total number of plots observed

$$C_i = \frac{BA}{A} \quad (5), \text{ and } RC_i = \frac{C_i}{\Sigma C} \times 100 \% \quad (7)$$

where: C_i : areal coverage for species i
 BA : $\pi DBH^2 / 4$, where BA = Basal Area (cm) and
 DBH = Diameter at Breast Height (cm)
 A : total area of plot (m²)
 ΣC : total area coverage for all species
 RC_i : relative coverage of species i (%)

To express the dominance level of individual mangrove species, the Importance Value Index (IVI) was calculated by the sum of Relative Density, Relative Frequency, and Relative Coverage (formula 8): (Malik dkk. 2015b)

$$IVI = RD + RF + RC \quad (8); \text{ the range of } IVI = 0 - 300$$

The diversity of mangrove species (H') was calculated using formula 9 with reference to the Index of Shannon-Wiener: (Malik dkk. 2015b)

$$H = - \sum P_i \ln (P_i) ; P_i = (n_i/N) \quad (9)$$

The range of $H = 0 - >3$ (< 1 = low diversity; $1 < H' \leq 3$ = moderate diversity; $H' > 3$ = high diversity), where n_i is number of individual species i and N is total number of species.

4. Results

Mangrove Composition and Structure

A total of 2750 standing live mangrove trees recorded at the five sites, containing mature trees 851, saplings 747 and seedlings 1152 (Table 2). Seven species were identified,

including *Avicennia marina* (Am), *Bruguiera gymnorrhiza* (Bg), *Rhizophora mucronata* (Rm), *Rhizophora stylosa* (Rs), *Sonneratia alba* (Sa), *Sonneratia caseolaris* (Sc), and *Xylocarpus granatum* (Xg). These species belongs to four families, including *Avicenniaceae*, *Rhizophoraceae*, *Sonneratiaceae*, and *Meliaceae*. In each site, number of species between four and five, but *Bruguiera gymnorrhiza*, *Rhizophora mucronata*, and *Rhizophora stylosa* were found at all sites (Table 1).

Table 1. List of mangrove species identified

Family name	Species name	Local name	Sampling Site				
			I	II	III	IV	V
<i>Avicenniaceae</i>	<i>Avicennia marina</i>	<i>Pajapi</i>	✓	-	-	✓	✓
<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>	<i>Tanjang</i>	✓	✓	✓	✓	-
<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Rhizophora mucronata</i>	<i>Pangkang</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Rhizophora stylosa</i>	<i>Pangkang</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Sonneratiaceae</i>	<i>Sonneratia alba</i>	<i>Padada</i>	✓	✓	-	✓	✓
<i>Sonneratiaceae</i>	<i>Sonneratia caseolaris</i>	<i>Padada</i>	-	-	✓	-	-
<i>Meliaceae</i>	<i>Xylocarpus granatum</i>	<i>Buli cella</i>	-	-	✓	-	-
Number of Species			5	4	5	5	4

✓ Present, - Not present

The density of *Rhizophora mucronata* was the highest at all growth levels of mangrove, followed by *Sonneratia alba* for mature trees, whereas saplings and seedlings, *Rhizophora stylosa* was the highest. The frequency of mangrove was dominated by *Rhizophora mucronata* and *Rhizophora stylosa* at all growth stages, followed by *Bruguiera gymnorrhiza* and *Sonneratia alba*. The coverage of mangrove was dominated by *Bruguiera gymnorrhiza*, followed by *Rhizophora mucronata*. Furthermore, the Important Value Index (IVI) shown *Rhizophora mucronata* was the dominant species at all growth levels, followed by *Sonneratia alba* for mature species, and *Rhizophora stylosa* for saplings and seedlings (Table 2).

Table 2. Important Value Index (IVI) of mangrove species

Growth level	Species	ni	D	RD	F	RF	C	RC	IVI
Mature tree	Am	36	0.02	4	3	13	3.52	8	26
	Bg	53	0.04	6	4	17	8.75	21	44
	Rm	480	0.32	56	5	22	6.53	15	94
	Rs	102	0.07	12	5	22	2.35	6	39
	Sa	118	0.08	14	4	17	8	19	50
	Sc	52	0.03	6	1	4	7.97	19	29
	Xg	10	0.01	1	1	4	5.06	12	18
Total		851	0.57	100	23	100	42	100	300
Sapling	Am	47	0.03	6	3	13	-	-	19
	Bg	83	0.06	11	4	17	-	-	29
	Rm	313	0.21	42	5	22	-	-	64
	Rs	162	0.11	22	5	22	-	-	43
	Sa	79	0.05	11	4	17	-	-	28
	Sc	34	0.02	5	1	4	-	-	9
	Xg	29	0.02	4	1	4	-	-	8
Total		747	0.50	100	23	100	-	-	200
Seedling	Am	88	0.06	8	3	13	-	-	21
	Bg	116	0.08	10	4	17	-	-	27
	Rm	512	0.34	44	5	22	-	-	66
	Rs	244	0.16	21	5	22	-	-	43
	Sa	124	0.08	11	4	17	-	-	28
	Sc	42	0.03	4	1	4	-	-	8
	Xg	26	0.02	2	1	4	-	-	7
Total		1152	0.77	100	23	100	-	-	200

Am: *Avicennia marina*, Bg: *Bruguiera gymnorrhiza*, Rm: *Rhizophora mucronata*, Rs: *Rhizophora stylosa*, Sa: *Sonneratia alba*, Sc: *Sonneratia caseolaris*, Xg: *Xylocarpus granatum* (Xg). D: density, RD: relative density, F: frequency, RF: relative frequency, C: coverage, RC: relative coverage, IVI: Important Value Index.

Mangrove Diversity

The highest index value of mangrove diversity was found at sapling level (1.62), followed by seedling (1.56) (Figure 2). The mangrove diversity at all growth levels were moderate category.

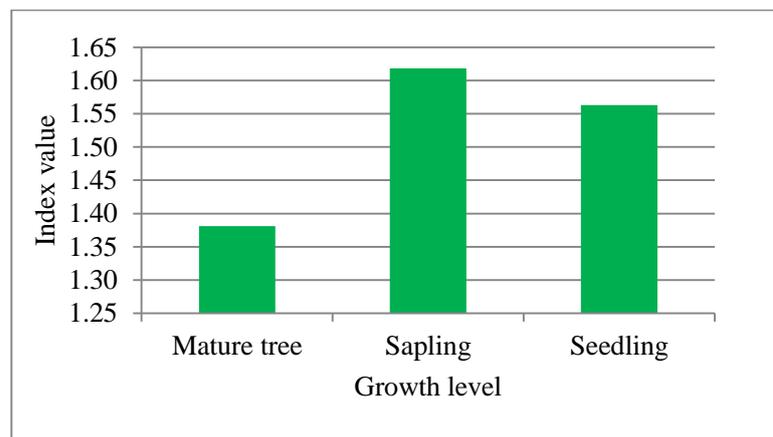


Figure 2. Diversity index (H') of mangrove

5. Discussion

This study presents an assessment of mangrove biodiversity from mangrove ecotourism area of Bebanga Village, West Sulawesi including composition, structure, and diversity. We found that the composition of true mangrove species contained 26% and 16% of the total mangrove species in Sulawesi Island (27 species) and Indonesia (43 species) (Kusmana, 1993). In early 1990s Nurdin (1994) recorded that the western coast of South Sulawesi contained 12 true mangrove species (In 1994 coast of Mamuju District was included in the administrative area of South Sulawesi province, but since 2005 was included in West Sulawesi). It is demonstrating that there have been declines in the mangrove species number over the last two decades. The species composition reduction corresponds to similar studies in South Sulawesi as reported by Malik et al. (2015b) and Nurkin (1994).

In addition, the disturbance of this forest has been causing instability of the ecosystem where one of the species (*Rhizophora mucronata*) in all level regeneration become dominant, almost 70% of mangrove composition dominated by sapling and seedling (Table 2), and diversity of mangrove in moderate category (Figure 2).

Furthermore, relative density, frequency, and coverage of mangroves no more than 56%, representing there are many areas of mangrove in degradation status (Table 2).

Overcutting for timber and fuelwood and clearing of mangrove for aquaculture ponds has become the driving force behind degradation and deforestation of mangrove in this area. From 2013-2018, mangroves decreased from 95 ha to 82 ha, whereas aquaculture ponds increased from 205 ha to 212 ha and have taken places along the coast of this area (Malik et al. 2018). When mangrove vegetation is removed, it has a consequence to biodiversity loss and subsequently impacts to performances (such as loss of mangrove panorama and associated fauna) and tourist attractions (such as watching and hearing birds chirping) in a mangrove ecotourism area. Since ecotourism depend on biodiversity, the loss of biodiversity can suffers not only to the communities who have high dependent on this industry, but also tourism industry, as well as on other the ecotourism-related businesses such as transportation, hotels and accommodations, food and restaurants, banking, and various leisure and entertainments services (Habibullah et al. 2016).

Thus, in order to reduce the loss of biodiversity for the continued development of the ecotourism industry, the preservation of intact mangrove and restoration of disturbed mangrove are important actions. Malik et al. (2015a) report that in Sulawesi Island, aquaculture businesses frequently abandon ponds as soon as revenue decreases (often after only 5 years). Therefore, the restoration of abandoned ponds by re-planting mangrove with a variety of species should be considered as a viable option for improving mangrove biodiversity and development of ecotourism area. Brown et al (2014) demonstrated that mangrove restoration project for 43 ha of abandoned ponds have been successful to increase level of mangrove biodiversity in Tanakeke Island of South Sulawesi (averaging 2171 plants/ha and 3 species within 32 months after restoration in 2010) that have consequence to the community livelihoods and mangrove ecosystem services. In addition, conserving biodiversity cannot be separated from major social and economic development issues. Therefore, a balance between mangrove consumption and capacity of mangrove resources through selection cutting on mangrove harvesting, and aquaculture revitalization program to prevent expansion of new ponds by clearing mangrove area should be considered.

This study presents an assessment of mangrove biodiversity from mangrove ecotourism area of Bebanga Village, West Sulawesi including composition, structure and diversity. We found that composition of true mangrove species contained 26% and 16% of

the total mangrove species in Sulawesi Island (27 species) and Indonesia (43 species) (Kusmana, 1993). In early 1990s Nurdin (1994) recorded that the western coast of South Sulawesi contained 12 true mangrove species (In 1994 coast of Mamuju District was included in administrative area of South Sulawesi province, but since 2005 was included in West Sulawesi). It is demonstrating that there have been declines in the mangrove species number over the last two decades. The species composition reduction corresponds to similar studies in South Sulawesi as reported by Malik et al. (2015b) and Nurkin (1994).

In addition, the disturbance of this forest have been causing instability of the ecosystem where one of the species in all level regeneration (*Rhizophora mucronata*) become dominant, almost 70% of mangrove composition dominated by sapling and seedling (Table 2), and diversity of mangrove in moderate category (Figure 2). Furthermore, relative density, frequency and coverage of mangroves no more than 56%, representing there are many areas of mangrove in degradation status (Table 2).

Over cutting for timber and fuel wood and clearing of mangrove for aquaculture ponds has become the driving force behind degradation and deforestation of mangrove in this area. From 2013-2018, mangroves decreased from 95 ha to 82 ha, whereas aquaculture ponds increased from 205 ha to 212 ha and have taken places along the coast of this area (Malik et al. 2018). When mangrove vegetation is removed, it is have consequence to biodiversity and subsequently impact to performances (such as loss of mangrove panorama and associated fauna) and tourist attractions (such as watching and hearing bird chirping) in a mangrove ecotourism area.

Thus, in order to reduce loss of biodiversity as an ecotourism development strategy, preservation of intact mangrove and restoration of disturbed mangrove are important actions. Malik et al. (2015a) report that in Sulawesi Island, aquaculture businesses frequently abandon ponds as soon as revenue decreases (often after only 5 years). Therefore, the restoration of abandoned ponds by re-planting mangrove with species variety should be considered as a viable option for improving of mangrove biodiversity and development of ecotourism area. Brown et al (2014) demonstrated that mangrove restoration project for 43 ha of abandoned ponds have been success to increase level of mangrove biodiversity in Tanakeke Island of South Sulawesi (averaging 2171 plants/ha and 3 species within 32 months after restoration in 2010) that have consequence to the community livelihoods and mangrove ecosystem services. In addition, conserving biodiversity cannot be separated from major social and economic development issues.

Therefore, a balance between mangrove consumption and capacity of mangrove resources through selection cutting on mangrove harvesting, and aquaculture revitalization program to prevent expansion of new ponds by clearing mangrove area should be considered.

6. Conclusions

The results presented in this study demonstrate the assessment of mangrove biodiversity for ecotourism development in West Sulawesi, Indonesia. Mangrove use for wood cutting and aquaculture development become driver of mangrove biodiversity decreased and impact to performance and tourist attraction of ecotourism area. More attention from stakeholders and decision-makers is needed to conserve and restore mangrove areas lost to over-exploitation in this area. It is of high priority to maintain and possibly increase the mangrove biodiversity and the ecotourism development strategy.

Acknowledgments

We would like to thank the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia for their financial support through Penelitian Unggulan Terapan Perguruan Tinggi (PTUPT) scheme (Project contract number: 127/UN36.9/PL/2018). We also thank the Research Institute and Department of Geography Universitas Negeri Makassar, and the Governments of West Sulawesi and Mamuju District for their support of this research.

References

- BPS Kabupaten Mamuju (2017) *Kabupaten Mamuju dalam angka 2017*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju. <https://mamujukab.bps.go.id/publication/2017/08/11/e9d44a83ad3f858919154d40/kabupaten-mamuju-dalam-angka-2017.html>.
- Brown, B., Fadillah, R., Nurdin, Y., Soulsby, I., Ahmad, R., 2014. Case study: Community based ecological mangrove rehabilitation (CBEMR) in Indonesia. *SAPIENS* 7: 1-12.
- Cardinale B J, Srivastava DS, Duffy JE, Wright JP, Downing AL, Sankaran M, & Jouseau C (2006) Effects of biodiversity on the functioning of trophic groups and ecosystems. *Nature*, 443 (7114), 989.
- Carugati L, Gatto B, Rastelli E, Martire ML, Coral C, Greco S, & Danovaro R (2018) Impact of mangrove forests degradation on biodiversity and ecosystem functioning. *Scientific Reports*, 8(1), 13298.

Ditpolair Polda Sulbar (2017) Wisata alam mangrove Saluleang di Mamuju. <http://www.ditpolairpoldasulbar.com/2017/07/22/wisata-alam-hutan-magrove-saluleang-di-mamuju/>. Accessed on 6 September 2018

English, S., Wilkinson, C., and Baker, V. (1997). *Survey Manual for Tropical Marine Resources*, 2nd Edition. Australian Institute of Marine Science, Townsville, pp 119-195.

Hakim L (2017) Managing biodiversity for a competitive ecotourism industry in tropical developing countries: New opportunities in biological fields. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1908, No. 1, p. 030008). AIP Publishing.

Harrison PA, Berry PM, Simpson G, Haslett JR, Blicharska M, Bucur M, Dunford R, Egoh B, Garcia-Liorente M, Geamana N, Geertsema W, Lommelen E, Meiresonne L, and Turkelboom F (2014) Linkages Between Biodiversity Attributes and Ecosystem Services: A Systematic Review. *Ecosystem Services*, 9:191-203.

Ly TP and Bauer T (2014) Ecotourism in mainland Southeast Asia: Theory and practice. *Tourism, Leisure and Global Change*, 1(1), 61-80.

Millennium Ecosystem Assessment (MA) (2005) *Ecosystem and human well-being: Synthesis*. Island Press, Washington DC. Available in: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>. Accessed on 6 September 2018

Malik A, Fensholt R, Mertz O (2015a) Economic valuation of mangroves for comparison with commercial aquaculture in South Sulawesi, Indonesia. *Forests* 6, 3028–3304.

Malik A, Fensholt R, Mertz O (2015b) Mangrove exploitation effects on biodiversity and ecosystem services. *Biodiversity and Conservation* 24: 3543-3557.

Malik A, Rahim A, Sideng U (2018) Strategi dan desain pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. *Laporan Akhir Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)*, Universitas Negeri Makassar.

Mondino E and Beery T (2018) Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy. *Journal of Ecotourism*, 1-15.

Nurkin B (1994) Degradation of Mangrove Forests in South Sulawesi, Indonesia. *Hydrobiologia* 285: 271-276.

Saarinen J, Rogerson C, Manwa H (2013) *Tourism, Development and Millennium Development Goals*.

Wood, M. (2002). *Ecotourism: Principles, practices and policies for sustainability*. UNEP.

Zain Z (2014) Objek Wisata Hutan Bakau (Mangrove) Kota Mamuju, Sulawesi Barat. <http://kompadansamandar.blogspot.co.id/2014/05/objek-wisata-hutan-bakau-mangrove-kota.html>. Accessed on 19 April 2016.

Lampiran 3. Pemakalah/Presenter pada The 2nd Bali International Tourism Conference (BITC), Udayana University, Bali, 8 – 10 November 2018

Lampiran 4. Draft Buju Ajar

Draft **BUKU AJAR**

Geografi Pariwisata

Penulis:

**Abdul Malik ~ Abd. Rahim ~
Uca Sideng**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulisan Buku Ajar Geografi Pariwisata dapat diselesaikan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memahami tentang kajian-kajian geografi pariwisata dan khususnya membantu para mahasiswa yang memprogram mata kuliah Geografi Industri dan Pariwisata. Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, yang mana setiap bab-nya mengulas secara detail dan padat dari tiap-tiap pokok bahasannya sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak yang bersifat membangun guna penyempurnaannya ke depan senantiasa ditunggu.

Terima Kasih.

Makassar, 12 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR DAN KONSEP PARIWISATA	15
III. PENGGOLONGAN USAHA INDUSTRI PARIWISATA	34
IV. PERLENGKAPAN INDUSTRI PARIWISATA	41
V. PERWILAYAHAN PARIWISATA DI INDONESIA	54
VI. PERENCANAAN PARIWISATA	62
VII. KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN NASIONAL	75
VIII. EKOWISATA (ECOTOURISM)	85
IX. WISATA BAHARI (MARINE TOURISM)	97
DAFTAR PUSTAKA	108

**BAB
1****PENDAHULUAN****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui sejarah kepariwisataan, batasan geografi pariwisata, pengertian dan istilah pariwisata, serta organisasi-organisasi pariwisata.

1.1. Sejarah Perjalanan Manusia

Perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain telah dilakukan oleh manusia kira-kira pada tahun 4000 SM oleh Bangsa Sumeria. Perjalanan ini juga merupakan awal dimulainya suatu perjalanan untuk misi perdagangan. Bangsa Sumeria waktu itu sudah menggunakan uang dalam transaksi perdagangan yang mereka lakukan. Selain itu, Marcopolo dianggap orang pertama sebagai traveller, karena dia telah menjelajahi perjalanan dari benua Eropa ke Tiongkok, Cina dan kembali ke Venesia pada tahun 1254 hingga 1374. Selanjutnya pada tahun 1324, jejak Marcopolo oleh Ibnu Batuta yang dikenal sebagai *The First Traveler of Islam*. Ibnu Batuta pada usia 22 tahun telah melakukan perjalanan seorang diri yang umumnya ditempuh dengan berjalan kaki dari Afrika Utara menuju Mekkah dan Madinah dengan jarak tempuh kurang lebih 79.000 mil.

1.2. Travel Agen Pertama Di Dunia

Permulaan abad ke XIX ditandai dengan banyaknya kemajuan dalam bidang transportasi baik darat laut maupun udara. Dengan kemajuan ini maka semakin banyak orang yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, dari negara satu ke negara yang lain, bahkan dari benua satu ke benua lain.

Thomas Cook yang dilahirkan tanggal 22 November 1818, Melbourne, Debishre (Inggris), dianggap sebagai orang pertama yang

menjalankan profesi Travel Agen sebagai salah satu usaha seperti yang kita kenal sekarang.

1.3. Permulaan Angkutan Wisata

Kita mengenal istilah *choach* untuk angkutan wisata yang sering digunakan untuk transfer dari dan ke airport untuk suatu pariwisata keluar. Kata *choach* sebenarnya berasal dari nama alat angkut di Honggaria, yang disebut *Kocs*. Pada masa itu adalah suatu gerobak tertutup dengan 4 roda. *Kocs* pertama kali diperkenalkan pada abad ke 15.

1.4. Pariwisata Sebagai Disiplin Ilmu.

Kepariwisataan sebagai ilmu tersendiri pertama kali diajarkan di kota Dubrounik (Yugoslavia) tahun 1920. Disini pernah didirikan sebuah Lembaga Ilmiah Kepariwisataan, tetapi lembaga tersebut kemudian dibubarkan karena kurang berhubungan dengan dunia luar (universitas). Tahun 1930 di Swiss, ilmu kepariwisataan telah diajarkan sebagai mata pelajaran berbagai sekolah tinggi dagang. Dua universitas di Swiss yang banyak mengembangkan kepariwisataan sebagai cabang ilmu pengetahuan yakni Bern University dan St. Gallen University mulai tahun 1914. Bern University membentuk *Tourist Research Institute* untuk menampung segala permasalahan yang terjadi. Yang banyak berjasa dalam mengembangkan kepariwisataan adalah Prof. W Hanzieker, yang pada waktu itu menjabat dekan di St. Gallen University, dan rekannya, yaitu K. Krapf di Bern University. Pada tahun 1962, dalam kongres yang diadakan di Madrid Spanyol, setelah memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Aiest (*Association D'Experst Scientifiquis Du Tourisme*) dua organisasi lainnya, yaitu *Alliance Internationale Tourisme (AIT)* dan IUOTO secara resmi Mengakui bahwa Ilmu Kepariwisataan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Aiest berkedudukan di Bern Swiss.

1.5. Pengertian dan Istilah-Istilah dalam Pariwisata

Di dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keparwisataan dibutuhkan penyebarluasan berbagai pengertian yang berhubungan dengan segala macam bentuk peristilahan yang sering digunakan dalam dunia kepariwisataan. Hal tersebut sangat penting sebagai sarana untuk menambah wawasan. Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata tadi antara lain adalah pengertian mengenai apa itu pariwisata dan apa saja yang dibutuhkan para wisatawan. Hal ini penting mengingat bagaimanapun juga dengan semakin berkembangnya pariwisata nasional maka masyarakat akan bersinggungan dengan dunia pariwisata dan sekaligus mendapat pelajaran tentang manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung.

Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponennya terdiri dari :

Pari : penuh, lengkap, berkeliling

wis (man) : rumah, properti, kampung, komunitas

ata : pergi terus menerus, mengembara (*roaming about*)

yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti : pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus.

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya yakni karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yakni sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang, atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu.

Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.

Di Indonesia istilah pariwisata baru dimulai pada tahun 1960-an. Istilah pariwisata diperoleh dari budayawan intelektual atas permintaan Presiden Sukarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua DTI (Dewan Tourisme Indonesia) di tahun 1960-an. Secara terpisah dua orang budayawan Indonesia waktu itu dimohon pertimbangannya, yaitu Prof. Mr. Moh. Yamin dan Prof. Dr. Prijono, yang memberi istilah pariwisata untuk mengganti istilah *tourism*, atau *travel*, yang konotasinya bisa terkait rasa *pleasure*, *excitement*, *adventure* dan sejenisnya.

Wisatawan

Seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (*tourist*), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong (*excursionist*). IUOTO (*The International Union of Official Travel Organization*) menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum:

Pengunjung (*visitor*), yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

Jadi ada dua kategori mengenai sebutan pengunjung, yakni:

Wisatawan (*tourist*) dan Pelancong (*excursionist*).

Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara, sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi:

Pesiar (*leasure*), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga.

Hubungan dagang, sanak saudara, handai taulan, konferensi, misi, dan sebagainya.

Pelancong (*excursionist*) adalah pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Paspor dan Visa

Sebelum melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke suatu tempat atau negara lain, seorang wisatawan harus terlebih dahulu mempersiapkan paspor dan visa.

Paspor adalah suatu keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang wisatawan warga negara yang akan mengadakan perjalanan keluar negeri yang pembuatannya diurus oleh kantor migrasi di negara yang bersangkutan.

Visa adalah surat keterangan ijin tinggal di suatu negara yang akan dituju oleh wisatawan. Surat keterangan itu diperoleh dari Kantor Kedutaan Besar suatu negara yang menjadi tujuan wisata.

1.6. Batasan Geografi Pariwisata.

Yang dimaksud dengan geografi pariwisata adalah geografi yang berhubungan erat dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata banyak sekali seginya di mana semua kegiatan tersebut bisa disebut industri pariwisata termasuk di dalamnya perhotelan, restoran, toko cenderamata, transportasi biro jasa perjalanan tempat tempat hiburan, obyek wisata atraksi budaya dan lain lain. Segi geografi umum yang perlu diketahui wisatawan antara lain iklim, flora, fauna, keindahan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan darat, laut dan udara, dan sebagainya.

Peranan geografi pariwisata dalam menunjang aktifitas pariwisata dapat diterangkan sebagai berikut: wisatawan A yang berasal dari Jepang ingin berlibur ke pulau Morotai. Sebelum berangkat pertama-tama harus mendapatkan informasi yang tepat tentang pulau Morotai, tentang biaya pesawat ke Indonesia, tentang transportasi Indonesia, tentang akomodasi, peraturan bea cukai, dan sebagainya. Wisatawan itu sebelumnya harus mengetahui apakah boleh langsung ke Morotai atau harus singgah ke Jakarta terlebih dahulu, bagaimana dari Jakarta

ke Morotai, kalau sudah tiba di Indonesia bagaimana masalah makan, masalah hiburan, masalah mata uang dan banyak lagi persoalan yang harus di ketahui.

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut maka diperlukan pengetahuan tentang geografi pariwisata. Orang Jepang itu tidak perlu mempelajari tentang geografi pariwisata Indonesia sebab dalam industri pariwisata ada lembaga yang menangani kebutuhan pariwisata, seperti pramuwisata, biro atau agen perjalanan.

Biro Perjalanan Wisata

Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan. Adapun kegiatan usaha biro perjalanan wisata, yaitu :

Menyusun dan menjual paket wisata luar negeri atas dasar permintaan.

Menyelenggarakan atau menjual pelayanan wisata (*cruise*).

Menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum atau atas dasar permintaan.

Menyelenggarakan pemanduan wisata.

Menyediakan fasilitas untuk wisatawan,

Menjual tiket/karcis sarana angkutan, dan lain-lain.

Mengadakan pemesanan sarana wisata.

Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agen Perjalanan Wisata

Agen Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan tiket (karcis), sarana angkutan lain-lain serta pemesanan sarana wisata.

Agen perjalanan wisata melakukan kegiatan sebagai berikut:

Menjual tiket, dan lain-lain

Mengadakan pemesanan sarana wisata

Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Biro perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata berada di bawah kepemimpinan *ASITA (Association of The Indonesia Tours and Travel*

Agencies). Cabang Biro Perjalanan Umum yakni satuan-satuan Usaha dari suatu biro Perjalanan Umum Wisata yang berkedudukan di tempat yang sama atau di tempat lain yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan perjalanan umum.

Industri dari kepariwisataan:

Pengangkutan

Akomodasi

Segala sesuatu yang menarik wisatawan untuk berkunjung sesuai sifat kegiatan perusahaan perjalanan dibagi menjadi :

Wholesaler adalah perusahaan perjalanan yang menyusun acara perjalanan wisata secara menyeluruh atau secara khusus menjual paket perjalanan wisata kepada *Retail Travel Agent*.

Retailer atau *Retailer Travel Agent* adalah biro perjalanan yang menjual paket perjalanan wisata secara langsung kepada wisatawan

Organisasi-Organisasi Pariwisata

Tingkat Internasional:

- *World Tourism Organization (WTO)*

Organisasi ini merupakan organisasi internasional antarpemerintah yang bertujuan mempromosikan dan memajukan kepariwisataan guna membantu pembangunan ekonomi, perdamaian, kemakmuran, keadilan, hak azasi manusia. Untuk melaksanakan misi tersebut WTO mengadakan kerjasama dan turut berpartisipasi dalam kegiatan *United Nations Development Programme (UNDP)* di mana WTO telah menjadi badan peserta dan pelaksana dari UNDP.

Keanggotaan WTO terdiri dari tiga macam:

Full Member; Badan pemerintah yang menangani kepariwisataan nasional.

Associate Member; Badan pemerintahan yang menangani kepariwisataan daerah.

Affiliate Member; Organisasi-organisasi non-komersial swasta maupun badan usaha swasta yang bergerak di bidang riset, promosi, media pariwisata. dan sebagainya.

- *Pacific Area Travel Association (PATA)*

PATA merupakan organisasi pariwisata di kawasan Samudera Pasifik yang bersifat non profit. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1951 di Hawaii dan berkantor pusat di San Fransisco Amerika Serikat. Untuk menjamin komunikasi yang efektif dengan kantor pusat dalam melaksanakan tugasnya di negara-negara anggota PATA di bentuk suatu badan yang dinamakan PATA CHAPTER.

- *ASEAN Permanent Commite on Tourism (ASEAN PCT)*

ASEAN PCT merupakan salah satu bagian dari perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara yang bergerak di bidang kepariwisataan yang dibentuk pada tahun 1969.

Tujuan ASEAN PCT adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang perjalanan dan pariwisata.

- *Asean Tourism Asosociation (ASEANTA)*

ASEANTA merupakan organisasi kepariwisataan negara-negara Asean yang dibentuk pada tahun 1971 berdasarkan konstitusi bersama, kantor pusatnya ada di Jakarta atau tempat lain di negara ASEAN, yang ditentukan oleh dewan pengurus.

Tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan kepariwisataan di wilayah ASEAN, membantu dan menawarkan bantuan kepada pemerintah dan badan internasional sehubungan dengan masalah masalah kepariwisataan, berusaha mewujudkan standar pelayanan dan fasilitas serta sebagai konsultan bagi anggota organisasi serta memberikan rekomendasi berkaitan dengan langkah yang akan diambil oleh anggota ASEAN.

- *Universal Federation Of Travel Agen Association (UFTAA)*

UFTAA adalah organisasi dari perhimpunan biro-biro perjalanan yang dibentuk pada tahun 1966. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada biro-biro perjalanan.

- *Internasional Air Transport Association (IATA)*

IATA adalah organisasi penerbangan yang menyelenggara-kan pengangkutan internasional yang menetapkan standar biaya, dokumen, frekuensi dan rute

penerbangan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1945 dengan kantor pusat di Genewa (Swiss). *Garuda Indonesia Airways (GIA)* menjadi anggota pada tahun 1952.

Tujuan IATA untuk memproduksi dan memajukan angkutan udara internasional, mengadakan kerjasama baik antara perusahaan penerbangan maupun dengan organisasi badan lainya.

- *International Congress and Convention Association.*

Organisasi ini mengkhususkan kegiatannya pada konferensi, konvensi dan pemasaran internasional. Kantor pusat organisasi ini berpusat di Amsterdam (Nederland). Tujuannya adalah mengorganisasikan dan mempromosikan penyelenggaraan konferensi, konvensi dan pameran internasional serta membantu pelayanannya.

- *ASEAN Hotel And Restaurant Association (AHRA)*

AHRA adalah perhimpunan hotel dan restoran di kawasan ASEAN. Kantor pusatnya ada di Singapura. Tujuannya AHRA adalah menerbitkan ASEAN Hotel dan Restoran directory, menyelenggarakan konferensi tahunan dalam merumuskan dan mencari pemecahan masalah masalah kepariwisataan di ASEAN.

Tingkat Nasional:

- Himpunan Perusahaan Perjalanan Indonesia (HPPI/ASITA)

HPPI ASITA didirikan pada tahun 1971 dan berkantor pusat di Jakarta. Maksud dan tujuan organisasi ini adalah untuk mengusahakan, memajukan dan melindungi kepentingan industri perjalanan pada umumnya dan kepentingan para anggota pada khususnya dan menyempurnakan pemberian berbagai jasa untuk kepentingan para wisatawan, penyempurnaan pelayanan angkutan darat, laut dan udara dan peningkatan mutu perjalanan sesuai dengan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pariwisata.

- Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI)

Organisasi ini didirikan pada tahun 1969 dan berkantor pusat di Jakarta. Maksud dan tujuan memajukan dan mengembangkan industri perhotelan, restoran dan catering. Dalam arti yang seluas-luasnya serta membantu

pemerintah dalam usaha mengembangkan perekonomian nasional umumnya dan industri pariwisata pada khususnya.

Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)

Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 November 1977 dan berkantor pusat di Jakarta. Fungsi dan kegiatannya adalah memberikan bimbingan pengarahan kepada anggota dan antara perhimpunan anggota lain dalam industri kepariwisataan. Juga meningkatkan produktifitas, kapasitas, kuantitas, dan kualitas taman rekreasi di Indonesia.

- Himpunan Penulis Pariwisata (HPP)

Organisasi ini didirikan pada tanggal 12 Maret 1977 dan berkantor pusat di Jakarta. Maksud dan tujuan HPP adalah untuk menghimpun para penulis pariwisata serta meningkatkan kepariwisataan Indonesia.

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)

Organisasi ini berkantor pusat di Jakarta. Maksud dan tujuan HPI adalah untuk menghimpun para pramuwisata dan melakukan pembinaan dan pengembangan pramuwisata.

Tujuan pembinaan dan pengembangan pramuwisata dimaksudkan untuk mengetahui tenaga pramuwisata sesuai dengan kebutuhan baik di dalam jumlah, golongan maupun penyebarannya. Dengan demikian diharapkan adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Juga untuk kesejahteraan material dan spiritual, agar tidak terjadi pembedaan antara pramuwisata yang menjadi karyawan perusahaan (*payroll guide*) dan yang bukan (*freelance guide*), dengan memperhatikan kepentingan masing-masing serta untuk mewujudkan keserasian dalam pelaksanaan kegiatan sesama pramuwisata.

**BAB
2****DASAR DAN KONSEP
PARIWISATA****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui dan memahami tentang dasar dan konsep pariwisata.

2.1. Pariwisata, Suatu Industri ?

Sering diperbincangkan umum apakah pariwisata merupakan sebuah industri seperti industri baja, industri mobil, elektronik dan sebagainya.

Sebagian sebab dari masalah bahwa industri umum diidentifikasi dengan *manufacturing* atau industri produksi Barang, bagi orang politik, industri dihubungkan dengan kuota ekspor/import tarif tenaga kerja dan pentingnya untuk ekonomi nasional. Masalah lain bahwa industri pariwisata bukan suatu industri, tetapi dalam realita, suatu kumpulan bisnis yang masing masing menjual jasa pariwisata. Masyarakat umum hanya mengenal beberapa komponen pariwisata, misalnya industri penerbangan, industri perhotelan, bisnis hiburan. Masing masing industri sering bertindak tidak sama sebagai suatu kelompok terintegrasi, dan sering mendapat pendapat yang bertentangan.

Adapula usaha yang melayani wisatawan maupun penduduk seperti restoran, rekreasi, perbelanjaan, dan lain-lain. Jasa yang dilakukan oleh orang orang pariwisata, adalah jasa orang orang yang berkunjung diluar kawasan dimana ia tinggal dan berkembang. Usaha usah tersebut saling terkait dengan ketergantungan. Pariwisata sekarang meliputi sektor swasta dan pemerintah swasta pada dasarnya mengurus sarana pariwisata dan pemerintah mengurus prasaranya.

2.2. Defenisi Industri Pariwisata

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan termasuk dalam pasal 1 (5) disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek pariwisata, usaha barang pariwisata, dan usaha lain yang

terkait dalam bidang tersebut. Defenisi yang lain adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan, produksi daln pemasaran produk suaut layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian (pelancong, musafir).

Dengan defenisi luas ini, timbul pertanyaan bahwa organisasi atau bisnis apakah yang termasuk industri pariwisata. Perlu diketahui bahwa pariwisata itu bukan industri homogen, tetapi heterogen dan banyak macamnya. Sebagai contoh sebagai indutri pendukung pariwisata (IPP), di samping industri perhotelan sebagai industri penting kepariwisataan. IPP terdiri dari puluhan macam toko pengecer, sektor transportasi lokal makanan minuman dan hiburan, perbelanjaan dan cenderamata, salon pangkas rambut, pijat dan lain-lain, yang besar volumenya, ukuran usaha konsumennya, keterkaitan deangan pariwisata adalah karena IPP memberi layanan langsung kepada konsumen (wisatawan).

2.3. Siapakah Wisatawan?

Pariwisata merupakan fenomena multidimensional, menimbulkan citra petualangan, romantik dengan tempat tempat eksotik, dan juga meliputi relita keduniaan seperti bisnis, kesehatan dan lian lain. Kata pariwisata sering menonjolkan bidang perjalanan dan juga pertumbuhan meningkat dari orang orang yang melakukan perjalanan. Biasanya di sebut turis/wisatawan. Sebetulnya pariwisata meliputi hal hal dari satu segmen. Maka dari itu memiliki arti yang berbeda dari orang yang berbeda pula.

Wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang bukan penduduk indonesia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara ke wilayah geografis indonesia untuk keperluan apapun kecuali mencari penghasilan/nafkah. Maksud kunjungan ersebut antara lain untuk berlibur, bisnis menghadiri pertemuan, mengunjungi kerabat atau teman.

Di dunia kepariwisataan dirasakan perlu adanya defenisi bersama untuk dapat membanding bandingkan tingkat pengembangan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam melakukan studi pemasaran yang mendasari berbagai jenis studi penegemabgnan destinasi. Kalau kita dalam studi menggunakan data negara lain dengan adanya defenisi bersama, kita dapat menafsirkan data tersebut.

Untuk memperoleh definisi bersama itu diselenggarakan Konferensi Roma 1963. oleh *United Nation Conference and International Travel and Tourism* di rekomendasikan definisi : setiap orang yang mengunjungi negara bukan dimana ia bermukim, bagi setiap keperluan yang bukan untuk mendapatkan penghasilan, di sebut visitor (pengunjung). Terdiri dari dua kelompok traveller (orang yang melakukan perjalanan), yaitu :

- a. *Tourist* (wisatawan), pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara lebih dari 24 jam motivasi kunjungan dapat digolongkan untuk :
 - Liburan (rekreasi, kesehatan studi, agama atau olahraga)
 - Bisnis
 - Keluarga
 - Seminar atau konferensi, dan lain-lain.
- b. *Excursionist* (pelancong), pengunjung sementara yang melawat kurang dari 24 jam. Di daerah tujuan kunjungannya dan tidak menginap, termasuk penumpang kapal pesiar.

Defenisi rujukan arti kata visitor, tourist dan excersionist, itu digunakan di seleuruh dunia. Terlampir dalam bagan WTO dengan penjelasan dan rekomendasi Roma 1963 dengan eneyempurnaanya. Defenisi ini untuk *keperluan statistik*. Defenisi bersama tidak selalu dilaksanakan di erbatasan negara. Contoh :

- Orang Indonesia bermukim di negara asing dan kembali ke Indonesia sementara waktu (dengan memakai paspor indonesia/tidak tercatat sebagai wisatawan).
- Dalam melintas batas (*border crossing*) seperti batam dan singapura setiap hari orang singapura bekerja di batam dan orang di catat sebagai wisatawan. Dalam hal serupa ini perlu diadakan peraturan khusus keimigrasian.

Motivasi kunjungan yang di gunakan di indonesia adalah:

- a. *Business* (bisnis)
- b. (*Official mission*) dinas resmi
- c. *Convention* (Pertemuan, Intensif, Konfensi Pameran atau *MICE*)
- d. *Holiday* (berlibur)

- e. *Education* (Pendidikan)
- f. *Others* (Kunjungan Keluarga/Kawan, Kesehatan, dan lain-lain)

2.4. Bentuk dan Jenis Pariwisata

2.4.1. Bentuk Pariwisata

Setelah kita membicarakan dasar pemikiran tentang konsep atau definisi pariwisata dan wisatawan, maka perlu juga dibicarakan tentang bentuk-bentuk wisata itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai industri ini. Bentuk-bentuk ini dapat dibagi menurut kategori dibawah ini:

a. Menurut Asal Wisatawan

Pertama-tama perlu diketahui apakah wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya berpindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata domestic, sedangkan kalau ia datang dari luar negeri disebut pariwisata Internasional.

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu Negara yang dikunjunginya, yang disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga Negara ke luar negeri membrikan dampak negative terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

c. Menurut jangka waktu

Kedatangan seseorang wisatawan di suatu tempat atau Negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau Negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu Negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

d. Menurut jumlah wisatwan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

e. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil.

Dilihat dari kaca mata biasa sehari-hari, pembagian kategori bentuk-bentuk pariwisata dengan istilah-istilah tersebut di atas, agaknya teralu bersifat teknis, bahkan mungkin dianggap bertele-tele, terlalu dibuat-buat. Namun demikian, dari segi ekonomi, hal ini sangat penting dan perlu, sebab klasifikasi ini menentukan system perpajakan dan perhitungan pendapatan industri pariwisata ini.

2.4.2. Jenis Pariwisata

Di samping bentuknya, jenis pariwisata perlu pula dibicarakan di sini untuk menyusun statistik atau data-data penelitian dan peninjauan yang lebih akurat dalam bidang ini. Setiap orang telah memaklumi bahwa pembangunan ekonomi modern saat ini tanpa penelitian yang sistematis akan menemui kegagalan dan berakibat kerugian yang tidak sedikit. Justru karenanya pembangunan industri pariwisata di Indonesia juga harus didasarkan atas prinsip-prinsip ini. Ini berarti jenis-jenis pariwisata harus kita ketahui dan diperhitungkan supaya dapat memberikan pengertian dan tempat wajar dalam pembangunan industri, sesuai dengan falsafah *ambeg paramarta* serta situasi dan kondisi yang ada. Dengan kata lain, yang paling didahulukan dan yang kurang penting, kemudian jenis-jenis yang telah dikenal saat ini, antara lain:

a. Wisata Budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adapt-istiadat mereka,

budaya, dan seni mereka. Seringnya perjalan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya. Jhenis wisata budaya ini adalah jenis yang paling populer bagi Tanah Air kita. Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa jennis inilah yang aling utama bagi wisatawan luar negeri yang datang ke negeri ini di mana mereka ingin mengetahui kebudayaaan kita, kesenian kita dan segala sesuatu yang dhubungkan dengan adat-istiadat dan kehidupan seni budaya kita.

b. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat bagi dirinya dalam arti jasmanai dan rohani, demi mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata iar panas mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata Olahraga

Ini dimaksudkan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara seperti Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup, Tour de France, F-1 dan lain-lain. Macam cabang, olahraga yang termasuk dalam jenis wisata olahraga yang bukan tergolong dalam pesta olahraga atau games, misalnya berburu, memancing, berenang dan berbagai cabang olahraga dalam air atau di atas pegunungan.

d. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Pada mulanya banyak

orang berpendapat bahwa hal ini tidaklah dapat digolongkan ke dalam dunia kepariwisataan, dengan alasan bahwa perjalanan serupa ini, yaitu ke pameran atau pekan raya yang bersifat komersial hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk urusan bisnis mereka dalam pekan raya tersebut. Tetapi kenyataannya dewasa ini dimana pameran-pameran atau pekan raya diadakan, banyak sekali dikunjungi oleh kebanyakan orang dengan tujuan ingin melihat-lihat fasilitas sarana angkutan serta sewa akomodasi dengan reduksi khusus yang menarik, dan tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian. Karenanya, wisata komersial ini menjadi kenyataan yang sangat menarik dan menyebabkan kaum pengusaha angkutan dan akomodasi membuat rencana-rencana istimewa untuk keperluan tersebut.

e. Wisata Industri

Yang erat dengan wisata komersial adalah wisata industri. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian di mana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini. Hal ini banyak dilakukan Negara-negara yang telah maju perindustriannya di mana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di negara itu.

f. Wisata Politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti misalnya peringatan ulang tahun suatu negara, ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, penobatan Ratu Inggris di London dan sebagainya dimana fasilitas akomodasi,

sarana angkutan dan atraksi aneka warna diadakan secara megah dan meriah bagi para pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu juga peristiwa-peristiwa seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darmawisata termasuk dalam jenis ini. Sebab dewasa ini peristiwa-peristiwa politik seperti tersebut di atas selalu disertai dengan kegiatan dunia kepariwisataan.

g. Wisata Konvensi

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan wisata konvensi. Berbagai Negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional

h. Wisata Sosial

ke dalam jenis termasuk pula wisata remaja (youth tourism). Yang dimaksudkan dengan jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah (atau dengan kata lain tidak mampu membayar segala sesuatu yang bersifat luks) untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya bagi kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya. Organisasi ini berusaha membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi finansialnya untuk mempergunakan kesempatan libur atau cuti mereka dengan mengadakan perjalanan yang dapat pengalaman serta pengetahuan mereka dan sekaligus juga dapat memperbaiki kesehatan jasmaniah dan mental mereka. Dalam hubungan ini tidak jarang pula kaum majikan memberikan insentif liburan yang dibayar bagi kaum pekerjanya dan mendorong mereka agar melakukan perjalanan dalam rangka wisata sosial ini.

i. Wisata Pertanian

Seperti halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi. Tidak jarang pula pusat-pusat pertanian seperti ini menyediakan pramuwisata guna menjelaskan segala sesuatunya kepada wisatawan rombongan yang datang berkunjung.

j. Wisata Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, lebih-lebih di danau, bengawan, pantai, teluk atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau Negara-negara maritime di Lautan Karibia, Hawaii, Tahiti Fiji dan sebagainya. Di Tanah Air Kita banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritime ini, seperti misalnya Pulau Seribu di Teluk Jakarta, Danau Toba, Bunaken di Sulawesi Utara, pantai Pulau Bali dan pulau-pulau kecil disekitarnya, taman wisata di Kepulauan Maluku dan sebagainya. Jenis ini disebut pula Wisata Tirta.

k. Wisata Cagar Alam

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan an sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata Cagar Ala mini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini banyak

dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain.

l. Wisata Buru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan pemerintah negara yang bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika, untuk berburu gajah, singa, ziraf dan sebagainya. Di India, ada daerah-daerah yang memang disediakan untuk berburu macan, badak, dan sebagainya, sedangkan di Tanah Air kita Pemerintah membuka wisata buru untuk daerah Baluran di Jawa Timur di mana wisatawan boleh menembak banteng atau babi hutan. Pemerintah yang bijaksana mengatur Wisata Buru ini demi keseimbangan hidup satwa yang diburu tidak punah, dengan memperhitungkan berkembangbiaknya satwa tersebut, antara yang lahir yang diburu, tetap seimbang.

m. Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adapt-istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata pilgrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan. Wisata pilgrim banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan mempertoleh berkah dan kekayaan melimpah. Dalam hubungan ini, orang-orang Katholik misalnya melakukan wisata pilgrim in ke istana Vatikan di Roma, orang-orang Islam ke tanah Suci, orang-orang Buddha ke tempat-tempat suci agama Buddha di India, Nepal, Tibet dan sebagainya. Di Tanah Air kita, banyak tempat-tempat suci atau

keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama tertentu, misalnya seperti Cand Borobudur, Prambanan, Pura Besaki di Bali, Sendangsono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, Gunung Kawi, makam Bung Karno di Blitar dan sebagainya. Banyak agen atau biro perjalanan menawarkan wisata pilgrim ini pada waktu-waktu tertentu dengan fasilitas akomodasi dan sarana angkutan yang diberi reduksi menarik ke tempat-tempat tersebut di atas.

n. Wisata Bulan Madu

Ada juga ditambahkan dalam berbagai jenis wisata di sebutkan di atas yang dinamakan wisata bulan madu. Yaitu, suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri kenikmaan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti misalnya kamar pengantin hotel yang khusus disediakan dengan peralatan serba istimewa seperti tempat tidur yang istimewa, dekorasi dinding dengan selera tinggi, cermin besar di berbagai sudut termasuk langit-langit kamar dan sebagainya yang menimbulkan kesan seakan-akan berada di sorga loka. Perjalanan yang disebut wisata bulan madu ini biasanya dilakukan selama sebulan setelah pernikahan dilangsungkan, ke tempat-tempat romantis bagi sepasang manusia muda yang sedang menikmati hidup di dunia ini.

o. Wisata Petualangan

Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi (*oof the beaten track*) penuh binatang buas, mendaki tebing teramat terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat curam, anak-anak muda remaja “mengemudi tank-tank raksasa” bekas Perang Dunia II ke pedalaman Rusia, Bungy Jumping, arung jeram (rafting), wisata ruang angkasa (*International Space Station*) seperti yang dilakukan oleh Dennis Tito dari Amerika Serikat dan Mark Shuttleworth dari Afrika Selatan, dan seterusnya.

Sesungguhnya daftar jenis-jenis wisata lain dapat saja ditambahkan disini, tergantung kepada kondisi dan situasi

perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah atau negeri yang mendambakan industri pariwisatanya dapat maju berkembang. Pada hakekatnya semua ini tergantung kepada selera atau daya kreativitas para profesional yang berkecimpung dalam bisnis industri pariwisata ini. Makin kreatif dan banyak gagasan-gagasan yang dimiliki oleh mereka yang bekerja dalam dunia pariwisata, makin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri ini, karena industri pariwisata pada hakekatnya kalau ditangani dengan kesungguhan hati mempunyai prospektif dan kemungkinan yang sangat luas, seluas cakrawala pemikiran manusia yang melahirkan gagasan-gagasan baru dari waktu ke waktu.

2.5. Destinasi Pariwisata

Perencanaan, pengembangan dan pemasaran suatu destinasi memerlukan kerjasama erat dari pejabat pemerintah, perencana fisik, arsitek analisis finansial dan investor, juga bisa memerlukan dari pakar ekonomi, sosiologi purbakala, dan banyak profesional lainnya. Destinasi merupakan sebuah kawasan spesifik yang dipilih oleh pengunjung ia dapat tinggal selama waktu tertentu. Kata “destinasi” dapat membingungkan juga karena digunakan untuk suatu kawasan terencana, yang sebagian atau seluruhnya dilengkapi (*self-contained*) dengan amenities dan pelayanan produk wisata, fasilitas rekreasi, restoran, hotel, atraksi, dan toko pengecer yang dibutuhkan oleh pengunjung.

Kawasan dapat merupakan suatu propinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan suatu desa. Banyak destinasi di Indonesia sekarang, yang tidak secara sadar dikembangkan untuk menarik pengunjung, seperti kota dengan bangunan kuno, kota peristirahatan seperti Bogor, Cipanas, Batu, Tawangmangu, Parapat, Malino, dan lain-lain. Di tempat-tempat tujuan, harus ada fasilitas transportasi, fasilitas pendukung seperti rekreasi, hiburan dan pertokoan eceran, pemadam kebakaran, polisi dan fasilitas kesehatan harus tersedia atau dikembangkan. Paling penting, suatu destinasi harus memiliki daya tarik atau atraksi, baik psikologis maupun nyata untuk menarik wisatawan.

2.6. Atraksi dan Ciri Destinasi

Atraksi dan ciri ciri destinasi ini penting untuk keperluan *Fight seing*, rekreasi berbelanja hiburan dan bentuk bentuk lain dari suatu hiburan. Jelas, tidak hanya kuantitas atraksi, tetapi kualitas yang memengaruhi wisatawan untuk berkunjung, khususnya kunjungan liburan. Sebaliknya, kunjungan bisnis suatu kunjungan ziarah, tidak dapat dipengaruhi oleh usaha promosi pariwisata seperti kunjungan berlibur. Banyak destinasi memiliki bermacam macam atraksi, yang dapat menjadi daya tarik dari segmen pasar yang luas.

Yang diartikan atraksi wisata adalah atraksi yang diidentifikasi dengan dalam suatu penelitian, dan telah dikembangkan menjadi atraksi wisata yang berkualitas dan memiliki aksesibilitas yang baik.

Suatu cara penggolongan atraksi dan ciri ciri destinasi:

1. Sumber daya alam seperti iklim, pantai dan hutan
2. Sumber daya budaya seperti tempat bersejarah museum, teater dan masyarakat lokal.
3. Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan.
4. Event seperti pesta danau toba, pasar malam
5. Aktifitas spesifik, seperti kasino di genting high-land malaysia berbelanja di Hongkong
6. Daya tarik psikologis seperti romantik, petualangan.

Perencanaan dan pengembangan suatu destinasi meliputi sebagian besar sumber daya fisik atau komponen produk wisata. Tidak kurang penting analisis para pengunjung potensial, kebijaksanaan harga, destinasi saingan, dan aspek potensial yang membutuhkan kelayakan ekonomi dalam pengembangan. Tidak dapat dibedakan bahwa aspek lingkungan, budaya, dan sosial memiliki dimensi penting dalam pengembagan suatu destinasi. Perlu dikemukakan bahwa suatu rencana fisik kepariwisataan suatu destinasi, merupakan bagian dan harus terintegrasi dalam Rencana Umum Tata Ruang. (RUTR) suatu daerah.

Larry E herber dalam PATA workshop 1979 menegemukakan unsur unsur dalam suatu destinasi. Unsur utama adalah analisa pasar menurut penelitian sumber daya wisata yakni :

- Atraksi

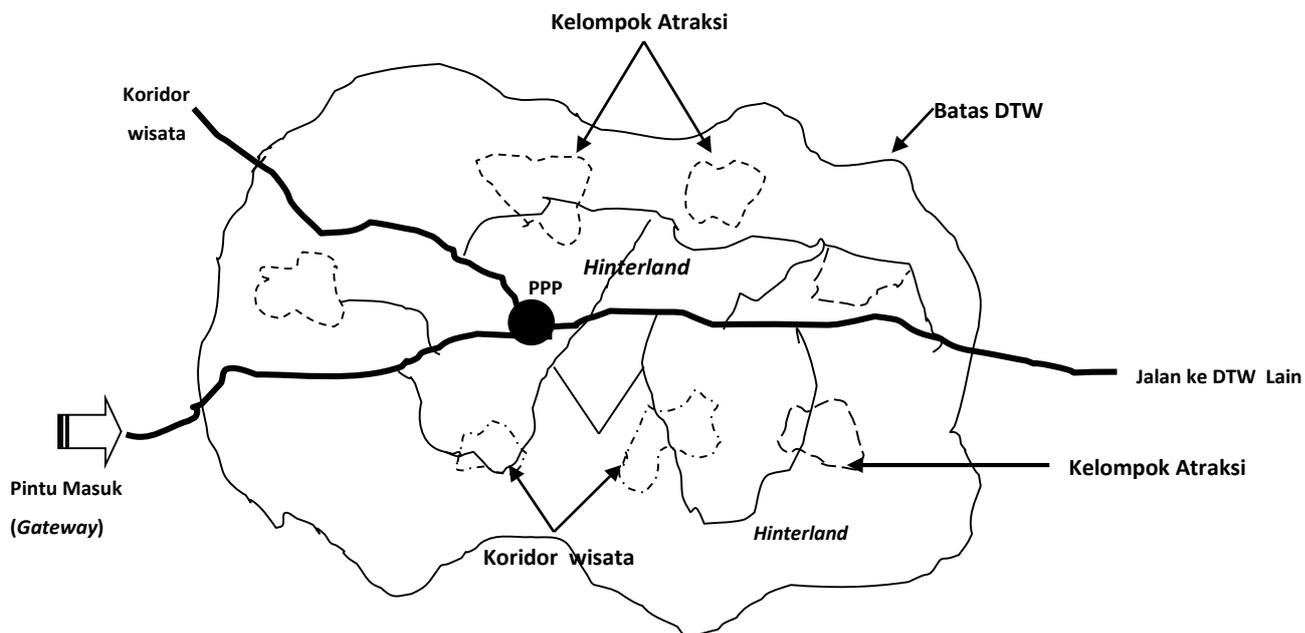
- Budaya
- Tenaga kerja
- Sarana dan prasarana
- Transportasi
- Jasa pendukung
- Akomodasi

Selain itu, pemasaran, analisis ekonomi dan finansial, lingkungan dan dampak sosial. Unsur lain peraturan tata ruang dan zona. Paket penelitian untuk destinasi dan kawasan pariwisata dokumen pelaksanaan sering termasuk pula dalam suatu rencana induk yang komprehensif.

2.7. Sistem Daerah Tujuan Wisata (DTW)

Suatu DTW terdiri dari 5 jenis komponen, yaitu:

1. *Gateway* atau pintu masuk, pintu gerbang, jumlahnya satu atau lebih, berupa pelabuhan udara, pelabuhan laut, pelabuhan ferry, terminal kereta api, atau terminal bus.
2. *Tourist center, Pusat Pengembangan Pariwisata (PPP)*, yang dapat berupa suatu atau beberapa kawasan wisata (*resort*) atau suatu bagian kota yang ada.
3. *Attraction* atau atraksi, yang berkelompok satu atau lebih.
4. *Tourist corridor*, pintu masuk wisata, yang menghubungkan *gateway* dengan *tourist center* ke *Attraction*.
5. *Hinterland*, atau tanah yang tidak digunakan untuk ke 4 komponen tersebut



Gambar 1. Sistem Daerah Tujuan Wisata

Wisatawan lazimnya datang lewat *gateway*, kemudian menuju PPP di mana wisatawan menemukan akomodasi dan semua usaha jasa layanan pendukung wisata, seperti restoran, toko cenderamata, persewaan kendaraan dan lain-lain.

Dari PPP wisatawan mengadakan perjalanan ke atraksi wisata, melewati koridor wisata. Sambil berjalan di koridor wisata, mereka menikmati pemandangan yang indah, dan kehidupan rakyat (desa, pengolahan tegalan, sawah, dan lain-lain) yang di sebut sebagai *hinterland*. *Hinterland* perlu tetap menarik, dan tidak diubah menjadi bangunan tinggi, pabrik dan sebagainya.

Atraksi berkelompok memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Mungkin mendatangi kelompok atraksi dengan kendaraan, lalu di dalam kelompok atraksi dengan *walking tours*, (berjalan kaki) agar dapat mengamati dengan lebih rinci kehidupan desa.

Makin banyak kelompok atraksi yang bervariasi akan menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama dalam DTW. Seperti di Bali Studio Seniman yang berada di desa-desa. Dengan tertariknya wisatawan melakukan perjalanan wisata berjalan kaki, mereka akan lebih lama tinggal di DTW.

Dengan menawarkan “*touring tourism*” naik kendaraan maka wisatawan akan melihat atraksi utama saja, dan akan tinggal tidak terlampau lama di DTW.

Trekking (berjalan kaki dan menginap) yang umumnya dilakukan di *hinterland*, banyak dilakukan dengan berjalan kaki, lewat jalan desa dan jalan setapak. Untuk *trekking* syarat utamanya adalah keamanan bagi wisatawan. Mereka bersedia menginap di tempat sederhana, asalkan bersih dan nyaman.

**BAB
3****PENGGOLONGAN USAHA
INDUSTRI PARIWISATA****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui dan memahami tentang penggolongan usaha dalam industri pariwisata.

Penggolongan usaha dalam industri pariwisata dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni :

a. Perusahaan Pariwisata Utama Langsung

Yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan pariwisata utama langsung adalah semua perusahaan yang tujuan pelayanannya khusus diperuntukkan bagi perkembangan kepariwisataan dan kehidupan usahanya memang benar-benar tergantung padanya. Bila pemikiran untuk menggolongkan rincian perusahaan-perusahaan ini dipergunakan dengan istilah *obyek sentra* dan *subyek sentra*, yaitu yang berkisar pada obyek dan subjek masing-masing, maka pembagian perusahaan-perusahaan pariwisata dapat juga dimasukkan ke dalam kategori demikian, tergantung pada kegiatan perusahaan-perusahaan itu sendiri, apakah kegiatan itu termasuk objek atau subjek pariwisata. Di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan tergolong dalam “objek sentra”.

1. Perusahaan akomodasi, termasuk hotel, penginapan, motel, losmen, peristirahatan, tempat berlibur, asrama, pemondokan, bungalow, kamar sewaan, perkemahan, homestay *inn* dan lain sebagainya.
2. Tempat peristirahatan khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya, termasuk permandian khusus untuk orang sakit, spa, *streambath*, peristirahatan dengan panti pijatnya, sanatorium, pedukunan dan sebagainya.
3. Perusahaan angkutan pariwisata, termasuk pengangkutan udara, laut, maupun seperti pengangkutan dengan kereta api, bis yang telah

ditetapkan bagi pengangkutan umum tidak termasuk dalam kategori perusahaan angkutan pariwisata. Tetapi mobil, bus, kereta api, pesawat udara atau kapal laut yang dipergunakan khusus untuk keperluan pariwisata, piknik, berlayar pesiar (*cruise*), bersenang-senang dan alat-alat pengangkutan yang diborong (*charter*) untuk keperluan tersebut, mobil atau sepeda motor (*rental car or motorcycle*) dan sebagainya yang khusus disewakan kepada wisatawan adalah termasuk kategori perusahaan angkutan pariwisata.

4. Perusahaan pengrajin atau manufaktur, seperti perusahaan kerajinan tangan atau barang-barang kesenian (*souvenir*), kartu pos bergambar untuk wisatawan, penerbitan buku-buku petunjuk bagi kepariwisataan dan lain sebagainya.
5. Toko-toko penjual souvenir, seperti barang-barang kerajinan tangan atau benda-benda lain khusus untuk wisatawan.
6. Usaha-usaha khusus untuk menyediakan dan menyajikan tempat-tempat rekreasi dan hiburan lain-lain khusus untuk wisatawan.
7. Organisasi atau usaha yang menyediakan pramuwisata (*guide*), penerjemah, sekretaris, juru tik, juru transkripsi, perlengkapan konvensi dan sebagainya.
8. Klub atau lembaga khusus yang mempromosikan pariwisata dengan jalan mengelola, mengatur perbaikan, dan kebersihan objek-objek yang dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri.

Perusahaan-perusahaan pariwisata yang termasuk dalam kategori “subjek sentra” adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha-usaha bagi orang yang merasa tertarik akan kebutuhan untuk mengadakan perjalanan atau memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati perjalanan apabila mereka sendiri tidak mampu untuk berbuat demikian. Dalam kategori ini termasuk:

1. perusahaan-perusahaan penerbitan kepariwisataan yang memajukan promosi pariwisata secara umum atau khusus.

2. Usaha-usaha yang membiayai kepariwisataan seperti bank pariwisata (*travel bank*), usaha kredit pariwisata (*travel credit*), badan-badan yang membiayai wisata sosial atau wisata remaja.
3. Perusahaan asuransi pariwisata seperti asuransi kecelakaan, sakit, biaya rumah sakit, kematian pada waktu mengadakan perjalanan.

Kategori ketiga adalah perusahaan pariwisata yang menyangkut objek maupun subjek pariwisata sendiri. Adapun kegiatan usahanya adalah terdiri dari bentuk, hubungan dengan kedua kategori yang tersebut terdahulu di atas. Prototip bentuk hubungan ini adalah biro perjalan umum dan agen perjalanan yang mempunyai dwi fungsi, yaitu keagenan pariwisata dan pengaturan perjalanan. Tugasnya adalah membawa subjek pariwisata ke objek pariwisata, dengan jalan menyajikan objek tersebut bagi kebutuhan wisatawan sebagai subjek (dalam hal ini fungsinya adalah pengaturan perjalanan) atau dengan jalan mengatur objek pariwisata yang dikehendaki oleh subjek pariwisata (disini fungsinya adalah sebagai agen pariwisata atau agen perjalanan).

Dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 9/ PW. 104/phb.-77 tugas kegiatan-kegiatan usaha Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Biro Perjalan Umum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) menyusun dan menjual paket wisata luar negeri kepada umum atau atas permintaan;
 - b) menyelenggarakan atau menjual pelayanan wisata (*cruise*);
 - c) menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum atau atas permintaan;
 - d) menyelenggarakan pemanduan wisata (*guiding and tour conducting*);
 - e) menyediakan fasilitas sew mobil untuk wisatawan;
 - f) menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain;
 - g) mengadakan pesanan sarana wisata;
 - h) mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Agen perjalanan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) menjual tiket/ karcis, sarana angkutan dan lain-lain.

- b) mengadakan pesanan sarana wisata;
- c) mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori tersebut di atas membawakan hubungan-hubungan yang sangat luas dengan berbagai bidang dalam kegiatan lalu-lintas pariwisata. Atas hubungan-hubungan bersifat utama dan kompleks berganda ini, biro perjalanan dalam segala kegiatannya menimbulkan usaha-usaha dan kontrak-kontrak baru, baik dalam hubungan nasional maupun internasional. Sebab hubungan-hubungan yang diadakan oleh biro perjalanan tidak saja terbatas pada hubungannya dengan perusahaan akomodasi, melainkan juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti tersebut dalam kategori terdahulu.

Lebih-lebih dengan adanya pariwisata lewat udara pada zaman modern seperti sekarang ini, struktur industri pariwisata yang bergerak dalam tergolong dalam kategori ketiga (terakhir ini), menjadi bertambah rumit, sehingga pertumbuhan industri pariwisata yang mempunyai dwi fungsi ini berkembang dengan cabang-cabang serta anak-anak cabang yang masing-masing menuju ke arah suatu spesialisasi khusus dan membengkok dalam suatu bidang. Dalam garis besarnya dapat diduga spesialisasi ini akan terus berkembang, namun disini dapat kita golongankan dua kelompok utama, apa yang dinamakan “pengecer” (*retailing*) dan “grosir” (*wholesaling*).

b. Perusahaan Pariwisata Sekunder Tak Langsung

Perusahaan pariwisata sekunder tak langsung tidak sepenuhnya tergantung pada wisatawan-wisataawan belaka, melainkan juga sebagian besar diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Namun demikian, perusahaan yang termasuk dalam kategori ini peranan penting dan perlu, lebih-lebih yang menyangkut usaha-usaha di bidang pangan (*catering*), yaitu perusahaan-perusahaan yang kegiatannya mengadakan makananan dan minuman seperti misalnya restoran, *grill*, warung, *sate house*, dan sebagainya, yang dalam kenyataan terbuka bagi umum dan wisatawan. Demikian pula halnya dengan perusahaan yang tersebut di bawah ini dapat digolongkan ke dalam perusahaan pariwisata sekunder tak langsung, seperti:

1. Perusahaan yang membuat kapal-kapal khusus untuk wisatawan seperti kapal pesiar (*cruise ship*), gerbong-gerbong khusus untuk wisatawan, mobil-mobil dan bis-bis, motorboat-motorboat dan sebagainya khusus dibuat untuk kesenangan sang wisatawan.
2. Toko-toko pakaian, perhiasan wanita dan batu permata mutu manikam, alat-alat potret dan film, alat-alat kecantikan, barang-barang keperluan hari-hari dan sebagainya.
3. Toko binatu, tukang cukur, toko ahli kecantikan, salon kecantikan dan sebagainya.

Demikianlah klasifikasi perusahaan-perusahaan yang yang tergolong dalam industri pariwisata, yang sudah barang tentu bagi Indonesia adalah merupakan soal-soal baru. Justru karenanya, kami yakin bahwa uraian ini akan dapat menjadikan sumbangan bagi kita dalam merumuskan suatu metode atau cara untuk memperkirakan pendapatan nasional dari sektor pariwisata dengan mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu sumber-sumber perpoajakannya. Dan sumber-sumber ini dapat ini kita bisa ketahui apabila penggolongan perusahaan-perusahaan pariwisata ini dapat disusun secara baik dan terinci, jelas menurut golongannya masing-masing. Dengan jalan demikian, peranan industri pariwisata dalam pembangunan ekonomi nasional akan mendapat tempat di mata masyarakat kita dan akan mempunyai arti wajar.

Satu hal lagi perlu kita catat disini, yaitu di dalam memperhitungkan menyusun klasifikasi perusahaan pariwisata dan perkiraan pendapatan nasional daripadanya, hendaknya pasaran dalam negeri (*domestic market*) industri pariwisata jangan dilupakan. Sebab, daerah/wilayah Tanah Air Indonesia amat luas. Keluasan wilayah ini membenarkan adanya pariwisata domestik, di mana suatu khas dapat diterangkan sebagai berikut: seorang dari Medan atau Aceh mengadakan perjalanan ke Jakarta atau Makassar akan mempergunakan fasilitas-fasilitas yang kira-kira sama dengan seorang dari Singapura atau Paris ke Jakarta atau Bali mempergunakannya. Ia butuh tinggal di hotel, makan di restoran, melihat-lihat dan menonton ini-itu dan sebagainya tidak ubahnya seperti seorang wisatawan luar negeri membutuhkannya.

**BAB
4****PERLENGKAPAN
INDUSTRI PARIWISATA****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui dan memahami perlengkapan industri pariwisata.

Dalam membicarakan fungsi serta arti kelengkapan dan perlengkapan industri pariwisata, dua faktor harus kita pisahkan satu sama lain. Pertama faktor yang termasuk subyek dan kedua faktor yang tergolong dalam obyek pariwisata. Dalam istilah teknisnya wisatawan disebut subjek, sedangkan alat dan perlengkapan industri pariwisata disebut objek, yang dalam bahasa asing dinamakan *travel plant* atau *visitor plant*.

Sesungguhnya pariwisata pada hakikatnya lazim dihubungkan dengan barang-barang dan pelayanan jasa-jasa yang menyajikan kenyamanan, keenakan, juga kemewahan serba luks. Karenanya, ia digolongkan ke dalam dalam sektor ketiga prinsip produksi ekonomi. Sektor pertama adalah agraria dan sektor kedua adalah industri. Mengingat kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang mekanisasi, otomatisasi dan spesialisasi serta mengingat aspirasi manusia masa kini, maka dapat diramalkan bahwa pariwisata sebagai sektor ketiga dalam prinsip ekonomi akan dapat berkembang secara luas di masa akan datang, lebih-lebih karena diterapkan teknologi komputer untuk keperluan reservasi bagi wisatawan-wisatawan yang ingin berlibur secara cepat dan efisien. Maka itu perlu kiranya dipelajari perlengkapan industri pariwisata ini dari segi kegiatannya yang dalam garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Transportasi
- b. Akomodasi dan perusahaan pangan
- c. Perusahaan jasa.

A. Transportasi

Transportasi atau pengangkutan sangat menentukan antara jarak dan waktu dalam perjalanan sehingga merupakan salah satu unsur utama langsung dalam tahap dinamis gejala-gejala pariwisata. Ia menyebabkan Bergeraknya seluruh roda industri pariwisata. Adapun alat dan perlengkapan transportasi ini dalam kategorinya dibagi sebagai berikut:

1. Pengangkutan dengan kapal

Pengangkutan dengan kapal, motorboat, fery, perahu layar dan sebagainya, seperti halnya dengan kereta api dan pengangkutan udara, apabila dipergunakan dalam hubungan jaringan-jaringan dan rutin pengangkutan umum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai alat dan perlengkapan pariwisata. Tetapi apabila ia dipergunakan untuk tujuan-tujuan pariwisata, maka ia tergolong di dalamnya. Pengangkutan dengan kapal ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a) di Danau, seperti misalnya di Danau Toba, di danau-danau di negeri Italia dan sebagainya, di mana biasanya dilakukan pelayaran-pelayaran untuk bertamasya, berolahraga dan sebagainya.
- b) di sungai, seperti misalnya Sungai Musi, Kapuas, Rheine, dan sebagainya di mana biasanya dilakukan pelayaran-pelayaran untuk bersenang-senang, bertamasya, berolahraga dan sebagainya, seperti halnya di danau.
- c) di laut, di mana pengangkutan dapat dibagi tiga, yakni pelayaran teratur, pelayaran biasa, dan pelayaran penyeberangan dengan fery atau hidrofoil. Pelayaran teratur atau disebut pula pelayaran reguler menjamin pula transportasi bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi sebaliknya pelayaran pesiar atau disebut juga *cruise* adalah dalam keseluruhannya bersifat kepariwisataan, di mana kapal-kapal khusus disediakan untuk berlayar menuju tempat-tempat objek pariwisata dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, bahkan tidak jarang pula ada yang mengelilingi dunia. Pelayaran penyeberangan dengan fery, seperti halnya pelayaran teratur, selain untuk melayani kepentingan umum dalam rute-rute

biasa, juga menjamin transportasi bagi wisarawan-wisatawan, seperti menyeberangi Selat Sunda (Merak-Bakahuni), dan sebagainya.

2. Pengangkutan dengan kereta api

Untuk pengangkutan darat jarak jauh dalam bidang pariwisata, kereta apilah yang paling banyak diuntungkan, lebih-lebih di suatu negara di mana objek-objek pariwisatanya terdapat jarak dan lingkungan yang dihubungkan dengan lalu-lintas kereta api, terkadang juga ada kalanya bahwa seluruh gerbong kereta api memang khusus disediakan bagi wisatawan-wisatawan, yang disebut kereta api wisata (*tourist train*), seperti misalnya di pegunungan Alpen. Karena situasi letak dan lingkungan, ada kalanya kereta api wisata ini berbentuk kereta api kabel yang meluncur di bawah kabel, kereta api puncak, kereta api tambang, kereta Swiss, dan sebagainya. Pengangkutan dengan kereta api berkaitan api berkaitan dengan perlengkapan pariwisata harus ditinjau dari segi stuktur dan situasi khusus

3. Pengangkutan dengan mobil dan bus

Dalam kurun waktu 20-30 tahun statistik perjalanan menunjukkan bahwa jumlah bepergian dengan mobil makin bertambah banyak. Hal ini disebabkan karena mobil dapat dipergunakan secara praktis, nyaman lebih bisa dinikmati, dan kecepatan lebih bisa diatur sendiri. bahkan ada pula perusahaan yang mengkhususkan diri untuk melayani orang-orang bisnis dan wisatawan dengan menyewakan mobil berikut sopirnya. Sistem penyewaan mobil ini disebut *car rental*, atau *rent a car* banyak penggemarnya termasuk di Indonesia.

Disamping mobil, terdapat pula perlengkapan pariwisata berupa bus, atau bahasa asingnya disebut *motor coach* atau bus wisatawan dengan daya angkut yang lebih besar, di samping bus wisatawan khusus bagi pelancong dan pengunjung, ada pula motor coach beroperasi secara teratur untuk umum.

Di daerah-daerah tujuan wisata yang letaknya terpencil tetapi ramai dikunjungi wisatawan luar negeri, perlengkapan pariwisata

dengan alat pengangkutan yang lebih praktis dan sederhana seperti misalnya kuda, andong, dokar, sampan, becak, dan sebagainya.

4. Pengangkutan dengan pesawat udara

Dewasa ini, pengangkutan dengan udara telah menduduki tempat paling istimewa, maka perlengkapan industri pariwisata dengan alat pengangkutan semacam ini, makin merasa dibutuhkan. Lebih-lebih bagi negara yang berwilayah seperti Indonesia di mana jarak-jarak dari satu tempat ke tempat lain sangat jauh, lagi pula untuk meretas infrastruktur baru sangat memakan waktu dan biaya tidak sedikit, maka alat transportasi dengan pesawat udara ini merupakan suatu keharusan. Di samping pesawat-pesawat udara biasa, baik bermesin piston maupun jet, tidak jarang pula digunakan helikopter seperti misalnya di Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk tujuan-tujuan wisata khusus.

B. Akomodasi dan Perusahaan Pangan

Untuk memahami fungsi akomodasi dalam hubungannya dengan alat dan perlengkapan industri pariwisata, perlu adanya pengertian terlebih dahulu berupa batasan atau defenisi tentang akomodasi ini, teristimewa hotel. Oleh Prof. K. Krapf, Direktur Lembaga Riset Pariwisata-Universitas Bern Di Swiss, mengatakan: “ Hotel adalah sebuah gedung (bangunan) yang menyediakan penginapan, makanan dan pelayanan yang bersangkutan dengan menginap serta makan itu bagi mereka yang mereka dalam perjalanan”.

Dalam peraturan pokok perusahaan hotel di Indonesia, Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. SK.241/H/70 Tahun 1970, tentang hotel ini ini tercantum batasan sebagai berikut: “ Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk penginapan (akomodasi) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum, yang memenuhi syarat-syarat comfort dan bertujuan komersial”.

Pada lazimnya klasifikasi hotel dapat dibagi menurut:

- Berdasarkan kenyamanan (comfort) dan harga sehingga menimbulkan adanya hotel kelas deluks, kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.

- Menurut lamanya seseorang tamu tinggal menginap, terdiri atas hotel musiman (*seasonal hotel*), hotel transit, hotel residensi yang menerima tamu untuk tinggal dalam jangka waktu panjang tetapi tidak menetap.
- Menurut letaknya, maka hotel dapat dibagi menjadi hotel kota, hotel pegunungan, hotel pantai dan hotel di pedalaman.
- Menurut kesibukan lalu-lintas, terdiri atas hotel stasiun, hotel pelabuhan, hotel lintas (*highway hotel*) yang terletak di pinggir jalan raya lintas biasanya disebut juga motel.
- Menurut jumlah kamar yang tersedia dalam suatu hotel, maka hotel itu dapat dibagi menjadi hotel kecil, hotel menengah dan hotel besar, di Indonesia yang telah memiliki kamar 100 ke atas di sebut hotel besar.
- Menurut pemilikinya, maka hotel dapat terdiri atas hotel perorangan, hotel kepunyaan keluarga, hotel perusahaan bersama dan hotel negara (pemerintah).
- Menurut plan yang dilaksanakan, terdiri atas hotel penuh atau full hotel, yang berarti menyediakan makanan lengkap, sarapan, makan siang dan malam yang diperhitungkan bersama-sama dengan sewa kamar.
- Menurut jangka waktu perusahaan beroperasi, maka dapat dibagi menjadi hotel yang hanya dibuka hanya setengah tahun misalnya pada musim panas dan musim dingin.

Penentuan golongan hotel-hotel menurut tanda bintang ini dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan Jenderal oleh Direktur Pariwisata, Departemen Perhubungan RI, yang dilakukan 3 (tiga) tahun sekali dengan tata cara pelaksanaannya ditentukan oleh Direktur Jenderal Pariwisata sendiri. Sebenarnya bukanlah nama hotel yang terpenting melainkan kegunaannya sebagai suatu tempat di mana seseorang dapat tinggal sementara. Dalam dunia kepariwisataan-dalam bahasa teknis disebut akomodasi tambahan (*supplementary accommodation*).

Akomodasi tambahan ini sesungguhnya ada di mana-mana di dunia ini. Berikut beberapa akomodasi tambahan, baik yang terdapat di Indonesia maupun di negeri-negeri lain:

Pension adalah hotel kecil yang menyediakan makan pagi bagi para tamu dengan tarif tertentu. Perlengkapan diatur menurut tingkat dan kepentingan tamunya.

Herberg atau inn- penginapan dalam bentuk sederhana banyak terdapat di Eropa, biasanya menyediakan minuman belaka, tempatnya di daerah pinggiran kota atau daerah pedalaman.

Hospiz-penginapan di pegunungan terutama di wilayah pegunungan Alpen.

Apartemen- adalah penginapan untuk jangka waktu agak lama, biasanya pada waktu musim panas atau musim libur.

Bungalow-adalah bangunan atau rumah-rumah yang menyediakan atau tidak mungkin pula tidak menyediakan makanan, terletak di pinggiran kota.

Pondok atau *cottage*- adalah penginapan dengan bangunan-bangunan dengan gaya lokal dengan bahan-bahan lokal pula.

Homestay- adalah rumah-rumah penduduk setempat di suatu daerah tujuan wisata yang digunakan sebagai penginapan sementara bagi wisatawan.

Foresterie- bangunan yang terletak di pinggir hutan atau lereng gunung dengan perabotan sederhana, yang juga menyediakan makanan, disewakan bagi orang-orang atau kafilah yang tinggal untuk beberapa hari dalam perjalanan mereka melintasi hutan, pegunungan atau perbatasan.

Sesungguhnya berbagai macam akomodasi tambahan tersebut di atas dan lain sebagainya memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat umum untuk mengadakan perjalanan dengan ongkos-ongkos lebih murah.

Perusahaan Pangan

Unsur utama dalam perusahaan pangan atau *catering trade* adalah apa yang disebut ahli-ahli gastronomi, yaitu seni makanan dan seni minuman atau ilmu masak-memasak. Gastronomi inilah merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk mengadakan perjalanan dengan harapan dapat makan enak, minum enak, dan tidur nyenyak.

Dalam hubungannya dengan dunia kepariwisataan, gastronomi menurut standar manca negara dimaksud adalah tiada lain dari pada dapuryang baik, penyajian dan tata pelayanan yang baik pula.

Lebih jauh *catering trade* tidak saja menggantungkan diri kepada wisatawan, melainkan publik setempat pun membutuhkan pangan setiap harinya. Dengan kata lain, wisatawan hanyalah tambahan bagi pendapatan perusahaan pangan ini. Walaupun demikian, bagi suatu daerah tujuan wisata, di mana musim-musim tertentu wisatawanlah merupaka orang terbanyak dan terutama membtuhkan pangan itu, maka catering trade ini menggantungkan diri kepada wisatawan yang datang. Demikian pula halnya dengan daerah tujuan wisata seperti Kuta di Bali umpamanya di rumah makan, bar, coffeeshop dan sebagainya tergantung kepadasebagian besar wisatawan yang berkunjung dan tinggal di tempat itu.

Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa yang kita maksudkan disini adalah perusahaan jasa industri pariwisata atau bahasa asingnya *tourist service trade*, yang ditinjau dari segi kegiatan serta bidang geraknya secara ekonomis menggantungkan diri 100% kepada pariwisata. Perusahaan-perusahaan jasa pariwisata yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Perusahaan perjalanan (Biro Perjalanan, agen perjalanan, pelayanan wisata dan sebangsanya).
- Perusahaan jasa wisata tambahan (seperti pelayanan pramuwisata, penuntun wisata, petunjuk wisata, pelayanan angkutan barang atau porter, pelayanan darma wisata dan sebangsanya),
- Perusahaan hiburan (seperti karnaval, kabaret, festival, kuursaal, Kasino, dan sebangsanya),
- Perusahaan penukaran uang (bank wisata, money changer dan sejenisnya),
- Asuransi wisata.

1. Perusahaan Perjalanan

Yang dimaksud dengan perusahaan perjalanan atau *travel bureau* atau *travel agency* adalah perusahaan yang mempunyai tujuan untuk

mempersiapkan perjalanan, dalam bahasa asingnya trip atau tour bagi seseorang yang berencana melakukannya.

Dalam operasional usahanya perusahaan perjalanan ini mempunyai bidang gerak dalam dua jurusan, yaitu:

- a) Kegiatannya dipusatkan pada usaha menjasikan dirinya sebagai perantara antara wisatawan di satu pihak dan pengusaha pengangkutan atau hotel di lain pihak atas dasar komisi.
- b) Kegiatannya dipusatkan pada pengaturan Perjalanan atau “trip” atas inisiatif dan resiko sendiri.

Di Indonesia, usaha dan kegiatan perusahaan perjalanan ini daitur melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. PM.9/PW.104/ phb-77 tanggal 22 Desember 1977, yang membagi jenis perusahaan ini menjadi tiga, yaitu Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan, dengan ketentuan Umum sebagai berikut:

- 1) Biro Perjalanan Umum adalah perusahaan yang melakukan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan;
- 2) Agen perjalanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata.
- 3) Cabang Biro Perjalanan Umum adalah satuan - satuan usaha dari suatu Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di tempat yang sama atau di tempat yang lain dan yang memberikan pelayanan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Biro Perjalanan Umum.

Kegiatan-kegiatan usaha biro perjalanan umum dan agen perjalanan dalam Surat Keputusan Menteri ini di atur seperti berikut: Biro perjalanan umum melakukan kegiatan-kegiatan usahanya untuk:

- Menyusun dan menjual paket wisata ke luar negeri kepada umum atau atas permintaan;
- menyelenggarakan dan menjual pelayaran pariwisata (*cruise*);
- menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum atau atas permintaan;
- menyelenggarakan pemanduan wisata (*guiding and tour conducting*).

- Menyediakan fasilitas sewa mobil untuk wisatawan;
- Menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain;
- Mengadakan pemesanan sarana wisata;
- Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan Agen Perjalanan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain;
- Mengadakan sarana wisata;
- Menguruskan dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Perusahaan Jasa Wisata tambahan

Di samping Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan, ada pula perusahaan jasa wisata yang sebenarnya bergerak di bidang yang lebih khusus dan dalam prakteknya merupakann kerja tambahan dan dibutuhkan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan akomodasi ataupun perusahaan perjalanan itu sendiri, misalnya pelayanan pramuwisata (*guide service*) yang memberi keterangan dan penjelasan mengenai tempat yang dikunjungi, penuntun wisata yang bertindak sebagai pramuwisatadan juga sebagai pemimpin perjalanan, pelayanan angkutan barang, dan pelayanan darma wisata yang menyelenggarakan dalam kota, dalam satu daerah tujuan wisata dan sebagainya.

3. Perusahaan hiburan

Perusahaan hiburan di maksudkan disini adalah usaha-usaha yang menyelenggarakan hiburan (*entertainment*) bagi para pengunjung atau wisatawan dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, pementasan, kontes, permainan dan lainnya.

4. Perusahaan Penukaran Uang

Di samping bank yang bertugas untuk melakukan transaksi uang asing, ada pula perusahaan-perusahaan sebagai tempat penukaran uang asing (*money changer*) yang langsung berada di bawah pengawasan pemerintah, di tempat-tempat seperti pelabuhan udara atau pelabuhan laut, stasiun kereta api, wilayah atau daerah tujuan wisata, pusat-pusat perbelanjaan. Di negeri di mana industri pariwisatanya telah maju, terdapat bank

pariwisata (*travel bank*) yang khusus bergerak di bidang perbankan industri ini.

5. Perusahaan asuransi wisata

Kiranya sama tentang alat dan perlengkapan industri pariwisata belum lengkap apabila tidak disinggung perusahaan asuransi wisata. Perusahaan asuransi bergerak di segala bidang, termasuk pula sektor industri pariwisata. Perusahaan asuransi wisata menjamin kalau terjadi kecelakaan, sakit, kehilangan selama mengadakan perjalanan bagi sang wisatawan yang belakangan ini ternyata memperoleh premium yang tinggi.

6. Perusahaan jasa konsultan wisata

Berkat adanya kemajuan di sektor pariwisata ini, tidak sedikit mereka yang memiliki modal (berupa uang atau aset lainnya) ingin turut bergerak dalam industri pariwisata, namun tidak tahu dan terlalu awam akan seluk-beluk industri ini. Maka hadirilah pribadi-pribadi atau perusahaan yang memiliki pengalaman banyak dan pengetahuan mendalam di berbagai bidang dalam sektor pariwisata secara profesional. Bidang-bidang ini antara lain mengenai mengenai antara lain mengenai perhotelan, restoran, kawasan wisata, objek dan daya tarik wisata, daerah tujuan wisata, promosi dan pemasaran wisata, SDM wisata dan sebagainya. Mereka inilah yang membentuk perusahaan jasa konsultan wisata, tempat awam bermodal memperoleh informasi, petunjuk dan nasehat, pelatihan dan sebagainya dengan tujuan untuk berbisnis dalam sektor ini. Karenanya tidak jarang perusahaan jasa konsultan wisata menjadi konsultan pengelola (*management consultant*).

**BAB
5****PERWILAYAHAN
PARIWISATA DI INDONESIA****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui dan memahami perwilayahan pariwisata di Indonesia.

Setiap orang tentu akan mengakui bahwa informasi serta pengetahuan seseorang yang banyak mengadakan perjalanan merupakan informasi dan pengetahuan yang lebih luas dan mungkin lebih mendalam tentang peristiwa dan situasi dalam berbagai bidang aspek kehidupan yang sangat luas, baik dalam ukuran nasional maupun internasional.

Berbicara tentang pembangunan industri pariwisata di Indonesia, perlu disinggung potensi daerah wilayah Tanah Air ditinjau dari segi dunia pariwisata sendiri, di mana menurut Panitia nasional Penelitian laut, wilayah Indonesia terdiri dari 13.677 buah pulau, dan 6.044 pulau diantaranya dihuni oleh manusia. Sesungguhnya alam Indonesia ini penuh dengan aneka ragam pemandangan indah yang menyediakan objek-objek pariwisata luas dan menarik bagi wisatawan.

Objek-objek ini tersebar hampir di seluruh kepulauan Tanah air. Guna memperoleh gambaran jelas tentang pelaksanaan program pembangunan industri pariwisata ini, perlu dikemukakan disini bahwa industri pariwisata dibangun atas dasar perwilayahan. Bagi Indonesia perwilayahan ini sangat penting karena Indonesia memiliki potensi luas dan beraneka warna, baik yang merupakan potensi tidak bergerak (keindahan alam, monumen, candi, dan sebagainya) maupun atraksi bergerak (di mana faktor manusia memegang peranan penting, misalnya: kesenian, adat-istiadat, seremoni, perayaan, pekan raya dan sebagainya).

Yang dimaksud dengan perwilayahan dalam dunia kepariwisataan adalah pembagian wilayah-wilayah pariwisata yang dapat dipandang memiliki potensi,

selanjutnya dapat dijadikan tujuan yang pasti. Dalam pengertian ilmiahnya wilayah ini disebut daerah tujuan wisata atau dalam bahasa asingnya tourist destination area, yang batasnya adalah sebagai berikut: “Yang dimaksudkan dengan wilayah pariwisata adalah tempat atau daerah yang karena aktraksinya, situasinya dalam hubungan lalu-lintas dan fasilitas-fasilitas kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan”.

Dapat disimpulkan ada tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk menjadi tujuan wisata:

1. memiliki atraksi atau objek yang menarik.
2. mudah dicapai dengan alat-alat kendaraan.
3. menyediakan tempat tinggal sementara.

Adapun atraksi atau objek yang menarik yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dihubungkan dengan keindahan alam, kebudayaan, politik, lalu-lintas, dan sebagainya.

Di berbagai negara, di Eropa Barat misalnya, orang menggolongkan daerah tujuan wisata ini menurut faktor-faktor tersebut di bawah ini;

(a) Daerah Tujuan wisata Tergantung atas alam

Tergolong dalam daerah tujuan ini:

1. tempat berlibur pada musim-musim tertentu (liburan musim panas atau musim dingin).
2. tempat beristirahat untuk kesehatan, seperti misalnya sumber atau mata air panas yang mengandung mineral, atau tempat yang mempunyai hawa udara segar, seperti daerah pegunungan ataupun pantai.

(b) Daerah Tujuan Wisata Tergantung atas kebudayaan

Dalam kategori ini termasuk:

1. kota-kota bersejarah, monumen, teater dan sebagainya.
2. pusat pendidikan seperti misalnya universitas, lembaga ilmiah dan sebagainya.
3. tempat yang mempunyai acara-acara khusus seperti perayaan, adat-istiadat, pesta rakyat dan sebagainya.
4. pusat beribadah seperti mesjid, gereja, pura, dan sebagainya.

(c) Daerah Tujuan Wisata tergantung atas lalu lintas

Daerah tujuan ini meliputi;

1. Daerah pelabuhan laut,
2. pertemuan lalu-lintas kereta api;
3. persimpangan lalu-lintas kendaraan bermotor;
4. daerah pelabuhan udara.

(d) Daerah Tujuan Wisata tergantung atas kegiatan ekonomi

Termasuk dalam kategori ini:

1. pusat perdagangan dan perindustrian
2. pusat-pusat bursa dan pekan raya
3. tempat-tempat yang mempunyai institut perekonomian atau peristiwa-peristiwa ekonomi seperti pameran, pekan industri, instalasi pabrik dan sebagainya.

(e) Daerah Tujuan Wisata tergantung pada kegiatan politik

Dalam golongan ini termasuk:

1. ibukota atau pusat pemerintahan,
2. tempat-tempat yang mempunyai institut politik dan kegiatan-kegiatan politik seperti kongres, konferensi, dan sebagainya.

Di Tanah Air, penanganan pembangunan wilayah pariwisata untuk dijadikan daerah tujuan wisata akhir-akhir ini telah nampak menunjukkan kemajuan. Dalam hubungan ini, Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kebijaksanaannya di bidang pariwisata melandaskan pembangunan daerah tujuan wisata atas dasar pokok-pokok pikiran:

- (1) tersedianya prasarana, sarana dan fasilitas-fasilitas lain serta besarnya potensi kepariwisataan di daerah yang bersangkutan,
- (2) asas pemerataan pembangunan, sehingga pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan serempak tanpa mengabaikan potensi-potensi sumber-sumber yang dimiliki tiap daerah.

Berdasarkan atas asas pendekatan pokok-pokok pikiran tersebut di atas skala prioritas pembangunan dan pengembangan daerah tujuan wisata kemudian diputuskan untuk dibangun 10 Daerah Tujuan Wisata yang meliputi propinsi-propinsi DKI Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Daerah-daerah Tujuan Wisata, yang berjumlah sepuluh ini, dibangun dan digalakkan secara serentak di sepuluh propinsi dengan urutan prioritas:

- (1) Sumatera Utara- meliputi wilayah Danau Toba dengan Pulau Samosir dan sekitarnya, Dataran Tinggi Karo dengan Brastagi.
- (2) Sumatera Barat-meliputi wilayah Bukittinggi dengan Danau Maninjau, Danau Singkarak, Payakumbuh dan Batusangkar, serta Kota Padang beserta objek-objek wisata disekitarnya.
- (3) Jawa Barat- meliputi wilayah kota Bandung, Jabotabek, Gunung Gede, Banten, Cirebon, Tasikmalaya dan Ciamis.
- (4) Jawa Tengah- meliputi wilayah Merapi, Merbabu, Semarang, Ambarawa, Kopeng, Dieng, Solo, Yogyakarta serta lingkungan candi Borobudur dan Candi Prambanan, termasuk Kudus dan Demak.
- (5) Jawa Timur- meliputi wilayah kota Surabaya, Malang (Trowulan, Pandaan, Tretes), Gunung Bromo dan Pulau Madura serta Banyuwangi.
- (6) Sulawesi Selatan- meliputi Kotamadya Ujung Pandang, Maros, Gowa, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, kabupaten Luwu dan terutama Tanah Toraja.
- (7) Sulawesi Utara-meliputi wilayah Kabupaten Minahasa, Air Madidi, Remboken, Taratara dan Tasik Ria.

Karena Bali dan DKI Jakarta telah dipandang cukup mampu mengembangkan diri sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama, maka prioritas pembangunan baginya tidaklah penting lagi, dan sebagai gantinya urutan prioritas pembangunan dan pengembangan daerah tujuan wisata dialihkan kepada Propinsi Maluku dan Nusa Tenggara, terutama sebagai Daerah Tujuan Wisata yang disebut “Wisata Marina” atau Wisata Bahari.”

Memperhatikan usaha-usaha Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan daerah tujuan wisata seperti tersebut di atas, kita mendapat kesan adanya hal-hal yang seakan-akan dipaksakan. Pertama, pembangunan dan pengembangan daerah tujuan wisata ini diorientasikan atas pembagian wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu Propinsi yang bersifat politis yang menyangkut

birokrasi ketataprajaan. Kedua, karena berorientasikan pembagian Wilayah Republik Indonesia, maka konsepsi ilmiah dan kebutuhan objektif praktis suatu daerah tujuan wisata terpaksa diabaikan. Ketiga, akibat pola dasar pemikiran yang berorientasikan politik pembangunan wilayah Negara Republik Indonesia atas dasar Propinsi secara merata, maka dana yang cukup besar dan ahli-ahli harus disediakan dengan biaya yang tidak sedikit. Keempat, adanya berbagai proyek yang dibangun tanpa dilandasi syarat-syarat suatu “Daerah Tujuan Wisata” menyebabkan biaya pembangunannya menjadi mubazir.

Seandainya kesan yang kita tangkap seperti digambarkan di atas maka orientasi ilmiah dan obyektif tentang pembangunan dan pengembangan daerah tujuan wisata kita harus diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, yaitu syarat-syarat minimal yang dibutuhkan suatu *tourist destination area* : atraksi atau objek wisata menarik, mudah dicapai, dengan alat kendaraan (darat, laut dan udara) serta tersedianya tempat tinggal sementara bagi pengunjung yang datang ke tempat daerah tujuan wisata tersebut.

Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut di atas daerah tujuan wisata dalam kenyataannya terpaksa harus disediakan dan dibangun prasarana dan sarana dengan biaya terlampau amat tinggi bagi kebutuhan kesepuluh daerah propinsi, terlebih-lebih yang menyangkut soal-soal aksesibilitas dan pengadaan akomodasi bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Tambahan pula, ada persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli dalam usaha suatu negara membangun dan mengembangkan daerah tujuan wisatanya sebagai berikut:

Persyaratan Penelitian Daya Tarik Pariwisata

Faktor	Kriteria	Pertimbangan
alam	Keindahan	Topografi umum seperti flora dan fauna di sekitar danau, sungai, pantai, laut, air terjun, cagar alam, hutan dan sebagainya.
	Iklim	Sinar matahari, suhu udara, cuaca, angin, hujan, panas, kelembaban an sebagainya.
Sosial budaya	Adat-istiadat	Pakaian, makanan dan tata cara hidup daerah, pesta rakyat, kerajinan tangan, dan produk-produk lokal lainnya.
	Seni bangunan	Arsitektur setempat seperti candi, pura, mesjid, gereja, monumen dan sebagainya.
	Pentas dan pagelaran festival	Gamelan, musik, seni tari, dan sebagainya.
	Pameran, pekan raya	Pekan raya-pekan raya bersifat industri komersial
Sejarah	Peninggalan purbakala	Bekas-bekas istana, tempat peribadatan, kota tua dan bangunan-bangunan peninggalan sejarah, dongeng dan legenda
Agama	Kegiatan masyarakat	kegiatan hidup setempat sehari-harinya dalam soal beribadah, upacara, pesta dan sebagainya
Fasilitas rekreasi	Olahraga	Berburu, memancing, berenang, mendaki dan sebagainya.
	Edukasi	Museum arkeologi dan ethnologi, kebun binatang, kebun raya, akuarium, planetarium, dan sebagainya.

Fasilitas kesehatan	Untuk beristirahat, berobat dan ketenangan	Spa mengandung mineral, spa air panas, sanatorium, tempat piknik, tempat mendaki,an sebagainya.
Fasilitas belanja	Beli ini-itu	Toko-toko souvenir, toko-toko barang kesenian dan hadiah, toko-toko keperluan sehari-hari, dan sebagainya.
Fasilitas hiburan	Waktu malam	Kasino, night club, disko, bioskop, teater,dan sebagainya.
Infrastruktur	Kualitas wisata	Jalan-jalan raya, taman ,listrik, air, pelayanan, keamanan, pelayanan kesehatan, kdan sebagainya.
Fasilitas pangan dan akomodasi	Makanan dan penginapan	Hotel, motel, bungalow, restoran, rumah makan dan sebagainya

Keterangan:

Contoh ini diambil dari pola *Establishing a Measure of Tourist Attractiveness* oleh Charles E. Gearing, William W. Swart ang Turgut Var dalam buku *Planning for Tourism Development, Quantitative Approach- Chapter 4 on "Deriving Benefit Measures for Tourism policies"*, Praeger Publisher, Inc. New York,1976.

**BAB
6****PERENCANAAN PARIWISATA****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui dan memahami tentang perencanaan wisata dan pentingnya perencanaan wisata

6.1. Pentingnya Perencanaan Wisata

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak semakin ketatnya persaingan. Setiap orang disibukkan dengan kegiatan masing-masing, sebagaimana orang Jawa mengatakan bahwa jaman sekarang orang itu *Kaya Gabah Diinter* (laksana butiran padi ditampi). Rutinitas yang dialami orang dalam kesehariannya menimbulkan ketegangan kebosanan dan kejemuhan. Tidak dapat dibantah lagi bahwa waktu senggang yang mereka miliki akan dijadikan sebagai sarana untuk memulihkan kejernihan pikiran, mendapatkan inspirasi dan kesegaran baru. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengisi waktu senggang adalah wisata.

Orang-orang melakukan wisata hanya terbatas kesumber sumber air panas (*spa*) yang berada di daerah atau negara tertentu saja, kini para pendamba wisata tersebut telah terbuka mata hati dan wawasannya. Mereka tidak hanya melakukan wisata di kota, di propinsi atau di negaranya saja, namun telah banyak berkunjung ke negara lain, menjelajahi benua dan bahkan mengelilingi bumi ini. Semua ini mereka lakukan tak lain adalah untuk mencari sesuatu yang berbeda, mencari inspirasi, dan kesegaran baru.

Memahami apa yang dilakukan seseorang saat ini dan apa yang mereka harapkan dari sebuah wisata, maka tidak berlebihan kiranya bila dikatakan wisata telah menjadi salah satu tumpuan, harapan wisata modern untuk untuk memenuhi salah satu kebutuhannya. Kenyataan ini akan dijadikan landasan berpikir, untuk mengemas wisata secara menarik yang berisi racikan yang manis

sehingga mereka yang membuka dan menikmatinya akan merasa puas (walaupun sebenarnya kepuasan itu adalah sesuatu yang abstrak).masalahnya sekarang bagaiman mengaktualisasikan landasa berpikir tersebut sehingga apa yang diharapkan oleh orang dalam keikut sertaan pada sebuah wiasata dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Inti masalah sebagaimana yang diungkap diatas pada dasarnya bagaimana meramu dan mengemas wisata, sehingga menarik dan memenuhi harapan pelaku wisata. Tetentunya diperlukan pengetahuan, baik tentang bahan, tekhnik maupun pegetahuna penunjang lain.

6.2. Hakikat Perencanaan Wisata

Perencanaan *Planning* merupakan fungsi manajemen pertama dan mendasar, yang menjadi titik awal bagi fungsi fungsi berikutnya. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha membuat rencana membuat intisari yang lengkap dan terperinci mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk dikerjakan dan bagaiman melaksanakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Adapun defenisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

1. G.R.Terry

Planning adalah pemilihan fakta fakta dan usaha menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa depan yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. H. koontz & O'Donnel

Perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari alternatif, kebijaksanaan, prosedur dan program.

3. W.H. Newman

Perencanaan adalah pengambilan keputusan pendahuluan atas apa yang akan dilakukan.

Dari defenisi defenisi tersebut, ditarik kesimpulan, bahwa perencanaan adalah kegiatan yang menggambarkan di muka untuk hal hal jang akan dikerjakan kemudian. Inti perencanaan adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang.

Perencanaan bukanlah sekedar persiapan, akan tetapi merupakan proses persiapan, akan tetapi, merupakan proses kegiatan secara terus menerus mengikuti mewarnai kegiatan sampai pada tujuan.

Perencanaan bahkan dapat dapat dijadikan sebagai alat evaluasi yang hasilnya di harapkan dapat di gunakan untuk masukan bagi perancangan kegiatan selanjutnya.

Jika perencanaan secara umum memiliki pengertian dan pola pikir sebagaimana tersebut diatas, maka perencanaan wisata pada hakikatnya adalah kegiatan untuk memberikan bayangan atau gamabran atas wisata yang diselenggarakan. Hakikat yang dikandung dalam perencanaan wisata secara garis besar sama dengan perencanaan pada umumnya, hanya saja tekhnis memiliki aspek yang penting.

6.3. Manfaat Perencanaan Wisata

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, perencanaan memiliki peranan yang penting untuk mencapai tujuan. Demikian halnya dengan perencanaan wisata. Banyak hal yang perlu dipikirkan masak-masak sebelum orang melakukan wisata, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Seberapa besar pentingnya perencanaan dalam sebuah wisata, dapat diamati dalam manfaatnya antara lain:

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan wisata
2. Sebagai sarana untuk memprediksi kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan sekaligus alternatif pemecahannya.
3. Sebagai sarana untuk megarahakan penyelenggaraan wisata sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan wisata secara efektif dan efisien.
4. Sebagai alat ukur tingkat keberhasilan wisata sebagai upaya pengawasan atau evaluasi dalam rangka memeberikan umpan balik bagi peneyelenggaraan wisata selanjutnya.

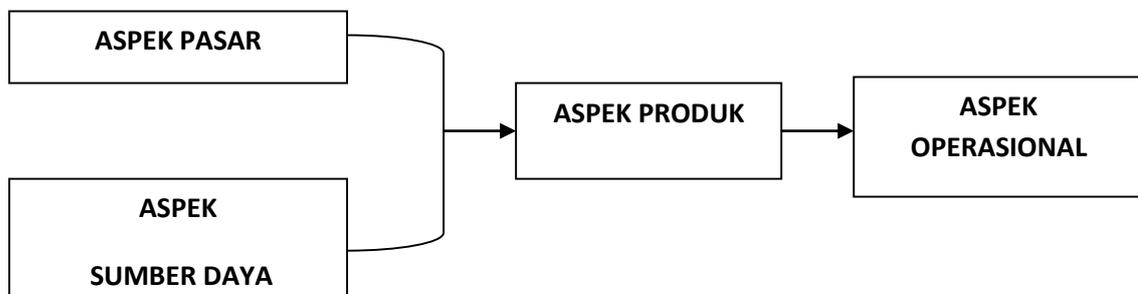
6.4. Aspek-Aspek Perencanaan Wisata

Istilah perencanaan wisata masih memiliki pengertian yang universal, untuk itu perlu adanya pemahaman akan aspek-aspek apa saja yang dibicarakan dalam perencanaan wisata. Aspek aspek ini merupakan bahan kajian yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kegaitan perencanaan wisata.

Aspek tersebut meliputi.

1. Aspek pasar, menyangkut kondisi pasar serta kebutuhannya.
2. Aspek sumber daya alam, antara lain:
 - a. saran dan prasarana
 - b. sarana sumber daya manusia
3. Aspek produk berkaitan dengan upaya meramu mengemas produk wisata, yang berintikan:
 - a. Penyusunan program
 - b. Penghitungan harga
 - c. Penentuan kebijaksanaan produk
4. Aspek operasional, menyangkut kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan produk wisata yang terdiri atas.
 - a. Kegiatan pra penyelenggaraan
 - b. Kegiatan selam penyelenggaraan
 - c. Kegaitan pasca peneyelenggaraan.

Keempat aspek perencanaan tersebut dapat dilustrasikan dengan bagan sebagai berikut.



Gambar 2. Bagan Aspek-Aspek Pariwisata

Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa aspek pasar yang dipadu dengan sumber daya manusia akan tercipta produk, kemudian dilakukan tindak lanjut berupa perlakuan terhadap produk tersebut melalui kegiatan operasional. Pembahasan lebih lanjut lebih ditekankan kepada perencanaan produk.

6.5. Perencana Wisata (*Tour Planner*)

Perencanaan wisata adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan sebuah wisata. Peranan *Tour Planner* dapat digambarkan sebagai seorang datang dari sebuah pertunjukan wayang kulit. Ia mengatur alur cerita dan dia pula yang sebagian besar menentukan menarik tidaknya sebuah pertunjukan.

Karena demikian beratnya tugas yang harus dilakukan oleh seorang perencana wisata, maka seorang perencana wisata yang baik seyogianya memenuhi syarat syarat tersebut antara lain sebagai berikut.

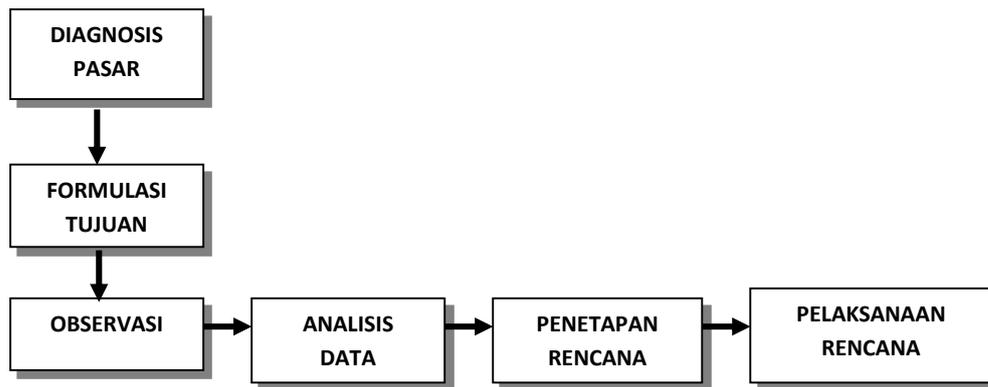
1. Dapat berpikir secara logis, kreatif dan reflektif.
2. Sabar, teliti, dan penuh kehati hatian
3. memiliki pengalaman atas wisata yang akan diselenggarakan.
4. mengetahui kondisi yang sebenarnya atas komponen yang terlibat dalam wisata.
5. memiliki visi dan imajinasi yang kuat.
6. memiliki pengetahuan yang luas, baik produk maupun teknik perencanaan.

Dengan memahami beberapa persyaratan diatas, tampak bahwa tugas yang akan diemban oleh seorang perencana wisata berkaitan erat dengan dengan kegaitan pemikiran akan berlangsungnya sebuah kenyataan dalam wujud penyelenggaraan wisata.

6.6. Tahap Tahap Perencanaan Wisata

6.6.1. Tahap-Tahap Perencanaan dan Hubunganya dengan Aspek-Aspek Perencanaan Wisata

Perencanaan yang baik bukanlah sekadar khayalan tanpa dasar. Perencanaan merupakan pemikiran terhadap kegiatan dimasa mendatang yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan data-data yang akurat, untuk itu dalam melakukan perencanaan wisata perlu dipahami tahapan-tahapan seperti pada bagan berikut:



Gambar 3. Tahap-Tahap Perencanaan Wisata

Dari bagan diatas dijelaskan:

1. Diagnosis Pasar

Meneliti pasar dengan melihat gejala gejala yang muncul dilakukan pada tahap pertama dalam perencanaan wisata karena karakteristik penyusunan produk wisata harus *consumer oriented*. Diagnosis asar pada hakikatnya dilakuan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan pasar.

2. Formulasi tujuan.

Pengetahuan yang di dapat dari hasil diagnosis pasar dipakai sebagai dasar untuk merumuskan tujuan. Rumusan tujuan ini pada dasarnya adalah hipotesis akan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan tujuan tak lain rumusan wisata yang akan diselenggarakan.

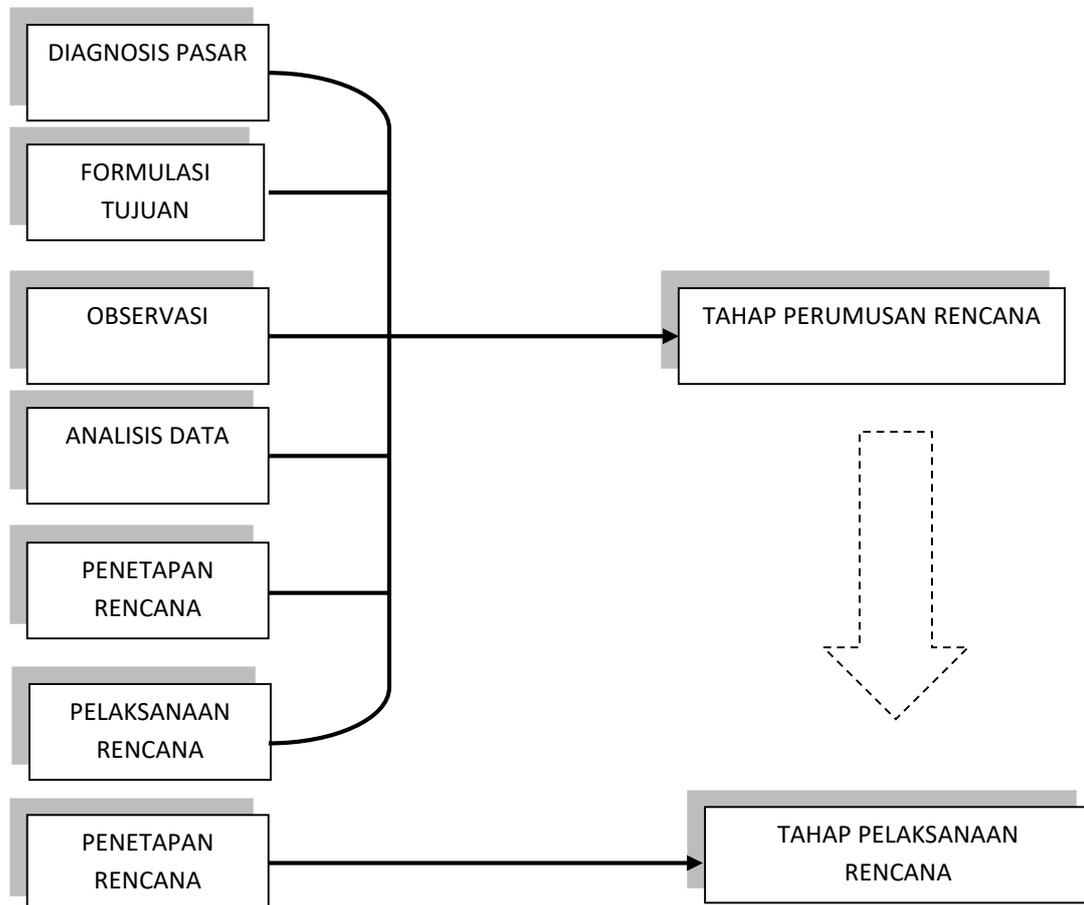
Tujuan yang dirumuskan itu harus dapat menjawab pertanyaan yang sudah umum dikenal dengan rumusan 5 W1 H, yaitu:

- a. Apa (*what*), wisata apa yang akan disusun,
- b. Mengapa (*why*) mengapa wisata disusun,
- c. Siapa (*who*), siapa saja yang akan terlibat dalam wisata tersebut,
- d. Kapan (*When*), kapan wisata tersebut diselenggarakan,
- e. Di mana (*where*), di mana wisata itu diselenggarakan, dan
- f. Bagaimana (*how*), bagaimana wisata itu diselenggarakan

3. Observasi

Observasi pada dasarnya adalah pengejawantahan tujuan yang telah dirumuskan, dan menghubungkan antara hipotesis dan kenyataan di lapangan.

Hal-hal yang diobservasi adalah seluruh masalah yang dipertanyakan dalam rumusan tujuan. Untuk memperlancar pelaksanaan tahap ini maka digunakan instrumen-instrumen tertentu.



Gambar 4. 3Klasifikasi Tahap-Tahap Perencanaan

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam kegiatan observasi diolah dan dianalisis.

Analisis data dimaksudkan untuk:

- a. menentukan strategi pencapaian tujuan.
- b. mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam proses pencapaian tujuan, dan
- c. mencari alternatif-alternatif yang mungkin dapat ditempuh.

5. Penetapan Rencana.

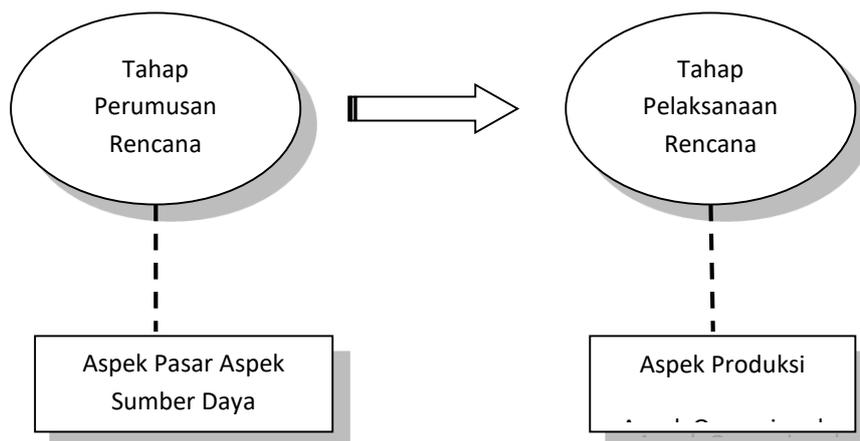
Hasil analisis dipakai sebagai dasar melakukan revisi terhadap hasil tujuan. Perbaikan dan olahan ini yang pada akhirnya menghasilkan rencana yang akan dilaksanakan.

6. Pelaksanaan Rencana.

Pelaksanaan rencana merupakan tahap akhir dalam perencanaan wisata. Pelaksanaan rencana adalah kegiatan nyata dalam mengawali dan memantau pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Keenam tahap diatas jika diklasifikasikan akan tampak seperti bagan berikut :

Tahap perencanaan wisata harus mengacu pada aspek-aspek yang direncanakan. Keterkaitan antara keduanya dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:



Gambar 5. Hubungan Antara Aspek-Aspek Wisata dengan Tahap-Tahap Perencanaan Wisata

Aspek pasar dan sumber daya merupakan bahan dasar bagi pencapaian tujuan. Dua komponen inilah yang diolah sejak awal, yang selanjutnya dikombinasikan sebagai dasar penciptaan produk, untuk merencanakan langkah-langkah operasional yang akan di tempuh.

6.7. Instrumen Observasi

Dalam melakukan observasi atas tujuan yang telah di rumuskan, dapat digunakan instrument-instrumen berikut:

1. Inventarisasi Atraksi Wisata

Instrumen ini di gunakan sebagai sarana menginventarisasi objek dan atraksi wisata, maupun bentuk-bentuk hiburan yang dipakai sebagai komponen dalam penyelenggaraan wisata. Bentuk instrumen ini sebagai berikut:

Format 1

Inventarisasi Antraksi Wisata

Disiapkan untuk :(a)

Durasi :(b)

No	Nama Objek/antraksi	Ciri khas	Uraian singkat	D/N *)	E.t.c	Tiket masuk	Donasi	Ket
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)

Dihimpun oleh :

Keterangan :

*) waktu kunjungan (D), malam (N)

***) perkiraan lama kunjungan yang ideal (*estimasi time consumed*)

Keterangan:

- Nama *tur* atau *group*
- Waktu yang diperlukan untuk penyelenggaraan wisata tersebut.
- Nomor urut
- Nama atraksi wisata atau iburan.
- Ciri-ciri khusus atraksi wisata
- Penjelasan atraksi wisata atau hiburan secara singkat
- Waktu kunjungan yang dapat dilakukan: siang dari (*D/day*) atau malam hari (*N/Night*) atau bisa kedua-duanya
- Perkiraan waktu yang diperlukan untuk kunjungan
- Biaya masuk yang dikenakan per orang
- Sumbangan sukarela atau ditentukan, dihitung per *group*

- k. Keterangan diisi hal-hal khusus yang menjadi perhatian, juga dapat digunakan untuk memberi tanda dipakai atau tidaknya atraksi wisata atau hiburan tersebut dalam program.

2. Inventarisasi fasilitas wisata

Instrumen ini digunakan sebagai sarana untuk menginventarisasi fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan wisata, antara lain sarana transportasi, akomodasi, dan restoran. Bentuk instrumen tersebut sebagai berikut:

Format 2

Inventarisasi Fasilitas Wisata

Disiapkan untuk :(a) Durasi : (c)

Jumlah peserta :.....(b) Tanggal : (d)

No	Nama Fasilitas	Jarak (km)	Dari (kota)	Fasilitas	Kapasitas	Tarif	ket
(e)	TRANSPORTASI	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
(f)....						
						
	AKOMODASI						
						
						
	RESTORAN						
						
						

Dihimpun oleh:.....

Keterangan :

- a. Nama *tur* atau *group*
- b. Jumlah peserta
- c. Lama penyelenggaraan
- d. Tanggal penyelenggaraan
- e. Nomor urut
- f. Nama masing-masing fasilitas
- g. Jarak yang dinyatakan dalam kilometer
- h. Nama kota atau tempat tertentu sebagai patokan jarak (g), biasanya adalah hotel tempat menginap atau pusat kota
- i. Fasilitas yang dimiliki
- j. Kapasitas atau daya tampung (tempat duduk atau jumlah kamar)
- k. Harga
- l. Keterangan diisi hal-hal khusus yang menjadi perhatian, juga digunakan untuk memberi tanda dipakai atau tidaknya fasilitas tersebut dalam program.

**BAB
7****KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN NASIONAL****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan nasional.

7.1. Strategi Pengembangan Kepariwisata Nasional

Strategi pengembangan kepariwisataan bertujuan mengembangkan produk dan pelayanan berkualitas, seimbang dan bertahap.

Langkah pokok :

1. Dalam jangka pendek dititik beratkan pada optimalisasi, terutama untuk :
 - a. Mempertajam dan memantapkan citra pariwisata
 - b. Meningkatkan mutu tenaga kerja
 - c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan
 - d. Memanfaatkan produk yang ada
 - e. Memperbesar saham dari pasar yang telah ada.
2. Dalam jangka menengah di titik beratkan dalam konsolidasi terutama dalam
 - a. Memantapkan citra kepariwisataan nasional
 - b. Mengkonsolidasikan kemampuan pengelolaan.
 - c. Mengembangkan dan diversifikasi produk
 - d. Mengembangkan jumlah dan mutu tenaga kerja.
3. Dalam jangka panjang dititik beratkan pada pengembangan dan penyebaran dalam :
 - a. Pengembangan kemampuan pengelolaan.
 - b. Pengembangan dan penyebaran produk pelayanan.
 - c. Pengembangan pasar pariwisata baru
 - d. Pengembangan mutu dan jumlah tenaga kerja.

7.2. Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata

1. Promosi.

Promosi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan upaya pemasaran. Promosi pariwisata harus dilaksanakan selaras dan terpadu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Aksesibilitas.

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung pengembangan pariwisata, karena menyangkut pengembangan lintas sektoral.

3. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam mengembangkan pariwisata.
- b. Memperbesar dampak positif pembangunan
- c. Mempermudah pengendalian terhadap dampak lingkungan

4. Wisata bahari

Wisata bahari merupakan salah satu jenis produk wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan jenis wisata ini memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi terhadap produk wisata sejenis di luar negeri.

5. Produk Wisata

Upaya untuk dapat menampilkan produk wisata yang bervariasi produk wisata dan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi.

6. Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia ini harus memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk, memberikan jasa pelayanan pariwisata.

7. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Kampanye nasional sadar wisata pada hakikatnya adalah upaya memasyarakatkan Sapta Pesona yang turut menegakkan disiplin nasional dan jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan. kepariwisataan.

7.3. Pola Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata

1. Kebijaksanaan umum

Pola kebijaksanaan umum ini meliputi:

- a. Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran serta pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- b. Kebijakan pengembangan industri pariwisata.
- c. Kebijakan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, taman rekreasi dan hiburan umum.
- d. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana.
- e. Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara arus wisatawan kemampuan menampung, melayani dan menyelenggarakan kepariwisataaan.
- f. Kebijakan pengelolaan.
- g. Kebijakan pembinaan.
- h. Kebijakan hukum.

2. Arah Pola Kebijaksanaan pengembangan Jalur Wisatawan

Pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan diarahkan kepada pengembangan jalur wisatawan mancanegara dan nusantara yang sekaligus dapat meningkatkan jumlah diversifikasi paket wisata yang didasarkan pada perkembangan objek wisata.

3. Pola Kebijakan Pengembangan Objek Wisata

Pola kebijakan objek wisata meliputi:

- a. Prioritas pengembangan objek
- b. Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan
- c. Meningkatkan kegiatan penunjang objek wisata.

4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi :

- a. Akomodasi.
- b. Restoran.
- c. Usaha rekreasi dan hiburan umum.
- d. Gedung pertemuan.
- e. Perkemahan.

- f. Pondok wisata.
 - g. Mandala wisata.
 - h. Pusat informasi wisata
 - i. Pramuwisata.
5. Pola Kebijakan Pengembangan Pemasaran
Pola Kebijakan pemasaran berpedoman kepada:
- a. Peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan.
 - b. Meningkatkan kerja sama yang terpadu antara berbagai sektor.
 - c. Mempercepat perkembangan pasar wisata domestik.
6. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan, meliputi :
- a. Penyerahan urusan kepariwisataan
 - b. Pemantapan kedudukan lembaga pemerintah daerah.
 - c. Peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas.
 - d. Pertimbangan jenis dan kelas lembaga
 - e. Kemampuan bekerja sama
7. Kebijakan Pengembangan Industri
Penanaman modal diarahkan pada :
- a. Penyerahan tenaga kerja, peningkatan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia.
 - b. Pengembangan struktur industri dengan prioritas pada usaha untuk menghasilkan barang ekspor non-migas.
 - c. Peranan sebagai wahana pengembangan teknologi dan memacu pertumbuhan/perkembangan daerah

7.4. Perkembangan kepariwisataan.

Prospek perkembangan kepariwisataan di kawasan Asia Pasifik sangat baik. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan ini yang terhitung paling tinggi di dunia. Dengan demikian Pacific Rim merupakan kawasan yang paling menjanjikan. pada dekade 2000-an

Putaran Uruguay, APEC, AFTA dan ASEM merupakan kesepakatan multilateral politik dan perdagangan yang akan menciptakan

globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Globalisasi telah merombak format politik pembangunan kepariwisataan di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Terobosan teknologi di segala bidang telah mempengaruhi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Demikian juga dengan konsep-konsep dan teori tentang pemberdayaan sumber daya manusia pariwisata, yang telah diberlakukan antara lain dengan pendekatan sosiologi. Interaksi sosioologis dalam pengembangan kepariwisataan mengakibatkan timbulnya eksternalitas positif maupun negatif. Oleh karena itu pendekatan multidisiplin harus diberlakukan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang semakin kompleks.

Agar Indonesia mampu menghadapi persaingan intraregional maupun internasional, maka peran pemerintah sebagai pelaku dan fasilitator dipandang sangat perlu untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan mengikutsertakan dan mengoptimalkan para pelaku pembangunan (*stakeholders*) di sektor ini. Dengan demikian diharapkan tercipta produk wisata yang berdaya saing tinggi.

Konsep *community based planning* merupakan alternatif yang dapat diterapkan secara konsisten dan terarah bagi 25 daerah tujuan wisata yang tersebar di tanah air. Sesuai dengan konsep tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijaksanaan pokok yang mempunyai pengaruh terbesar bagi konstelasi kepariwisataan nasional, yaitu dengan ditetapkannya 15 negara sebagai pasar utama kepariwisataan Indonesia dengan segala bentuk implikasinya, yang pada kenyataannya kurang menguntungkan karena belum menggambarkan segmen yang spesifik dan terurai secara psikografis. Dengan demikian prinsip segmentasi *posteriori* belum dapat diberlakukan bagi kepariwisataan Nasional. Kebijakan kepariwisataan yang adapun belum dapat dioperasikan dengan baik oleh para pelaku kepariwisataan nasional, baik oleh sektor publik maupun swasta di daerah.

Bersandar pada fakta tersebut maka diperlukan *reorientation* segmentasi pasar kepariwisataan nasional melalui penerapan konsep

kesesuaian produk dan pasar (*product-market matching*) untuk menuju kepada *consumer solution* sebagai awal revitalisasi kebijaksanaan pemasaran pariwisata nasional.

7.5. Isu-Isu Kepariwisata

Kepariwisata Indonesia telah ditargetkan sebagai sektor andalan. Dengan ditetapkannya target tersebut, maka pembangunan Indonesia akan diharapkan mampu akan dijalankan secara optimal melalui otonomi daerah, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990.

Di samping itu, terdapat suatu strategi pembangunan kepariwisataan Indonesia menjadi 2 kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bappenas alasan pembagian ini agar dapat menciptakan produk wisata secara utuh, memiliki daya saing tinggi.

Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, Indonesia banyak memiliki peluang dan tantangan yang kalau dilihat sebagai suatu totalitas memiliki posisi yang semakin kuat karena adanya diferensiasi produk yang cukup banyak. Namun dari 25 daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia, konsentrasi pembangunan kepariwisataan hanya terjadi di beberapa daerah tujuan saja seperti Bali, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Pemerintah memberi dukungan dalam pembinaan dan pengelolaan pariwisata daerah melalui PP No 24 Tahun 1979, yakni mengenai pemberian otonomi daerah, walau kenyataannya kinerja pembinaan dan pengelolannya belum terwujud secara optimal.

Adapun beberapa kenyataan yang di hadapi Indonesia saat ini yang berkaitan dengan kepariwisataan yakni :

1. Pada peta kekuatan intraregional, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Singapura dan Thailand. Indonesia masih merupakan daerah tujuan wisata kedua setelah Malaysia, Singapura dan Thailand.

2. Teknologi informasi telah mengubah format produk dan pola kepariwisataan dunia. Contohnya yakni adanya internet.
3. Adanya AFTA, APEC, dan ASEM memberikan warna baru dalam format politik pembangunan kepariwisataan dunia.
4. Faktor migrasi dan transfer tenaga kerja terampil dan ahli dari negara-negara maju akan melanda negara-negara berkembang. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap tenaga kerja lokal akibat lemahnya sumber daya manusia kepariwisataan Indonesia.

Menyadari kondisi tersebut maka diperlukan konsep mengantisipasi hal hal diatas. Salah satu konsep yang dipakai adalah *Value Creation* yang di tetapkan oleh C.K. Achalad. Pada konsep ini terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam penegembangan pariwisata, yang menjadi tanggung jawab semua insan pariwisata, termasuk di dalamnya institusi pendidikan. Ketiga aspek itu adalah *performance gap, ability gap, dan opportunity gap*. Dalam aplikasinya terhadap kepariwisataan Indonesia, hal-hal yang perlu dilakukan , yakni :

1. Mengadakan rekstruktrurisasi sumber daya manusia pariwisata mengingat kurangnya kinerja instansi berwenang dalam membina dan meneglola kepariwisataan daerah.
2. Mengadakan rekonfigurasi produk-produk pariwisata Indonesia melalui pembangunan kawasan KBI dan KTI. Hal ini dilakukan unutm mempertajam, *image* Indonesia di pasar kepariwisataan internasional.
3. Mengadakan revitalisasi strategi pengembangan kepariwisataan baik di tingakt daerah maupun nasional.

7.6. Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kepariwisataan Indonesia di Masa Datang

1. Diperlukan penerapan *Community Based Planning* untuk dapat menggerakkan para pelaku kepariwisataan di daerah, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Dibutuhkan tindakan untuk merancang sistem informasi pasar sebagai dasar serta arahan yang berguna bagi pelaku pasar wisata nasional guna menentukan strategi pemasaran yang sesuai.

3. Penerapan konsep *Product-Marketing Matching* melalui pelaksanaan segmentasi *posteriori* pada daerah tujuan wisata baik di KBI maupun di KTI melalui peningkatan kemampuan dan peran serta *stakeholder* pariwisata pada seluruh tingkatan.
4. Dibutuhkan tindakan proaktif untuk memanfaatkan momentum kerja sama internasional yang telah terbentuk, seperti Indonesia- Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) untuk meningkatkan kepariwisataan.
5. Adanya kesenjangan pertumbuhan antara KBI dan KTI membutuhkan campur tangan pemerintah dalam mengatur mekanisme kepariwisataan regional melalui penerapan orientasi baru kebijaksanaan (pemasaran) kepariwisataan regional yang mampu menyentuh setiap daerah tujuan wisata secara merata.
6. Bersandar pada perbedaan tipologi produk dan pasar, pelaksanaan strategi penempatan (*positioning*) bagi daerah tujuan wisata di KBI dan KTI harus perpedoman pada basis penciptaan nilai baru (*value creation*) yang disesuaikan dengan harapan, minat, dan penempatan pasar (*market place*) guna menampilkan nilai-nilai kompetitif yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata.
7. Untuk mempercepat terbentuknya citra tunggal (*single image*) daerah tujuan wisata, maka perlu pemberlakuan pengelompokan daerah tujuan wisata yang dapat menggabungkan produk unggulan yang memiliki kedekatan profil.
8. Strategi pemasaran yang diberikan oleh pusat hendaknya mampu diterjemahkan sampai tingkat yang lebih rendah, termasuk daerah tujuan wisata.

**BAB
8****EKOWISATA**

Tujuan Instruksional Khusus :

Untuk mengetahui latar belakang lahirnya ekowisata dan konsep ekowisata

8.1. Dari Pariwisata Massal Konvensional Ke Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata telah berkembang menjadi sektor yang lebih besar karena memiliki *linkages* yang luas termasuk akomodasi, restoran, biro perjalanan maupun transportasi. Perkembangan yang cukup pesat di sektor ini seringkali menimbulkan kritik yang cukup tajam. Kontraversi lebih berfokus kepada munculnya dampak negatif dari kegiatan pariwisata secara ekologis, sosial ekonomi dan budaya. Hal ini disebabkan karena pariwisata yang berkembang lebih bersifat massal, tidak ramah lingkungan dan mengabaikan keberadaan penduduk lokal. Perkembangan pariwisata konvensional dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:

8.1.1. Aspek Ekologi

Pariwisata konvensional mengakibatkan perubahan setting lokasi wisata (*landscape*), perubahan ekosistem maupun berkurangnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini disebabkan oleh fokus pariwisata konvensional yang menitikberatkan pada keuntungan ekonomi. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang berarti peningkatan keuntungan ekonomi yang diterima. Hal ini mendorong pembangunan fasilitas wisata yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan walaupun terkadang tidak ramah lingkungan dan mengabaikan keberadaan penduduk lokal.

8.1.2 Aspek Ekonomi

Pariwisata Sebagai Sumber Devisa Negara Yang Cukup menguntungkan merupakan pertimbangan utama pengembangan wisata di negara-negara berkembang. Namun demikian keuntungan ekonomis yang diharapkan tidak dapat diterima secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak fasilitas/barang dan infrastruktur yang dibutuhkan dari perkembangan wisatawan harus diimpor dari negara maju seperti *escalator*, *lift*, bahan makanan import. Fenomena tersebut sering disebut *the holiday money boomerang* (Mas'ood, 1994). Secara makro keuntungan ekonomi yang diterima hanya semu, karena penerimaan dalam bentuk valuta asing jauh lebih sedikit

dari yang dibelanjakan ke luar negeri untuk pembelian fasilitas tersebut. (Fennel,1999; Mochtar Mas'oeed, 1994)

Selain itu terjadi peningkatan inflasi di lokasi wisata. Hal ini di sebabkan karena pelaku bisnis menetapkan harga yang sama untuk wisatawan asing dan penduduk lokal yang berimplikasi pada peningkatan biaya hidup penduduk lokal. Kondisi ini makin lama akan memarjinalkan penduduk lokal (Hitchcock,1993).

8.1.3 Aspek Sosial Budaya

Dampak Pariwisata Terhadap terhadap aspek sosial budaya terkadang kurang diperhatikan. Pariwisata menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan hidup masyarakat yang berdampak pada marjinalisasi penduduk. Selain itu, terjadi infiltrasi budaya asing yang menjadi gangguan budaya lokal karena budaya asing yang masuk terkadang tidak sesuai dengan budaya setempat seperti pemakaian bahasa gado-gado(Inggris-Indonesia) sebagai bahasa pergaulan, serta gaya hidup yang sangat berbeda (pemakaian alkohol dan narkoba serta seks bebas).

Kondisi tersebut membuat keinginan pihak-pihak yang peduli lingkungan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan yang dapat memberi manfaat kepada penduduk lokal. Oleh karena itu pariwisata berkelanjutan selain memenuhi tuntutan ekologis juga harus memenuhi tuntutan secara ekonomis dan sosiokultural.

8.2. Konsep dan Defenisi Ekowisata Sebagai Bagian dari Pariwisata Berkelanjutan.

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yakni kegiatan wisata yang mempertemukan kegiatan pengunjung dan penerima dengan menjaga kesempatan bagi generasi mendatang untuk dapat pula ikut menikmati wisata itu. Untuk itu diperlukan sebuah pengelolaan tertentu atas lingkungan dan sumber daya yang tersedia agar dapat memenuhi kepentingan ekonomi, sosial dan estetika dan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologis yang penting, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. (WTO, 2002).

Pembangunan wisata yang berkelanjutan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sosial ekologis berkelanjutan

Pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata.

2. Secara sosial dapat diterima

Mengacu kepada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan pariwisata) tanpa menimbulkan konflik sosial.

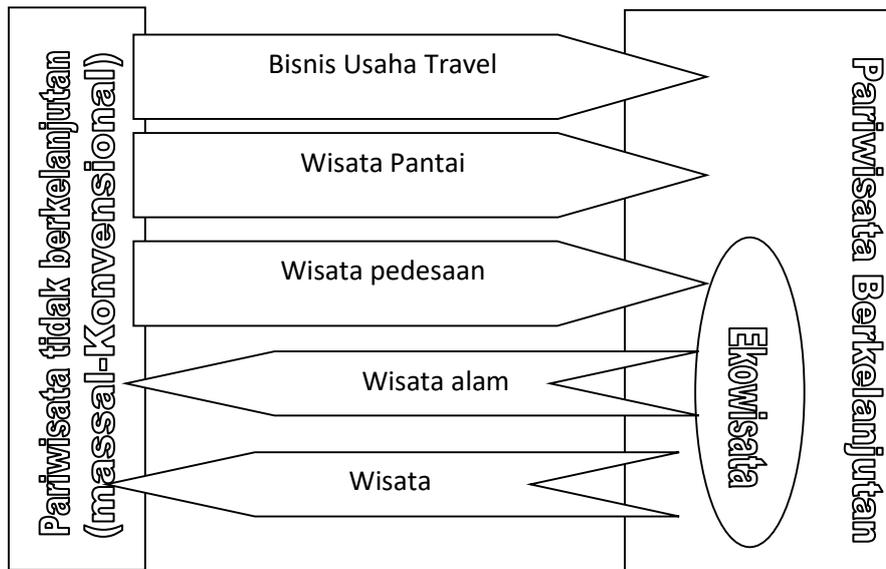
3. Secara kebudayaan dapat diterima

Penduduk lokal mampu beradaptasi dengan budaya turis yang cukup berbeda (*tourist culture*).

4. Secara ekonomi menguntungkan

Keuntungan ekonomi yang didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa kategori diatas, kemudian jenis wisata yang berkembang lebih lanjut disebut ekowisata. Perkembangan ekowisata merupakan tuntutan lebih dari pencinta lingkungan bahwa kegiatan wisata seharusnya tidak hanya memperkecil dampak dampak negatif terhadap lingkungan tetapi harus pula melibatkan kegiatan konservasi. Oleh karena itu walaupun pengertian ekowisata cukup bervariasi, namun disepakati bahwa ekowisata merupakan bagian kecil dari pariwisata berkelanjutan karena sifatnya yang lebih spesifik. Untuk lebih jelas tentang posisi ekowisata dalam pariwisata berkelanjutan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6. Ekowisata Sebagai Bagian dari Konsep Pembangunan Berkelanjutan

8.3. Peluang Pengembangan Ekowisata

Obyek wisata yang memiliki potensi alam dan budaya yang menarik memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan ekowisata. Secara khusus pengembangan ekowisata memiliki beberapa prinsip yaitu:

- *Prinsip pertama* yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekowisata adalah kegiatan wisata yang memberikan dampak negatif paling minimum pada lingkungan
- *Prinsip kedua*, menyebutkan bahwa kegiatan wisata dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik bagi pengunjung maupun penduduk lokal pada ekosistem dan budaya setempat.
- *Prinsip Ketiga*, semua elemen kegiatan ekowisata mempunyai kontribusi langsung terhadap kegiatan konservasi.
- *Prinsip Keempat*, memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan wisata.
- *Prinsip kelima*, ekowisata dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat/penduduk lokal.
- *Prinsip Keenam*, berfungsi sebagai lahan untuk pendidikan dan penelitian penduduk lokal maupun pengunjung

8.4. Kendala Pengembangan Ekowisata.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni : kendala struktural, kendala eksternal, dan kendala internal.

8.4.1. Kendala Struktural

Kendala struktural adalah kendala yang berhubungan dengan kelembagaan (pemahaman aparat tentang konsep dan defenisi ekowisata serta kordinasi antar instansi), kebijakan serta regulasi internasional. Kendala struktural yang paling dominan adalah adanya tumpang tindih antara kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan peraturan pariwisata terutama ekowisata. Tumpang tindih tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yakni adanya kebijakan yang menekankan kepada pengembangan kawasan menjadi lokasi ekowisata dan pengelolaannya dilakukan oleh kementerian pariwisata, seni dan budaya berdasarkan rekomendasi dari kementerian kehutanan, menteri perikanan dan kelautan, menteri lingkungan hidup dan menteri kimpanswil. Namun demikian pada era otonomi hal tersebut akan sulit direalisasikan karena pemerintah daerah merasa memillki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri.

8.4.2. Kendala Internal

Kendala internal meliputi sumber daya manusia seperti pengetahuan operator pariwisata tentang pelestarian lingkungan dan partisipasi penduduk lokal dalam pengelolaan ekowisata, kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi objek wisata untuk dikembangkan sebagai lokasi ekowisata.

Dari sisi sumberdaya manusia, kendala yang paling mendasar adalah pemahaman akan konsep ekowisata yang dimiliki oleh stakeholders yang masih terbatas dan bervariasi. Kendala internal lainnya yang berkaitan dengan SDM yang bergerak di sektor wisata, antara lain pemandu wisata dan pekerja biro perjalanan. Kendala lainnya adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata yang masih terbatas.

8.4.3. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang mempengaruhi perkembangan ekowisata antara lain yang berasal dari luar elemen kepariwisataan, seperti kondisi keamanan, politik, dan kualitas perilaku pengunjung.

8.5 Bagaimana Membangun Ekowisata?

Membangun ekowisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, diperlukan adanya sistem penegelolaan ekowisata terpadu. Sistem ini melibatkan adanya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang mampu mengintegrasikan semua kepentingan *stakeholders*, seperti, pemerintah masyarakat lokal, pelaku bisnis, peneliti akademisi, wisatawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan secara fisik adalah ketersediaan sarana pendukung dan aksesibilitas di lokasi wisata. Perencanaan yang terpadu merupakan *master plan* untuk membangun *eco-destination* ekowisata. Master plan harus berisi kerangka kerja, *stakeholders* yang terkait (lokal, regional, nasional) dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders* untuk kegiatan konservasi lingkungan, peningkatan ekonomi lokal dan apresiasi budaya lokal. Beberapa karakteristik dari *eco-destination* sebagai berikut: (Wood, 2002).

- Keslian alam terpelihara dengan pemanfaatan yang terjaga.
- Pembangunan *landscape* tidak mendominasi
- Pemanfaatan bisnis lokal dalam skala kecil, termasuk warung makan dan kerajinan tangan
- Pembuatan zonasi untuk kegiatan rekreasi seperti jalur untuk sepeda, pejalan kaki untuk dimanfaatkan oleh penduduk lokal maupun wisatawan.
- Interaksi bersahabat antara pengunjung dan penduduk lokal di lokasi wisata.
- Pembuatan fasilitas publik yang bersih dan terjaga baik fasilitas MCK (Mandi-Cuci-Kakus) yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk lokal maupun wisatawan.

Tanggung jawab masing-masing *stakeholders* bervariasi, pemerintah bertanggung jawab dalam koordinasi pembuatan perencanaan, pembuatan

kebijakan-kebijakan peraturan, zonasi dan pembangunan lokasi wisata tersebut. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan sarana telekomikasi, sarana air bersih dan sistem pembuangan sampah.

Dari aspek ekologi, perencanaan pengukuran daya dukung lingkungan sangat penting sebelum lokasi dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Daya dukung lingkungan akan merepresentasikan kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan ekowisata seperti penyediaan air bersih, penataan lahan dan keanekaragaman yang hayati yang dimiliki daerah ekowisata.

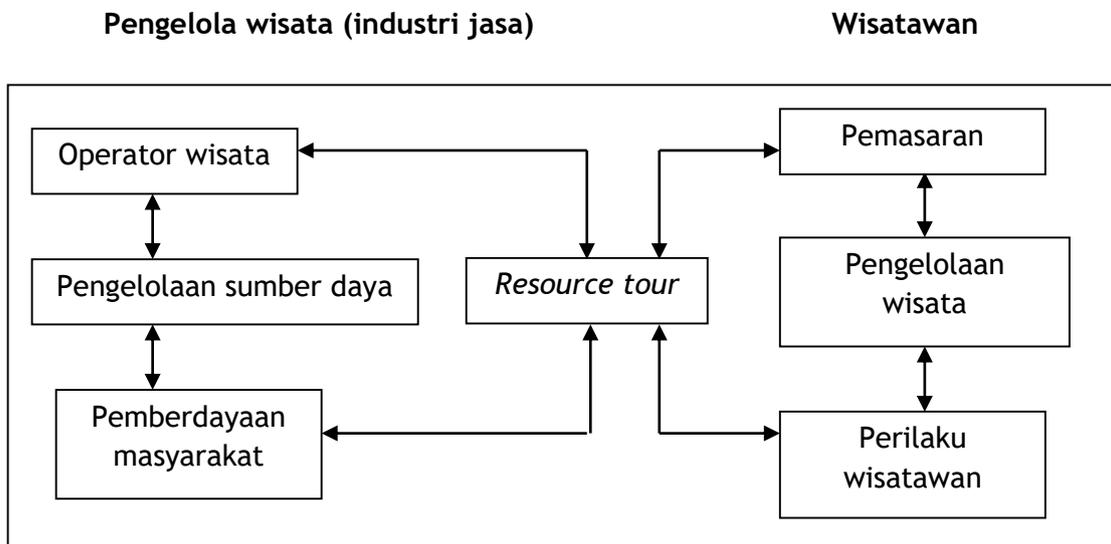
Secara ekonomis, suatu perencanaan pengembangan ekowisata harus memasukkan perhitungan biaya dan manfaat dari pengembangan ekowisata. Dalam perhitungan biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) tidak hanya dijelaskan keuntungan ekonomi yang akan diterima oleh pihak terkait namun juga biaya yang harus ditanggung seperti biaya konservasi atau preservasi lingkungan.

Secara sosial budaya, perencanaan harus memasukkan kondisi sosial-budaya lokal masyarakat yang dapat dikembangkan dalam kegiatan ini serta kemungkinan dampak negatif yang akan diterima serta cara mengatasinya.

Keberhasilan ekowisata tergantung kepada beberapa hal, yakni : internal, eksternal, dan struktural. Faktor internal dapat diklasifikasikan sebagai potensi daerah dalam pengembangan ekowisata tentang pelestarian lingkungan serta partisipasi penduduk lokal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lokasi ekowisata seperti kesadaran penduduk akan kelestarian lingkungan, kegiatan penelitian pendidikan di wilayah ekowisata untuk kelestarian lingkungan dan masyarakat lokal. Sedangkan faktor struktural faktor yang berhubungan dengan kelembagaan, kebijakan regulasi, pengelolaan kawasan ekowisata (tingkat lokal, daerah nasional, dan internasional).

Dalam membangun ekowisata selain dibutuhkan sebuah perencanaan terpadu juga perlu diperhatikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, untuk menciptakan ekowisata dibutuhkan sinergi antara pengelola wisata dan wisatawan. Sisi pengelola wisata adalah operator wisata,

pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sisi wisatawan meliputi pemasaran, pengelolaan wisatawan dan perilaku wisatawan.



Gambar 7. Kerangka Kerja Ekowisata

Untuk melaksanakan ekowisata diperlukan adanya operator wisata yang menurut Wood 2002 bertanggung jawab dalam:

- menyediakan informasi sebelum perjalanan berkaitan dengan budaya dan lingkungan lokasi ekowisata (misal baju dan perilaku yang sopan)
- melakukan *Briefing* yang mendalam saat kedatangan termasuk informasi tentang kondisi geografis, sosial, politik dan beberapa kendala/ tantangannya
- menyediakan lokal *guide* terlatih
- memberikan kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan penduduk lokal
- membangun pengertian atas kehidupan sehari-hari dan tradisi penduduk local dan berbagai isu yang cocok untuk didiskusikan dalam interaksi dengan penduduk local.
- membuka kesempatan bagi *Non Government Organization (NGO)* yang ingin berpartisipasi
- mengatur agar semua tiket masuk harus dibayar penuh
- menyediakan akomodasi yang ramah lingkungan (*site-sensitive*)

Operator juga memastikan bahwa ada kegiatan konservasi baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh *stakeholder* seperti wisatawan dan pemerintah. Operator wisata dapat berasal dari swasta, LSM dan masyarakat lokal. Sesuai dengan karakteristiknya, operator wisata selain berfungsi sebagai pemandu wisata yang menyediakan informasi yang dibutuhkan juga mempersiapkan akomodasi yang ramah lingkungan (*eco-lodge*) sebagai akomodasi yang cocok bagi wisatawan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya di lokasi ekowisata.

Akomodasi yang ramah lingkungan dianggap merefleksikan inisiatif lokal dalam menerapkan desain lokal dan pemakaian bahan lokal. Akomodasi khusus yang dibangun ini mampu menghindari tekanan yang lebih banyak bagi lingkungan dan relative lebih mudah perawatannya. Selain itu, wisatawan akan lebih terkesan dengan suasana eksotik yang muncul dari akomodasi semacam ini. Wood (2002), mengemukakan bahwa karakteristik *eco-lodge* sebagai berikut:

- Melindungi lingkungan alam dan budaya
- Memperkecil dampak negatif dalam pembangunannya
- Dibangun sesuai dengan budaya lokal seperti bentuk dan warna
- Menggunakan air dengan efisien (mampu mengurangi pemakaian air)
- Memiliki penanganan limbah
- Memakai energi yang ramah lingkungan
- Membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berinteraksi
- Menawarkan program pendidikan bagi operator, wisatawan maupun penduduk lokal tentang lingkungan alam dan budaya
- Berkontribusi pada pembangunan lokal yang berkelanjutan melalui program riset.

Selain itu salah satu faktor penting yang termasuk dalam pengelolaan lain adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial budaya setempat.

**BAB
9****WISATA BAHARI****Tujuan Instruksional Khusus :**

Untuk mengetahui defenisi wisata bahari, jenis-jenis wisata bahari dan wisata bahari yang berkelanjutan.

9.1. Defenisi Wisata Bahari

Wisata bahari adalah jenis wisata minat khusus yang memiliki aktivitas yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut (*marine*) maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut (*sub marine*). Wisata bahari oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pariwisata, dimasukkan ke dalam wisata minat khusus; sedangkan wisata minat khusus didefinisikan sebagai: "suatu bentuk perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus mengenai sesuatu jenis obyek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di lokasi atau daerah tujuan wisata tersebut". (Bengen, 2001)

Menurut Fandeli (2000) wisata bahari adalah wisata yang obyek daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal landscape*)

9.2. Jenis-Jenis Atraksi Wisata Bahari

Dalam penentuan suatu lokasi wisata bahari dipergunakan kriteria yang dianut oleh Ditjen Pariwisata dalam (Nontji, 1994), yaitu menilai 8 (delapan) faktor uji:

1. Ketersediaan sinar dan panas matahari
2. Suhu rata-rata air laut
3. Mutu pasir pantai
4. Kejernihan air laut

5. Luas areal yang dikembangkan
6. Jenis dan kepadatan ikan koral
7. Jenis dan kepadatan koral hidup
8. Kemurian alam

Menurut Bengen (2001) wisata bahari didasarkan atas pemandangan keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Sedangkan jenis kegiatan wisata bahari memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak. Kegiatan langsung antara lain berperahu, berenang, *snorkeling*, *diving* dan memancing. Sedangkan kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olah raga pantai, piknik dan menikmati atmosfer laut.

Selanjutnya dikatakan bahwa pantai yang landai dan diliputi oleh pasir putih sangat cocok untuk dijadikan tempat berjemur di bawah sinar matahari, air laut tenang dan sangat jernih juga sangat cocok untuk berenang. Faisal (2002) mengemukakan kriteria pembatasan pengembangan pariwisata pantai dan laut untuk berenang adalah sebagai berikut; lereng 0 - 2, relief datar, material pantai pasir, drainase baik, vegetasi baik, suhu 25 - 27 C, pasang surut beda kecil, kekeruhan tidak ada, penyinaran matahari baik, kedalaman laut 0 - 5 m, ketersediaan air tawar baik, kualitas air jernih, material dasar laut pasir, gelombang dan arus kecil.

Menurut Nontji (1987) suatu lokasi yang dinyatakan layak untuk dikembangkan, menuntut beberapa persyaratan tertentu. Direktorat Perencanaan Direktorat Jenderal Pariwisata menentukan beberapa kriteria-kriteria khusus yang disyaratkan dalam suatu wilayah sehingga layak untuk dikembangkan pariwisata bahari, sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelaman

Kegiatan ini menurut Direktorat Perencanaan Ditjen Pariwisata dalam Nontji (1994), mensyaratkan lokasi dengan kriteria umum sebagai berikut :

1. Kejernihan air (*visibility*)

Kegiatan penyelaman yang mempunyai beberapa macam peminatan mensyaratkan kejernihan air sebagai unsur utama potensi suatu lokasi. Kejernihan air yang cukup adalah apabila jarak pandang

yang memadai minimal adalah 10 meter pada waktu cuaca baik (matahari bersinar terang). Jarak pandang 6 - 10 meter dianggap cukup, namun jika jarak pandang sudah kurang dari 6 meter maka dianggap buruk. Sedangkan jarak pandang yang baik adalah apabila penyelam dapat melihat hingga mencapai jarak 25 meter. Lokasi yang berada di mulut sungai yang cenderung berlumpur dianggap buruk, sebab kejernihan airnya tidak baik. Pandangan juga tidak baik jika terumbu karang telah mati. Unsur utama yang mempengaruhi jarak pandang adalah :

- pergerakan air
- Cuaca
- Partikel-partikel dalam air
- Susunan dasar laut

2. Cuaca

Cuaca merupakan unsur mikro yang menentukan kegiatan penyelaman. Pada musim tertentu, yaitu pada saat angin dan ombak besar, cuaca tidak menguntungkan untuk kegiatan penyelaman. Musim hujan juga berpengaruh terhadap kejernihan air

3. Ombak

Lokasi penyelaman harus terlindung dari ombak besar dan berbahaya, terutama yang pecah (*breaker waves*). Ombak pecah memiliki ciri berbuih pada puncaknya yang disebabkan bukan oleh tiupan angin. Ombak ini sering terjadi di daerah bibir karang dan pada daerah terumbu karang yang dangkal.

4. Arus

Lokasi dengan arus yang kencang atau deras tidak cocok sebagai daerah tujuan penyelaman. Lokasi yang juga harus dihindari adalah daerah dengan arus berputar dan menyedot ke bawah (dasar) laut.

5. Suhu

Pemantauan terhadap suhu laut harus senantiasa dilakukan guna menentukan jenis pakaian selam yang akan digunakan. Suhu yang telah mencapai kurang dari 16°C mensyaratkan pemakaian *wet suit*. Suhu yang baik untuk penyelaman adalah 24° - 26° C.

6. Pasang Surut

Pasang surut air laut di lokasi penyelaman merupakan unsur mikro yang harus selalu dipantau. Pemantauan meliputi jam pasang surut dan perbedaan ketinggian air pada waktu pasang surut.

7. Kehidupan Laut

Lokasi penyelaman haruslah aman bagi wisatawan dari binatang atau tumbuhan laut yang berbahaya.

8. Lalu lintas kapal atau perahu

Lokasi dengan lalu lintas kapal dan perahu yang ramai bukanlah daerah yang tepat untuk menyelam.

9. Lokasi penangkapan ikan

Daerah yang dijadikan lokasi penyelaman haruslah bebas dari nelayan penangkap ikan. Bahaya daerah penangkapan ikan dapat berasal dari lalu lintas kapal atau perahu nelayan, jaring panjang para nelayan yang terbuat dari nilon, atau pun pancing yang bermata banyak (*long line*).

Kegiatan penyelaman sendiri memiliki beberapa macam, yakni:

1. Penyelaman untuk menikmati keindahan flora dan fauna, merupakan kegiatan penyelaman rekreasi di daerah terumbu karang dengan kekayaan jenis tanaman dan ikan. Lokasi yang baik untuk penyelaman ini adalah daerah landai.
2. Penyelaman pada bangkai kapal (*wreck diving*), yang merupakan daerah rekreasi yang diminati secara khusus oleh petualang sejarah kelautan.
3. Penyelaman dengan memasuki gua. Kegiatan menyelam ini dilakukan oleh mereka yang telah berada pada tingkat mahir. Tingkat bahaya kegiatan ini jauh lebih tinggi daripada kegiatan menyelam yang lain.
4. Penyelaman fotografi. Kegiatan fotografi bawah air merupakan salah satu cabang dari kegiatan rekreasi menyelam yang lain.
5. Penyelaman malam hari. Kegiatan penyelaman malam hari dilakukan di daerah terumbu karang yang telah sering diselami dan diketahui sebagai daerah yang aman.

b. Kegiatan Berenang

Berenang merupakan wisata yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, dari anak-anak hingga dewasa. Kegiatan wisata berenang ini menurut Direktorat Perencanaan Dirjen Pariwisata dalam Nontji (1994), memiliki beberapa persyaratan, yakni ;

1. Terdapat pantai yang lebarnya lebih dari 5 meter sehingga wisatawan dapat duduk, mengeringkan tubuh dan berjemur di pasir.
2. Pantai tidak berkarang sehingga tidak membahayakan perenang.
3. Ombak tidak terlampau besar.
4. Tidak terdapat arus yang kuat dan bersifat menarik atau menyedot.
5. Air laut tidak mengandung lumpur.

c. Kegiatan Parasailing

Parasailing adalah kegiatan olahraga laut dengan menggunakan payung terbang (parasut). Satu atau dua penumpang bergayut pada parasut yang ditarik oleh sebuah perahu motor. Kegiatan yang dilakukan dari tepi pantai atau laut. Semakin besar tekanan angin, semakin tinggi pula terbang parasailing. Persyaratan lokasi yang cocok untuk parasail adalah :

1. Kecepatan angin yang diukur 2 meter dari permukaan pantai tidak boleh lebih dari 12 mph, 10 knot, 19,3 km/jam.
2. Arah angin ideal bertiup dari arah laut menuju daratan.
3. Luas pantai yang dipergunakan sebagai tempat terbang maupun mendarat tidak kurang dari 25 x 25 m². Lokasi ini harus terbebas dari pohon, tiang atau benda lain yang dapat mengganggu.

d. Water ski dan Jet ski

Ski air (*Water ski*) adalah kegiatan olahraga laut dengan menggunakan papan luncur tepat berdiri, dan menggunakan perahu bermotor (*speed boat*) untuk menarik pemain yang bersangkutan. Sedangkan jet ski berbentuk sepeda motor. Persyaratan lokasi yang cocok untuk jet ski adalah lebar pantai yang mencapai 600 meter dan ombak yang tidak terlalu besar.

e. Permainan Banana Boat

Permainan ini terdiri dari perahu karet yang bentuknya seperti pisang, yang ditarik oleh perahu bermotor. Para penumpang duduk dalam perahu karet tersebut dengan menggoyang-goyangkan perahu tersebut. Kegiatan ini

tidak membutuhkan ombak yang besar, lebar pantai juga tidak perlu yang luas.

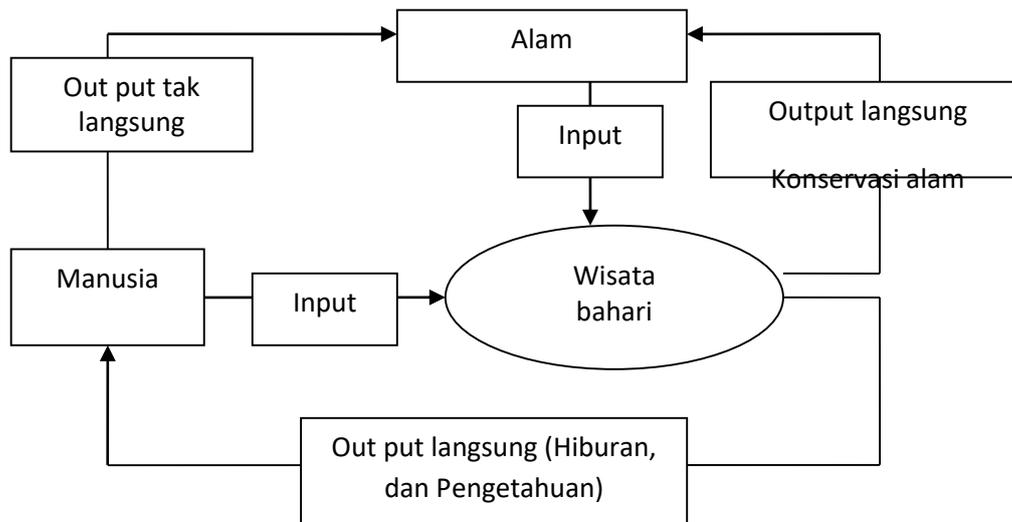
9.3. Wisata Bahari Berkelanjutan

Pembangunan wisata bahari diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Wisata bahari dengan kesan penuh makna bukan semata-mata memperoleh hiburan dari berbagai suguhan atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan tetapi juga diharapkan wisatawan dapat berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk ekosistem pesisir sehingga membentuk kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah pesisir dimasa kini dan masa yang akan datang.

Jenis kegiatan wisata bahari yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan di antaranya berperahu, berenang, *snorkeling*, *diving*, memancing dan dayung. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer laut, menikmati upacara adat istiadat dan budaya masyarakat pesisir dan lautan (Nurisyah, 2001).

Dengan demikian, cakupan kegiatan wisata bahari ini memiliki spektrum industri yang sesungguhnya sangat luas dan bisnis yang ditawarkannya sangat beragam, antara lain jasa penyedia transportasi, kapal pesiar, pengelola pulau kecil, pengelola taman laut, hotel, restoran terapung, kawasan lepas pantai, rekreasi pantai, konvensi di pantai dan di laut, pemandu wisata alam, dan sebagainya. Tentunya industri-industri pendukung juga akan terbuka lebar antara lain jasa foto dan video, pakaian dan peralatan olah ragam jasa kesehatan, jasa keamanan laut, jasa *rescue*, kerajinan dan cenderamata, pemasok makanan dan minuman, hiburan dan lain sebagainya.

Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah.



Gambar 8. Skema Konsep Wisata Bahari Berkelanjutan (DKP, 2002)

Wisata bahari merupakan pasar khusus untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam. Lindberg dan Hawkins (1995) merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama pengembangan kawasan wisata, yaitu :

1. Lingkungan; pengembangan kawasan wisata bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu
2. Masyarakat; pengembangan kawasan wisata harus memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
3. Pendidikan dan Pengalaman; pengembangan kawasan wisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki.
4. Berkelanjutan; pengembangan kawasan wisata dapat memberikan sumbang positif bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Manajemen; pengembangan kawasan wisata harus dikelola secara baik dan menjamin *sustainability* lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasi mendatang.

Wisata bahari merupakan pasar khusus untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam. Lindberg dan Hawkins (1995)

merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama pengembangan kawasan wisata, yaitu:

6. Lingkungan; pengembangan kawasan wisata bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu
7. Masyarakat; pengembangan kawasan wisata harus memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
8. Pendidikan dan Pengalaman; pengembangan kawasan wisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki.
9. Berkelanjutan; pengembangan kawasan wisata dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
10. Manajemen; pengembangan kawasan wisata harus dikelola secara baik dan menjamin *sustainability* lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasi mendatang.

Dari skema tersebut di atas terlihat bahwa output langsung yang diperoleh berupa hiburan dan pengetahuan sedangkan output langsung bagi alam yakni adanya insentif yang dikembalikan untuk mengelola kegiatan konservasi alam. Output tidak langsung yaitu berupa tumbuhnya kesadaran dalam diri setiap orang (wisatawan) untuk memperhatikan sikap hidup sehari-hari agar kegiatan yang dilakukan tidak berdampak buruk pada alam. Kesadaran ini tumbuh sebagai akibat dari kesan yang mendalam yang diperoleh wisatawan selama berinteraksi secara langsung dengan lingkungan bahari.

Orientasi pemanfaatan utama pesisir dan lautan serta berbagai elemen pendukung lingkungannya merupakan suatu bentuk perencanaan dan pengelolaan kawasan secara terpadu dalam usaha mengembangkan kawasan wisata. *Cultural* dan *physical aspect* merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata bahari. Gunn (1993) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu :

- a. Mempertahankan kelestarian lingkungannya
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut

- c. Menjamin kepuasan pengunjung
- d. Meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya.

Di samping ke empat aspek di atas kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial akan bermakna. Secara umum ragam daya dukung wisata bahari meliputi :

1. Daya dukung ekologis, bahwa daya dukung ekologis sebagai tingkat maksimal penggunaan suatu kawasan.
2. Daya dukung fisik. Suatu kawasan wisata merupakan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan dalam areal tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas.
3. Daya dukung sosial. Suatu kawasan wisata dinyatakan sebagai batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan dimana melampauinya akan menimbulkan penurunan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan.
4. Daya dukung rekreasi merupakan suatu konsep pengelolaan yang menempatkan kegiatan rekreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan kawasan. (Nurisyah, 2001)

DAFTAR PUSTAKA

- Bengen. D., 2001. *Wisata Bahari Berkelanjutan, Menyeimbangkan Tujuan Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Budaya dalam Kerangka Etik*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-PKSPL-IPB, Bogor
- Gunn, G., 1993. *Tourism Planning. Basics, Concepts, Cases*. Third Edition. Taylor & Francis Publisher.
- Hadinoto, 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Hidayati, Deny, dkk. 2003. *Ekowisata: Pembelajaran dari Kalimantan Timur*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan dan Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Lindberg, Hawkins. 1995. *Ekoturisme : Petunjuk Untuk Perencanaan dan Pengelolaan*. The Ecotourism Society. North Benington, Vermont.
- Lewaherilla, 2002. *Pariwisata Bahari; Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*, Makalah Falsafah Sains, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Nontji, 1994. *Wisata Bahari Pulau-Pulau Tiga (Tundonia, Tenga, Paniki) Sulawesi Utara*. Proyek Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P3O-LIPI), Jakarta.
- Nurisyah, 2001. *Rencana Pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia*. Buletin Taman dan Lanskap Indonesia. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Volume 3, Nomor 2, 2000. Studio Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian IPB Bogor.
- Suyitno, 2001. *Perencanaan Wisata*, Kanisus, Yogyakarta
- Yoeti, 1996. *Anatomi Pariwisata*. Penerbit Angkasa Bandung, Bandung.